

Dr. Harjito, M.Hum.



HEGEMON GRAMSCI

dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbit (KDT)

HEGEMOMI GRAMSCI dalam Sastra Indonesia: Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana
Kolonial/Dr. Harjito, M.Hum.,
Editor Dra. Sri Suciati, M.Hum.

Cetakan pertama 2014

Cetakan kedua 2014

Lay out : lontar media

Disain cover : wawan coret

Xii:142/16 x 24,5 cm

ISBN: 978-602-0960-42-5

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun termasuk menggunakan mesin fotocopi tanpa seizin penerbit.

2014

Dr. Harjito, M.Hum.,/ HEGEMOMI GRAMSCI dalam Sastra Indonesia: Student Hijo,
Nasionalisme, dan Wacana Kolonial
Hak cipta penerbitan oleh UPGRIS PRESS

UPGRIS PRESS

untuk
Sri Wijayanti,
Sena Segara Rizky H, &
Ian Seger Harjuna
matahari dalam rindu, embun dalam kalbu

PENGANTAR

Buku ini merupakan Analisis Hegemoni Gramscian atas novel *Student Hijo* Karya Marco Kartodikromo. Pertama kali saya mendapatkan novel *Student Hijo* di tahun 2001 atau 2000 an ketika jalan-jalan menyusuri kota Yogyakarta sembari mencari buku demi buku. Saya agak lupa-lupa ingat. Yang kemudian saya jadikan sebagai sumber data penelitian adalah sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka. Sesudah itu, terbit novel yang sama dengan penerbit yang berbeda.

Kajian Gramscian yang mempertimbangkan pengarang dan situasi historis atau sosiologi sastra di Indonesia sampai sejauh ini sangat terbatas. Aplikasi sosiologi sastra terutama sosiologi Gramscian masih langka. Apalagi, kajian atas *Student Hijo* dan Marco Kartodikromo yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian awal. Buku ini mengisi kelangkaan itu. Harapan saya, buku ini dapat meramaikan penelitian sastra Indonesia.

Buku ini dibagi atas lima bagian. Bagian 1 menampilkan latar belakang pentingnya bahasan atas *Student Hijo* dan hal-hal yang pernah membahas *Student Hijo*. Bagian 2 menjelaskan teori hegemoni Gramsci serta apa itu ideologi. Bagian ini bolehlah disebut sebagai landasan teori atas kajian yang dibahas di bagian berikutnya. Bagian 3 berisi nasionalisme dan ideologi dalam *Student Hijo*. Bagian 4 mengenai wacana perlawanan yang membahas negosiasi, pers, pergerakan nasional, penelusuran latar historis pengarang Marco Kartodikromo, dan politik etis. Bagian 5 merupakan penutup yang merupakan simpulan. Ideologi bagaikan tukang sulap yang selalu membuat orang menjadi tertarik dan terpesona. Bagaimana ideologi yang selama ini berada dalam masyarakat berangkai dengan ideologi yang terdapat dalam karya sastra dan sebaliknya.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Saya berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Banyak hal yang pada akhirnya tidak dilakukan karena dua ketakutan. Satu, takut gagal. Dua, takut disebut jelek. Semoga kita telah melampaui dua hal itu.

Selamat membaca.

Harjito

daftar isi

PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR SINGKATAN iv

1. PENDAHULUAN: TENTANG *STUDENT HIJO* 1

 A.Catatan Pembuka 1

 B.Yang Bicara Soal *SH*..... 6

2. HEGEMONI GRAMSCI 12

 A. Hegemoni 12

 B. Elemen Ideologi 23

3. ANTARA FEODALISME DAN NASIONALISME 29

 A. Feodalisme 30

 B. Kolonialisme dan Kapitalisme 40

 C. Liberalisme dan Rasialisme 48

 D. Huhamisme dan Nasionalisme 55

 E. Jalinan Ideologi..... 63

4. WACANA PERLAWANAN..... 73

 A. Negosiasi 74

 B. Marco, Pers, dan Pergerakan Nasional 95

 C. Politik Etis dan Bahasa *Lingua Franca*..... 113

 D. Wacana Perlawanan..... 123

5. PENUTUP: IDEOLOGI PERLAWANAN 133

DAFTAR PUSTAKA..... 138

daftar singkatan

| | |
|--------|----------------------------------------------|
| CSI | Central Sarekat Islam |
| ELS | Europeesche Lagere Scholen |
| HBS | Hollandsche Burger Scholen |
| ISDV | Indische Sociaal Democratische Vereeniging |
| OSVIA | Opleiding School voor Inlandsche Ambtemareem |
| PKI | Partai Komunis Indonesia |
| SDI | Sarekat Dagang Islam |
| SH | Student Hijo |
| SI | Sarekat Islam |
| SR | Sarekat Rakyat |
| STOVIA | School tot Opleiding van Inlandsche Artsen |
| VOC | Vereenigte Oost – Indische Compagnie |

1

Pendahuluan: Tentang *Student Hijo*

A. Catatan Pembuka

Banyak buku yang ikut merintis dan melicinkan jalannya kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilacak dari isinya yang menentang kolonialisme Belanda di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak buku yang merintis revolusi sosial Indonesia ialah *Student Hijo* (selanjutnya disebut *SH*). *SH* dapat digolongkan ke dalam karya-karya yang sengaja dilarang¹, baik oleh Pemerintah Kolonial maupun Pemerintah Orde Baru. *Hikayat Kadiroen* karya Semaun serta karya-karya Pramoedya Ananta Toer termasuk juga dalam karya yang sengaja dilarang pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto.²

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1988, penerbitan buku-buku yang bertema “sensitif” dan “garang” semakin bebas (*Kompas*, 10 Oktober 1999). Pengertian sensitif berkait dengan cinta dan seks, sementara garang, terutama sekali, berkait dengan kekuasaan pemerintah. Penerbitan *SH* merupakan dampak positif dari kejatuhan Soeharto.³

Setelah kurang lebih tiga setengah abad dikuasai Belanda, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan sehari sesudahnya, dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Oleh karena itu, “penjajahan di atas dunia harus

¹ Pengertian dilarang mengacu pada kategori yang dibuat oleh Heryanto (Faruk, 1994: 97-100) yaitu kesusastraan yang dimusuhi atau dibasmi oleh lembaga resmi pemerintahan, seringkali juga oleh individu atau lembaga swasta.

² Menurut pengakuan Pramoedya Ananta Tour (*Kompas*, 22 Agustus 2000) pelarangan atas buku-bukunya yang berlaku sejak 1966 hingga saat ini belum pernah dicabut

³ Pada April 2000 Yayasan Bentang Budaya Yogyakarta menerbitkan ulang *SH* karya Marco Kartodikromo. Selain itu, diterbitkan ulang juga karya Semaun *Hikayat Kadiroen*. Dengan demikian, pada tahun 2000 paling tidak ada dua penerbit berbeda yang menerbitkan *SH* karya Marco Kartodikromo.

dihapuskan”, baik penjajahan yang berupa fisik maupun yang bersifat nonfisik. Kemerdekaan bukanlah milik segolongan orang, kulit putih atau bangsa Barat, misalnya. Kemerdekaan milik semua bangsa. Frasa tersebut, setidaknya-tidaknya, menentang ideologi rasialisme dan kolonialisme.

Pada alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditandakan bahwa “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia” telah sampai “ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia”. Soekarno (Tsuchiya, 1986: 189) menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas. Dari masyarakat terjajah menyeberang melalui jembatan emas menuju masyarakat baru. Masyarakat baru tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai masyarakat yang tidak terjajah dan hal itu berarti luas.

Proses menuju revolusi sosial, yaitu kemerdekaan, tentu telah dirintis jauh-jauh hari sebelumnya.

Revolusi sosial harus didahului oleh revolusi kebudayaan atau revolusi ideologis. Revolusi tidak pernah berlangsung spontan, alamiah, tetapi melibatkan faktor-faktor kultural yang memungkinkan terjadinya revolusi tersebut. Sebagaimana terjadi di Perancis melalui tulisan Benet bahwa “bayonet tentara-tentara Napoleon menemukan jalannya (yang) telah dilicinkan oleh tentara buku-buku dan pamflet-pamflet yang tidak terlihat dan sudah memenuhi Paris dari pertengahan abad XVIII” (Faruk, 1994: 62, 66, 67). Berangkat dari hal itu, kemerdekaan Indonesia pastilah sudah dirintis dan dilicinkan oleh buku-buku.

Dalam pembicaraan tentang sisi sosio-kultural karya sastra, Grebstein (Damono, 1984: 4-5) menyatakan sebagai berikut. Satu, karya sastra merupakan pengaruh timbal balik yang rumit dari faktor sosial dan kultural; karya sastra bukanlah suatu gejala yang tersendiri, yang lepas dari dunia sekitarnya: karya sastra merupakan objek kultural yang rumit, dan karenanya pemahaman atas karya sastra akan tak lengkap manakala karya sastra dilepaskan dari lingkungan yang menghasilkannya. Dua,

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

sastra merupakan kegiatan sungguh-sungguh serta tak ada karya sastra besar yang diciptakan atas dasar gagasan dangkal dan sepele. Tiga, Karya sastra merupakan eksperimen moral, yaitu tanggapan evaluatif terhadap kehidupan yang ditampilkannya. Empat, bentuk dan isi karya sastra dapat mencerminkan perubahan-perubahan dalam watak kultural. Lima, kritik sastra selayaknya dapat menciptakan iklim penciptaan seni besar. Enam, kritikus selayaknya memberi penafsiran yang dibutuhkan oleh masa kini.

Empat pendapat Grebstein yang pertama bersangkutan dengan kondisi sosiologis karya sastra, sementara dua yang terakhir berkait dengan kritik dan kritikus. Dalam analisis terhadap karya sastra, empat hal pertama yang telah disebut Grebstein tersebut sebaiknya menjadi perhatian.

Goldmann (Faruk, 1988: 20, 34) menyebut bahwa karya sastra sebagai fakta kemanusiaan, yaitu segala hasil aktivitas atau perilaku manusia, baik yang verbal maupun yang nonverbal yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan, merupakan struktur yang berarti (*significant structure*). *Significant structure* berarti bahwa penciptaan karya sastra melibatkan hubungan manusia dengan dunia. Fakta kemanusiaan berarti “karya sastra merupakan ekspresi kebutuhan tertentu manusia”. Berkait dengan pendapat Grebstein, maka “kebutuhan tertentu manusia” selayaknya diungkap dalam analisis karya sastra.

Marco Kartodikromo, pengarang *SH*, memiliki profesi sebagai wartawan sekaligus aktivis revolusioner yang dipenjara beberapa kali karena aktivitasnya. Sebagian besar karya sastranya, termasuk *SH*, lahir pada saat ia dipenjara.

Marco melancarkan ‘perang suara’ terhadap pemerintah Kolonial. Satu ciri Marco adalah bahasanya sangat keras. Ketika berpolemik dengan Dr. Rinkes, yang menjabat penasihat urusan bumiputra, Marco mengubah *welvaarts-commissie* menjadi wc (jamban), dan kedokteran Rinkes disamakan dengan dukun (Shiraishi, 1997: 110-117), sebuah

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

perbandingan yang berani sekaligus menyakitkan. WC atau jamban dalam konteks masyarakat Indonesia mengacu kepada sebuah tempat yang berbau busuk dan kotor. Komisi Kesejahteraan, WC, disamakan dengan kebusukan dan kekotoran, sementara doktor dipersandingkan dengan dukun yang bersifat irasional dan primitif, yang justru dijauhi oleh masyarakat Barat yang sangat rasional.

SH pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar *Sinar Hindia* pada tahun 1918. Pada tahun 1919, karya itu terbit sebagai buku. *SH* menarik untuk dikaji karena di dalamnya terdapat berbagai gambaran, yaitu: keinginan menjadi mahasiswa (*student*), rasialisme dengan superioritas kolonial, pergerakan Sarekat Islam, dan nasionalisme pada saat Indonesia (masih disebut Hindia) berada dalam kekuasaan Belanda. Marco melukiskan bangsa Jawa yang datang ke Belanda justru dihormati masyarakat Belanda. Dengan melihat situasi masyarakat Belanda secara langsung, muncul pemikiran Hijo, tokoh utama dalam *SH* dan sebagai wakil dari bangsa Jawa, bahwa tidak seharusnya Indonesia diperintah dan dikuasai Belanda karena negeri Belanda dan masyarakatnya “cuma begini saja”. “Cuma begini saja” tulis Marco dalam novel tersebut dan hal itu terjadi saat Indonesia berada dalam kekuasaan Belanda. Gambaran nasionalisme dapat diperhatikan dalam kutipan berikut ini.

Sesudahnya Hijo dan *Leeraar*-nya turun dari kapal, terus ke hotel, kedatangannya di situ Hijo dihormat betul oleh sekian budak hotel, sebab mereka memikirkannya, kalau ada orang yang baru datang dari tanah Hindia, mesti banyak uang, lebih-lebih kalau orang Jawa. Dari itu, Hijo tertawa di dalam hati melihat keadaan serupa itu, karena dia ingat nasib bangsanya yang ada di tanahnya sama dihina oleh bangsa Belanda kebanyakan.

“Kalau negeri Belanda dan orangnya itu cuma begini saja keadaannya, betul tidak seharusnya kita orang

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Hindia mesti diperintah oleh orang Belanda,” begitu Hijo di dalam hatinya.

(hlm. 58-59)

Ada dua versi penulisan nama Marco, yaitu Marco Kartodikromo (Teeuw, Toer) dan Marco Martodikromo (Situmorang, Sumardjo, Rosidi). Untuk menghindari kekeliruan, buku ini menggunakan penyebutan Marco.⁴

Berkait dengan uraian ini, patut dicatat pendapat Rosidi dan Watson.

SH bukanlah novel tradisi Balai Pustaka yang merupakan organ politik Pemerintah Kolonial. Dalam tradisi Balai Pustaka sebagaimana disebut Faruk (1999b: 3), bahwa novel pertama sastra Indonesia adalah *Azab dan Sengsara* (1920) karya Merari Siregar, sementara novel awal yang dianggap menonjol adalah *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli. Rosidi (1988: 145) menduga bahwa kurangnya penelitian sastra sebelum Balai Pustaka ialah karena para penelaah sastra Indonesia di Indonesia hanya mengikuti saja apa yang telah dirintis para sarjana Belanda yang selama ini memperhatikan pada karya-karya Balai Pustaka. Hal serupa dinyatakan oleh Watson (Faruk, 2000: 37) bahwa penulisan sejarah sastra Indonesia bukan didasarkan pada fakta yang objektif, melainkan oleh dorongan subjektif. Ahli sastra Indonesia terpesona pada ahli sastra Barat, dalam hal ini Belanda, sehingga tak mampu bersikap kritis terhadapnya dan menerima saja pandangan mereka yang menonjolkan jasa Pemerintah Kolonial Belanda.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, penerbitan kajian atas *SH* karya Marco Kartodikromo mendesak untuk dilakukan. Teori hegemoni Gramsci penting dipergunakan karena untuk mengetahui bagaimana peranan *SH* dan Marco Kartodikromo dalam sejarah bangsa Hindia

⁴ Dalam *Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern* (Eneste, 1990) nama Marco Kartodikromo masuk di dalamnya. Dalam *Leksikon Sastra* yang ditulis Yusuf (1995) nama Marco tak tercantum. Leksikon yang terakhir itu justru mencantumkan Garcia Gabriel Marquez, pengarang Columbia; Guy de Maupassant, pengarang Perancis; atau Karl May, penulis kisah-kisah suku Indian.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

(Indonesia). Bagaimana peranan *SH* dan Marco dalam usaha menciptakan masyarakat baru, masyarakat Hindia yang bebas dari penjajahan Belanda dapat dijawab secara memadai dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

Berangkat dari uraian di depan, permasalahan dalam buku ini sebagai berikut. Satu, bagaimana formasi ideologi *Student Hijo* karya Marco Kartodikromo. Dua, bagaimana hubungan persamaan formasi ideologi *Student Hijo* dengan formasi ideologi dalam masyarakat. Tiga, bagaimana hubungan historis *Student Hijo* sebagai bagian dari negosiasi ideologi yang terjadi dalam masyarakat.

Buku ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan sehubungan dengan ideologi dalam *Student Hijo* karya Marco Kartodikromo. Tujuan teoretis buku ini adalah menerapkan teori hegemoni Gramsci terhadap *Student Hijo* karya Marco Kartodikromo. Teori hegemoni Gramsci dapat melengkapi analisis karya sastra dengan menelusur sisi historis karya sastra dan pengarangnya. Dengan demikian, sebuah analisis menjadi lebih berwarna. Di samping itu, buku ini untuk memperkaya dan menambah khazanah bidang sastra. Sampai saat ini, buku teori sastra yang memuat teori hegemoni Gramsci masih amat langka. Tujuan praktis buku ini adalah memberikan sebuah alternatif pemahaman terhadap *Student Hijo* karya Marco Kartodikromo. Pemahaman yang lebih jernih terhadap *Student Hijo* dan Marco Kartodikromo diharapkan menjadi langkah awal masyarakat dalam menghargai dan menempatkan secara memadai *Student Hijo* dan Marco Kartodikromo, baik dalam sejarah sastra Indonesia maupun dalam sejarah bangsa Indonesia.

B. Yang Bicara Soal *SH*

Buku-buku, laporan penelitian, dan makalah yang membahas hegemoni ideology dalam *SH* karya Marco Kartodikromo sejauh ini masih sangat langka. Kalau ada, perhatian itu belum terfokus dan bersifat tersebar. Kajian Hegemoni, *SH*, atau Marco pernah disinggung

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Heryanto, Toer, Sumardjo, Teeuw, Situmorang, Rosidi, Liji, Shiraishi, dan Pradopo.

Heryanto (Faruk, 1994: 97-100) melakukan penelitian sastra Indonesia dengan kerangka teori hegemoni Gramscian. Heryanto membedakan antara kesusastraan yang diresmikan/diabsahkan, yang terlarang, yang diremehkan, dan yang dipisahkan. Yang diresmikan adalah kesusastraan yang mendapat penghargaan dan perhatian dari berbagai individu dan lembaga pemegang kekuasaan politik. Kesusastraan ini diajarkan dalam buku teks di sekolah dan dicatat dalam buku sejarah kesusastraan. Kesusastraan yang terlarang merupakan kesusastraan yang dimusuhi atau dibasmi oleh lembaga resmi pemerintahan, individu atau lembaga swasta. Pelarangan buku-buku Pramoedya merupakan salah satu contohnya. Kesusastraan yang diremehkan adalah kesusastraan yang tidak termasuk dalam khazanah sastra atau studi, kritik, sejarah kekusastraan yang diresmikan. Namun, keberadaannya tidak secara resmi dinyatakan sebagai terlarang. Sastra pop, sastra hiburan, sastra remaja merupakan contoh kesusastraan yang diremehkan oleh kritikus sastra dan pemerintah. Kesusastraan yang dipisahkan merupakan karya yang bukan karya sastra Indonesia atau definisi karya sastranya tidak diakui sama sekali. Yang termasuk golongan ini ialah nonsastra Indonesia dan nonsastra. Contoh golongan pertama adalah sastra daerah. Golongan kedua meliputi karya jurnalistik, sejumlah iklan, esai, propaganda politik, berbagai anekdot, selebaran gelap, dan lirik lagu.

Meskipun penerapan teori hegemoni telah cukup memadai, Heryanto belum secara khusus membicarakan kesusastraan yang terlarang, yang di dalamnya tercakup *SH* karya Marco Kartodikromo.

Pramoedya Ananta Toer (Kurniawan, 1999: 155-156) pernah membahas *SH* karya Marco Kartodikromo dalam “Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia”. Toer membuat periodisasi sejarah sastra yang

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

memasukkan peranan Marco Kartodikromo. Toer menyebut periode sastra asimilatif dan periode sastra gatra. Sastra asimilatif merupakan bentuk peralihan dari sastra tradisional ke sastra modern. Sastra modern mendapat pengaruh dari Eropa. Karya-karya Lie Kim-Hok termasuk dalam periode ini. Periode tersebut menggunakan bahasa Melayu kerja dan Melayu sekolah. Melayu kerja dipergunakan di kalangan kelas menengah, sementara Melayu sekolah dipergunakan pada tradisi feodal-birokrat.⁵ Periode Sastra gatra muncul bersamaan dengan pers berbahasa Melayu. Periode ini memiliki kecenderungan sosialistik. Raden Mas Tiro Adhisoerjo, Hadji Moekti, serta Marco Kartodikromo merupakan nama-nama yang mengisi periode ini. Sebagaimana kritikus yang telah disebut terdahulu, tulisan Toer pun masih bersifat terbatas, yaitu belum merupakan penelitian yang mendalam. Sifat tulisan Toer sangat singkat dan tidak terfokus.

Sumardjo⁶ dalam keempat bukunya, yaitu: *Masyarakat dan Sastra Indonesia* (1979), *Novel Populer Indonesia* (1982a), *Novel Indonesia Mutakhir Sebuah Kritik*. (1982b), dan *Pengantar Novel Indonesia* (1991) hanya menyinggung sedikit tentang keberadaan Marco Kartodikromo.

Ada empat hal yang dapat dicatat dalam karya Marco. Pertama, karya Marco menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini (di)bungkam oleh Pemerintah Kolonial. Kedua, Marco menggunakan bahasa yang cukup keras. Konsekuensi darinya, karya-karya Marco dipinggirkan, bahkan dimatikan oleh pihak yang merasa terganggu oleh suaranya. Pihak yang terganggu adalah Pemerintah Kolonial Belanda. Ketiga, seiring dengan pergerakan nasional yang sedang marak di Indonesia, karya Marco menyampaikan kesadaran berbangsa. Keempat,

⁵ Untuk periode sastra asimilasi atau periode sastra Cina Peranakan telah mendapat cukup perhatian. Setidak-tidaknya ada tiga buku tentang hal tersebut, yaitu: *Sastra Cinta Peranakan dalam Bahasa Melayu* yang ditulis Claudine Salmon (1985), *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* karya Leo Suryadinata (1996), dan *Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia* disunting oleh Marcus AS dan Pax Benedanto (2000). Untuk yang terakhir direncanakan 25 jilid.

⁶ Sumardjo adalah kritikus yang banyak menulis artikel sastra dengan pendekatan sosiologis dan tertarik dengan sastra tradisi peranakan Tionghoa dan populer.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

yang sangat penting penting adalah Marco mengecam kolonialisme Belanda (Sumardjo, 1979: 70-71).

Dalam sebuah wawancara (*Kompas*, 31 Oktober 1999), Sumardjo menyatakan bahwa sekitar tahun 1911 sastra dipergunakan sebagai alat pendidikan⁷, dan karena estetikanya berbeda dengan estetika Balai Pustaka kemudian karya itu dianggap sebagai bukan sastra.

Karya Marco tidak dianggap sastra justru karena tidak mendidik rakyat agar setia kepada pemerintah Belanda. Kelemahan mendasar Sumardjo, tulisannya sangat sepintas dan belum merupakan penelitian yang mendalam. Bahasan Sumardjo (1979) tentang Marco Kartodikromo bersifat singkat, tidak terfokus, serta terpotong-potong karena Sumardjo berangkat dari tulisan artikel, bukan kajian khusus.

Teeuw (1978: 34-45), kritikus yang sangat berminat terhadap sastra Indonesia, dalam buku *Sastra Baru Indonesia 1* mencatat tentang Marco. Namun, Teeuw tidak membaca karya Marco karena “tidak berkesempatan memeriksa”, sebuah kelemahan sangat mendasar dalam kajian karya sastra. Teeuw hanya membaca ringkasan cerita melalui petikan dalam buku Bakri Siregar.

Dari ringkasan cerita serta petikan-petikan yang dikemukakan dalam buku Bakri Siregar, maka saya memperoleh kesan bahwa roman Mas Marco rapat benar persamaannya dengan *Hikayat Kadirun* Semaun pada segala seginya.

Teeuw menyamakan karya Marco dengan karya Semaun dan tidak melihat sisi-sisi perbedaan antara karya Marco dengan karya Semaun.

Situmorang dalam *Sejarah Sastra Indonesia 1* (1980: 24-25) hanya menyinggung sepintas Marco Kartodikromo. Situmorang mengakui bahwa pada saat itu ukuran sastra “biasanya” didominasi oleh Balai

⁷ Pengertian pendidikan di sini harus diartikan sebagai pendidikan kepada masyarakat Indonesia untuk setia kepada pemerintah Belanda.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Pustaka. Salah satu tolok ukur Balai Pustaka adalah penggunaan bahasanya, dan di sinilah Situmorang terjebak oleh ukuran yang dipergunakan Balai Pustaka yang disebutnya sebagai bahasanya yang “kurang”.⁸

Rosidi (1991: 15) dalam buku *Iktisar Sejarah Sastra Indonesia* --- buku yang banyak dipakai sebagai acuan pengajaran sejarah sastra di perguruan tinggi Indonesia --- menyinggung keberadaan Marco.

Di bawah judul “ikhtisar” dapat diperkirakan bahwa apa yang dikemukakan Rosidi bersifat sangat sepintas dan karenanya pengkajiannya tidak memadai.

Liang Liji (Faruk, 2000: 51-53) dalam *Masalah Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia* menyebut nama Marco Kartodikromo. Liji menulis bahwa sastra Indonesia modern memiliki tiga ciri. Pertama, tema dan isinya melukiskan kenyataan dan semangat kehidupan zaman modern yang dilatari kesadaran serta kebangkitan nasional. Kedua, bentuk serta teknik penggarapan telah meninggalkan pola dan tradisi lama yang beku dan diganti dengan bentuk modern seperti novel, puisi baru, atau drama. Ketiga, menggunakan bahasa yang mengarah kepada bahasa Indonesia yang dipakai sekarang. Berdasar tiga ciri tersebut, Liji membuat periodisasi sastra Indonesia. Pertama, sastra revolusioner; diwakili karya Mas Marco dan Semaun. Ciri mereka berani mengekspos serta mengecam penjajahan Belanda dan menyatakan aspirasi tentang kemerdekaan. Kedua, sastra nasionalis, diwakili Tirtoadisuryo, Mohamad Yamin, dan Abdul Muis. Ciri sastra nasionalis masih menunjukkan sikap nasionalisme, tetapi dalam nada yang tidak sekeras sastra revolusioner. Ketiga, sastra antiadat, diwakili karya-karya terbitan Balai Pustaka. Sastra antiadat berciri tidak menentang penjajah, melainkan menentang

⁸ Dalam catatan kaki “Universalisme yang Menyangkal: Nasionalisme dalam Sastra” Faruk (1995: 50) mensinyalir bahwa keinginan untuk menjadi bangsa beradab menyebabkan sastra berbahasa Melayu Rendah atau bahasa Melayu yang dianggap rendah lainnya yang biasa dipakai dalam sastra Peranakan Tionghoa dan roman picisan disingkirkan dari gagasan tentang sastra Indonesia

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

feodalisme. Keempat, sastra asimilatif atau sastra peranakan, diwakili Njoo Cheng Seng, Liem Khing Hoo, Kwee Tek Hoay, dan lain-lain.

Shiraishi dalam buku *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* cukup banyak menyinggung nama Marco. Pembahasan Shiraisi bukan berfokus/berkait dengan *SH*, tetapi kepada aktivitas Marco sebagai wartawan dan aktivis pergerakan.

Pradopo (1995: 12) dalam tulisan “Masalah Angkatan dan Penulisan Sejarah Sastra Indonesia” mengakui pentingnya penelitian *Student Hidjo*.

Sebenarnya perlu diadakan penelitian (pembicaraan) karya sastra sebelum tahun 1920 itu, misalnya sebelumnya sudah ada roman yang terbit secara sporadis seperti *Student Hidjo*, *Hikayat Kadirun*. Mungkin masih ada selain kedua buku itu, namun sampai sekarang belum ada ditemukan.

Berangkat dari tinjauan pustaka yang telah disebutkan di depan dan pendapat Pradopo, buku ini sudah selayaknya diterbitkan untuk melengkapi khazanah penelitian sastra di Indonesia.

2

Hegemoni Gramsci

A. Hegemoni

Teori yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teori hegemoni Antonio Gramsci. Agar lebih memahami teori hegemoni Gramsci, sebelum teori tersebut diuraikan, terlebih dahulu disampaikan teori kelas Karl Marx.

Terdapat tiga unsur penting dalam teori kelas Marx. Pertama, besarnya peran struktural dibandingkan dengan segi kesadaran dan moralitas. Kedua, perbedaan kepentingan antara kelas atas dan kelas bawah menyebabkan sikap yang berbeda terhadap perubahan sosial. Kelas atas cenderung bersikap konservatif, sementara kelas bawah bersikap progresif dan revolusioner. Kelas atas berkepentingan mempertahankan *status quo*, menentang segala perubahan dalam struktur kekuasaan, sementara kelas bawah berkepentingan terhadap perubahan. Ketiga, setiap kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi (Magnis-Suseno, 1999: 117-119).

Menurut Marx, kehidupan manusia dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu infrastruktur (basis) dan superstruktur (atas). Infrastruktur adalah bidang produksi kehidupan material yang dibentuk dua faktor, yaitu tenaga produktif dan hubungan produktif. Superstruktur adalah proses kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Superstruktur ditentukan oleh infrastruktur. Superstruktur terdiri atas tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif. Tatanan institusional mengatur kehidupan masyarakat di luar bidang produksi, terutama negara dan hukum. Tatanan kesadaran kolektif mencakup pandangan dunia, agama, filsafat, moralitas masyarakat, budaya, seni, sistem kepercayaan, norma, nilai, dan sebagainya. (Magnis-Suseno, 1999: 135-148).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Teori Marxis, menurut Gramsci, menghargai manusia dan percaya bahwa manusia adalah subjek, fakta yang mengubah sejarah. Penciptaan sejarah bukanlah aktivitas ideologis, tetapi suatu tindakan praktis yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan nyata (Salamini, 1981: 40).

Gramsci mengakui konsep dialektika dan menekankan dialektika antara ide dan material, dialektika antara proses material dengan kesadaran. Material tidak dapat sepenuhnya mendikte kesadaran dan kesadaran sama sekali pasif. Kesadaran memiliki peranan penting dan umpan balik terhadap proses material (Salamini, 1981: 49; Bellamy, 1990: 169).

Yang membedakan Gramsci dari teori Marxis sebelumnya adalah pandangannya bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pluralitas pandangan dunia, pluralitas ideologi. Persoalan yang kemudian muncul, ideologi manakah yang valid. Pandangan dunia yang valid adalah pandangan dunia yang rasional⁹, tidak hanya memiliki otoritas, juga harus mempunyai kemampuan memobilisasi, memolitisasi, dan mereformasi. Ketiga kemampuan yang disebut terakhir disebut elemen solidaritas, elemen paling menentukan, dan memungkinkan terbentuknya blok historis, yaitu kesatuan antara infrastruktur dengan superstruktur. Sebelum menguasai negara, manusia harus menguasai dahulu pikiran, menguasai kesadaran (Salamini, 1981: 34-35; Simon, 2000: 81).

Genesis setiap kelompok sosial dicirikan oleh suatu pola hubungan tertentu dengan alat-alat produksi. Titik keberangkatannya merupakan usaha memperoleh hegemoni kultural dan politik. Hegemoni dicapai bila suatu kelompok sosial tertentu menjadi kekuatan yang menyatukan dan mengarahkan semua kelompok sosial lain. Di dalam

⁹ Rasional bukan hanya koherensi keyakinan atau konsensus tentang keabsahannya, melainkan perihal daya praktiknya (Bellamy, 1990: 182)

masyarakat, terdapat banyak kelas dan banyak ideologi. Hegemoni tercapai apabila semua itu disatukan dan diarahkan (Salamini, 1981: 34).

Ada tiga fase untuk menjadi kelas hegemonik, yaitu: fase ekonomik, fase politik, dan fase hegemoni (Simon, 1999: 34-36; Salamini, 1981: 33, 55-56). Fase ekonomik atau fase negatif adalah wilayah materialistik, wilayah keniscayaan, sesuatu yang tidak terelakkan manusia. Fase ini merupakan suatu momen ekonomik yang menimbulkan kesadaran satu kelas akan adanya hegemoni politik. Munculnya alternatif sejarah/historis sangat bergantung pada perkembangan cara-cara produksi, misalnya, dari cara produksi manual ke mekanik. Proses tersebut tidak cukup untuk mengubah sejarah. Terjadinya perubahan cara produksi tidak dengan sendirinya mengubah sejarah, tetapi harus diikuti fase politik.

Fase politik, fase kedua, yaitu hubungan kekuatan-kekuatan politik yang memungkinkan identifikasi berbagai tingkat homogenitas dan kesadaran politik yang dicapai oleh kelompok yang secara potensial hegemonik.

Fase ketiga adalah fase hegemoni atau fase positif, yaitu wilayah kebebasan, suatu proses kreasi pandangan dunia baru yang memperlengkapi massa dengan kategori-kategori pikiran, perilaku, dalam proses penciptaan satu pandangan dunia baru/*world view*. Fase positif disebut juga fase hegemoni ideologis. Elemen-elemen kesadaran yang superstruktural, ideologi, kebudayaan merupakan faktor yang menentukan sifat, ruang lingkup, dan hasil sebuah revolusi. Hegemoni ideologi dapat diartikan sebagai suatu organisasi kesadaran. Hal ini dibedakan dengan dominasi yang bersifat penataan terhadap kekuatan material.

Pada fase hegemoni, suatu kelas mengembangkan solidaritas politik dengan interest-interest kelompoknya tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan, dan bahkan mengatasi batas-batas kelompoknya serta menyentuh kepentingan kelompok subordinat lain.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Hegemoni berlangsung bila suatu kelas sudah mengembangkan dan memperluas interesnya dengan memperhitungkan interes kelompok *subaltern*. Jika tidak memperhitungkan interes kelompok *subaltern*, hegemoni tidak akan tercapai.

Manifestasi fase tersebut adalah terbentuknya negara. Negara tidak lagi membawa bendera interes kelas yang berkuasa, tetapi menyatakan diri mewakili kepentingan umum. Negara merupakan organ satu kelompok dominan yang berkoordinasi dengan kepentingan umum kelompok-kelompok *subaltern*. Fase ini disebut fase terbentuknya blok historis, yang di dalamnya suatu kelompok sudah menjadi hegemonik dan memperluas hegemoninya meliputi seluruh kelompok *subaltern* (Salamini, 1981: 58; Bellamy, 1990: 192-193). Blok historis bukanlah suatu aliansi berbagai kelas, melainkan situasi hegemonik yang di dalamnya kohesi sosial dijamin, suatu konsepsi baru mengenai dunia (superstruktur) oleh suatu kelas yang dominan (infrastruktur) (Salamini, 1981: 35).

Hegemoni dibedakan atas tiga tingkat, yaitu hegemoni integral, hegemoni merosot, dan hegemoni minimum (Hendarto, 1993: 75). Hegemoni integral adalah hegemoni yang diidealkan, bahwa antara massa dan pimpinan tidak ada masalah yang berarti. Hubungan yang terjalin adalah hubungan yang kuat. Kesepakatan berjalan baik tanpa ada kontradiksi karena adanya kesatuan moral dan intelektual. Hegemoni merosot terjadi jika masyarakat tidak sejalan dengan kepemimpinan yang ada. Dalam kondisi demikian, dimungkinkan masyarakat mendapat kesepakatan lain yang tidak sejalan dengan kepemimpinan yang ada. Dengan alasan tertentu, kesepakatan lain itu tampak mendukung kepemimpinan yang ada. Hegemoni minimum adalah hegemoni yang bermasalah. Kepemimpinan yang ada berlawanan dengan kesepakatan masyarakatnya.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Beberapa konsep yang patut diketahui adalah hegemoni ideologi, intelektual organik, dan intelektual tradisional (Salamini, 1981: 60-65; Simon, 1999: 143).

Dalam aktivitas superstruktural dan proses promosi blok historis yang baru, konsep hegemoni ideologi amatlah penting. Erosi ideologi dari kelas yang berkuasa harus diikuti penciptaan suatu ideologi baru, satu sistem gagasan baru, sistem kepercayaan dan nilai-nilai baru. Revolusi dapat terjadi bukan bergantung pada kondisi struktural, tetapi bergantung pada kondisi superstruktur.

Intelektual termasuk fungsionaris superstruktur atau fungsionaris ideologi. Intelektual berfungsi mengelaborasi ideologi kelompok dominan, memberikan kesadaran akan ideologi itu, dan mentransformasinya menjadi suatu konsepsi ideologi yang kemudian harus disebarkan kepada seluruh masyarakat. Intelektual yang menjalankan fungsi demikian disebut intelektual organik karena mereka membentuk suatu hubungan organik antara kelas sosial yang direpresentasikannya dengan superstruktur. Intelektual organik merupakan intelektual kelas yang berkuasa atau kelas dominan.

Intelektual organik berposisi dengan intelektual tradisional. Setiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan harus menyerap intelektual-intelektual tradisional untuk melawan intelektual organik. Selain intelektual organik dan intelektual tradisional, terdapat intelektual kolektif. Intelektual kolektif disebut Gramsci sebagai partai. Partai adalah himpunan intelektual kolektif.

Partai berfungsi membentuk suatu kehendak kolektif. Partai sebagai suatu kelompok berbeda dari kelompok massa atau kelompok sosial yang tidak sadar/tidak aktif secara politik. Partai lenyap ketika intelektual kolektif mentransformasi dirinya menjadi universal/negara yang sudah membangun interes global masyarakat. Partai merupakan pengamanan antisipasi akan terbentuknya masyarakat yang progresif di masa depan dan instrumen difusi suatu ideologi. Partai adalah kekuatan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

yang melakukan eksperimen terhadap konsepsi baru mengenai dunia dan mendifusikannya (Salamini, 1981: 62; Hoare, 2000: 147-148). Karenanya, partai politik menjadi sesuatu yang sangat diperlukan bagi kelompok-kelompok yang ingin memperoleh hegemoni.¹⁰ Dalam hubungannya dengan persoalan hegemoni, partai berfungsi memimpin suatu kelompok sosial yang progresif dan fundamental untuk memperoleh hegemoni kultural dan politik. (Salamini, 1981: 65; Bellamy, 1990: 197-198).

Partai terdiri atas tiga unsur. Pertama, rakyat biasa. Kedua, kepemimpinan yang mengkoordinasikan aktivitas di tingkat nasional. Ketiga, unsur penengah yang mengartikulasikan unsur pertama dengan kedua dan memelihara hubungan tersebut, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan intelektual (Bellamy, 1990: 199). Organisasi massa/partai tidak mungkin terjadi tanpa intelektual (Salamini, 1981: 65).

Perihal seni¹¹, Gramsci sampai pada konsep nondeterminan tentang hubungan antara struktur dan superstruktur. Seni bukanlah refleksi pasif kepentingan kelas¹² (Salamini, 1994: 198). Problem estetika berkaitan dengan problem hegemoni dan penciptaan budaya baru. Problem seni, kritik sastra, dan peran seniman tidak dapat dipisahkan dari visi umum dan strategi sosialis mencapai hegemoni budaya baru (Salamini: 1994: 206).

Dari apa yang telah disampaikan di depan, ada empat hal yang patut dicatat dalam teori Gramsci. Pertama, berbeda dengan teori Marxis,

¹⁰ Hoare (2000: 16, 120) dalam catatan pendahuluan menyatakan bahwa di Italia, saat itu, partai menjadi satu-satunya kekuatan dalam arena sosialisme. Juga, partai sebagai peran pemersatu kekuatan-kekuatan yang ada.

¹¹ Di dalamnya dapat dimasukkan kategori sastra

¹² Kepentingan kelas menurut Marx, Engels, dan tradisi Sovyet berarti pelibatan penulis kepada kepentingan kelas dan kepada realisme sosialis (Selden, 1993: 25). Menurut Hilmar Farid (dalam pengantar Karyanto, 1997: xx) realisme sosialis dalam tafsiran pejabat kesenian Sovyet berarti seni yang menggambarkan kemenangan, pahlawan, dan optimisme membangun ekonomi serta masyarakat sosialis. Zon (1993: 44) menyebut beberapa ciri realisme sosialis yaitu: tokoh panutan (pahlawan) bersifat progresif revolusioner, konflik antara tokoh komunis dan nonkomunis, serta keyakinan kemenangan perjuangan kaum proletar. Tugas utama sastra kelas (Fokkema & Elrud Kunne-Ibsch, 1998: 121-122) yaitu melatih, terutama pemuda, berpartisipasi dalam pembentukan dan kemenangan sosialisme.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Gramsci berpendapat bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pluralitas ideologi. Kedua, berbeda dengan teori Marx yang menyebutkan bahwa konflik hanya di sekitar hubungan produksi, konflik antarkelas; Gramsci menyatakan bahwa konflik tidak hanya antarkelas, tetapi konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat global (umum) untuk mendapatkan kontrol ideologi dan politik terhadap masyarakat. Ketiga, jika Marx menyebut kelas sosial harus menyadari keberadaan dirinya dan memiliki semangat juang sebagai kelas, Gramsci menyatakan bahwa untuk menjadi kelompok dominan, kelompok harus mewakili kepentingan umum. Kelompok dominan harus berkoordinasi, memperluas, dan mengembangkan interestnya dengan kepentingan-kepentingan umum kelompok *subaltern*. Dengan demikian, kata kunci dalam pemahaman teori hegemoni Gramsci adalah negosiasi. Negosiasi dibutuhkan agar konsensus dicapai dengan kerelaan dan dapat diterima semua kelompok. Keempat, Gramsci berpandangan bahwa sastra/seni berada dalam superstruktur. Seni diletakkan dalam upaya pembentukan hegemoni dan budaya baru. Seni membawa ideologi (superstruktur) yang kohesi sosialnya dijamin kelompok dominan. Ideologi tersebut merupakan wujud *counter* hegemoni (hegemoni tandingan) atas hegemoni kelas penguasa yang dipertahankan melalui anggapan palsu bahwa kebiasaan dan kekuasaan penguasa merupakan kehendak Tuhan atau produk hukum alam. Seni merupakan salah satu upaya persiapan budaya sebelum sebuah kelas melakukan tindakan politik. Hal ini berarti bahwa seniman/sastrawan adalah intelektual. Untuk mengidentifikasi ideologi, tidak hanya melihat karya seni/karya sastra, tetapi juga memperhatikan intensi pengarang dan pandangan seniman mengenai kehidupan, serta kondisi sosial historis pada saat yang bersangkutan.

Kriteria metodologis umum teori sosiologis Gramsci adalah materialisme historis, yaitu melihat masyarakat dalam perspektif perkembangannya dan dalam konteks usaha-usaha untuk mengubah

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

sejarah. Arti dari mengubah sejarah adalah menciptakan masyarakat baru/kehidupan baru dan dalam konteks dialektika antara kekuatan material dengan kekuatan ideologis. Ada tiga hal yang patut diperhatikan dalam sosiologi ini. Pertama, sosiologi ini tidak hanya mempelajari hubungan bagian-bagian struktur sosial yang ada, tetapi juga hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian. Gramsci mempelajari hubungan antara bagian dengan keseluruhan karena keseluruhan dapat menentukan struktur kualitatif bagian-bagian dan bagian-bagian dapat menentukan struktur kualitatif secara keseluruhan. Kedua, berbeda dengan sosiologi positivistik yang mereduksi hukum-hukum sosial pada hukum-hukum alamiah dan mengabaikan kesadaran aktivitas manusia, sosiologi Marxis Gramsci menelaah peranan aktif manusia dalam pembentukan secara sadar perkembangan proses historis. Ketiga, berbeda dengan strukturalisme fungsional sosial, sosiologi marxis tidak memfokuskan diri dalam perubahan sistem yang ada, tetapi perubahan totalitas sistem sosial yang diakibatkan oleh perkembangan kelompok-kelompok sosial yang berkonflik dalam usaha memperoleh hegemoni global (Salamini: 1981: 31-32, 96).

Berkait dengan hal itu, terdapat istilah yang perlu dijelaskan. Istilah-istilah tersebut adalah: bagian-bagian, keseluruhan, struktur sosial, struktur kualitatif, peranan aktif manusia, perkembangan, totalitas, dan hegemoni global.

Struktur sosial mengacu kepada formasi ideologi. Formasi adalah suatu susunan dengan hubungan yang bersifat pertentangan, hubungan yang bersifat korelasi, dan hubungan yang bersifat subordinatif. Formasi ideologi tidak hanya membahas ideologi apa saja yang terdapat dalam teks, dalam hal ini *SH*, tetapi juga bagaimana hubungan antara ideologi-ideologi tadi.

Ideologi adalah semua sistem besar yang memberikan orientasi kepada manusia. Karena merupakan sistem besar, ideologi mempunyai

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

pengikut. Hal ini berarti ideologi bersifat kolektif. Ideologi berada di wilayah superstruktur atau kesadaran dan menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang, lembaga-lembaga pemerintah, institusi pendidikan, organisasi-organisasi, organisasi industri, perusahaan komersial, atau serikat dagang.

Penataan terhadap kesadaran disebut hegemoni. Hegemoni dibedakan dengan dominasi yang merupakan penataan terhadap kekuatan material. Hegemoni global bukan saja meliputi kelompok yang sedang berkonflik memperebutkan kekuasaan, tetapi juga melibatkan dan mengikutsertakan kelompok-kelompok di luarnya. Kelompok tersebut dapat berupa kelompok-kelompok pecinta lingkungan, penyayang binatang, feminis, dan lain sebagainya. Hegemoni berciri adanya konsensus, yaitu penerimaan menyeluruh dari berbagai kelompok yang berbeda. Agar diterima berbagai kelompok yang berbeda dan mencapai konsensus dibutuhkan negosiasi. Manusia tidak hanya menerima secara pasif kotak-kotak ideologi yang ada, tetapi justru menegosiasikan ideologi-ideologi sesuai dengan tujuannya. Peranan aktif manusia adalah bagaimana manusia menegosiasikan ideologinya.

Hegemoni ideologi muncul dalam teks-teks, baik yang diproduksi kelompok yang berkuasa (kelompok dominan) maupun kelompok di luarnya (kelompok *subaltern*). Teks merupakan bagian dari praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat. Hal ini disebut sebagai bagian. Keseluruhan adalah struktur masyarakat yang berada di luar teks. Dengan memperhatikan keseluruhan dicek kembali formasi ideologi yang telah ditemukan dalam teks. Dari sudut pandang ini, struktur kualitatif mengacu kepada bagaimana hubungan teks dan pengarangnya dengan situasi historisnya.

Perkembangan diartikan dalam proses historis, yaitu usaha-usaha manusia mengubah sejarah atau menciptakan masyarakat baru, suatu kondisi tertentu yang lebih menjamin elemen kebebasan manusia. Totalitas mencakup semua kelompok, baik kelompok yang berkuasa

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

(kelompok dominan) maupun kelompok di luarnya (kelompok *subaltern*). Hegemoni global adalah hegemoni menyeluruh.

Salah satu dari sekian orang yang mengembangkan teori Gramsci adalah Raymond Williams. Menurut Williams, kebudayaan bukan sekedar alat dominasi. Kebudayaan didefinisikan sebagai bentuk bahasa koperatif, sebagai kontribusi kesadaran. Dalam pandangan Williams, konsep hegemoni Gramsci terlalu seragam, statis, dan abstrak. Williams berpendapat hegemoni tidak pernah menjadi singular, tetapi sebuah struktur kompleks, berkelanjutan untuk selalu diperbaharui, dikreasi, dipertahankan, dan dimodifikasi.¹³

Menurut Williams (Faruk, 2000: 6-7), dalam studi kultural konsep hegemoni mengimplikasikan banyak pengertian baru yang dapat membuka jalan atas pemahaman mengenai gejala kebudayaan sebagai sesuatu yang otonom. Setidak-tidaknya ada empat konsep hegemoni. Satu, hegemoni mengandung konsep kebudayaan sebagai cara hidup menyeluruh berkait dengan proses sosial, tetapi tetap mempertahankan gagasan kekuasaan dan perjuangan. Dua, hegemoni melampaui konsep ideologi karena memberikan tekanan kepada persoalan kesepakatan atas tatanan sosial yang berkuasa sebagai proses sosial yang dihayati, bukan dipaksakan. Tiga, hegemoni tidak mengizinkan reduksi karya dan aktivitas kultural hanya pada superstruktur, tetapi menjadi proses dasar dari formasi sosial sebagaimana hegemoni bekerja dan diperjuangkan. Empat, hegemoni mengandung konsep kebudayaan sebagai proses, bukan sebagai satu bentuk dominasi pasif, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus diperbaharui, diciptakan kembali, serta dimodifikasi

Dalam usahanya menerapkan teori hegemoni ke wilayah yang spesifik kultural, Williams (Faruk, 1994: 79-80; Faruk, 2000: 6-7) membedakan tiga kategori kebudayaan yang terlibat dengan kekuasaan. Tiga kategori tersebut adalah kebudayaan hegemonik, kebudayaan yang

¹³ Stillo, Monica. "Antonio Gramsci". <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#hege>

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

sedang bangkit, dan kebudayaan endapan. Kebudayaan hegemonik adalah kebudayaan yang memegang pimpinan. Kebudayaan yang sedang bangkit adalah kebudayaan yang sedang dalam proses perjuangan merebut hegemoni. Kebudayaan endapan adalah kebudayaan dari masa lampau yang masih berjuang mempertahankan hidup.

Metode penelitian teori sosiologis Gramsci adalah materialisme historis, yaitu melihat masyarakat dalam perspektif menciptakan masyarakat baru dalam konteks dialektika antara kekuatan material dengan kekuatan ideologi. Langkah-langkah di bawah ini merupakan langkah untuk menguji fakta-fakta dalam konteks historis dan dalam basis materialisme.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi ideologi-ideologi yang terdapat dalam *SH*. Identifikasi dilakukan dengan mencari persamaan pernyataan-pernyataan, baik yang berkait dengan tokoh, latar, setting, maupun permasalahan dalam *SH*, dengan konsep dan tipologi ideologi yang telah ada secara teoretis. Kemudian, dicari hubungan, baik korelasi maupun subordinasi, antara ideologi-ideologi tersebut. Hubungan korelasi dan subordinasi ditelusuri melalui pernyataan-pernyataan yang berkait baik dengan tokoh, latar, setting, maupun permasalahan dalam *SH*.

Berikutnya, formasi ideologi yang terdapat dalam *SH* dibandingkan dengan formasi ideologi yang terdapat di dalam masyarakat. Langkah terakhir adalah menghubungkan keberadaan *SH* dan Marco Kartodikromo dengan situasi historisnya. Ada dua cara penelusuran situasi historis. Pertama, dengan memperhatikan latar waktu cerita yang terdapat dalam *SH*. Kedua, dengan melihat tahun pertama kali *SH* terbit. *SH* pertama kali terbit tahun 1918. Oleh karena itu, hubungan historis berarti mengaitkan keberadaan *SH* dan Marco Kartodikromo dengan masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.

B. Elemen Ideologi

Dalam subbab ini dijabarkan ideologi. Sebelum itu, dipaparkan pengertian ideologi menurut Marx.

Menurut Marx, ideologi adalah semua sistem besar yang memberikan orientasi kepada manusia. Ideologi merupakan ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sehingga orang menganggapnya sah. Ideologi merupakan ilusi atau kesadaran palsu yang tidak menggambarkan situasi nyata manusia sebagaimana adanya. Ideologi menggambarkan realitas secara terbalik. Bukan berarti bahwa ideologi keliru dalam menggambarkan realitas, melainkan ideologi menggambarkan realitas serta penafsiran yang dibalik. Apa yang tidak baik dan tidak wajar dinyatakan sedemikian rupa sehingga tampak baik dan wajar. Ideologi melayani kepentingan kelas yang berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tak memiliki legitimasi. Dengan kritik ideologi, Marx mempertanyakan fungsi ideologi, kenyataan tersembunyi apa yang berada di belakang ideologi (Magnis-Suseno, 1999: 122-123).

Marx menyatakan bahwa tekanan agama pada dunia transenden, nonmaterial, dan harapan hidup sesudah mati membantu mengalihkan perhatian manusia atas penderitaan fisik dan kesulitan material dalam hidup. Selain itu, agama membalikkan prioritas alamiah dengan menyampaikan bahwa penderitaan dan kesulitan memiliki nilai rohani positif jika dijalani dengan sabar. Bahkan, segala macam kesulitan tersebut memperbesar kesempatan individu memperoleh pahala di alam baka. Kekayaan materi, status duniawi, serta kekuasaan dilihat oleh kesadaran agama sebagai ilusi, fana, dan berbahaya bagi kesejahteraan rohani individu. Kemiskinan diubah menjadi kebajikan dan kekayaan diubah menjadi kemiskinan rohani. Masyarakat kelas bawah akan semakin pasif dan lebih bersedia menanggung penderitaan berkaitan dengan status kelas rendahnya daripada memberontak. Selain itu,

ideologi agama memberikan dukungan tak terlihat terhadap pengaturan sosial, politik, dan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.

Di masa lampau, kepercayaan atas hak Ilahi raja-raja merupakan contoh legitimasi agama terhadap struktur politik. Pada umumnya, dukungan agama terhadap berbagai norma yang mendasari keteraturan sosial, yaitu norma-norma kepemilikan pribadi dan sebagainya, membenarkan *status quo* serta mendorong individu bertindak sesuai dengan tuntutan guna mempertahankan keteraturan sosial yang telah ada (Johnson, 1986: 136). Perihal agama, pandangan Gramsci tidak jelas. Agama merupakan bagian dari masyarakat sipil (Hoare dan Nowell Smith, 2001: 128). Gramsci menyebut “agama adalah konsensus dan gereja adalah masyarakat sipil, sedangkan aparat hegemonis adalah kelompok penguasa”. Dengan demikian, agama merupakan perangkat hegemoni, bukan perangkat dominasi yang menggunakan cara-cara paksaan.

Yang perlu dipertanyakan: mengapa agama, moral, nilai budaya selalu menguntungkan kelas atas? Menurut Marx, hal ini disebabkan pikiran yang berkuasa di setiap zaman merupakan pikiran kelas yang berkuasa. Maksud pemikiran ini adalah kelas yang berkuasa merupakan kekuatan material dan kekuatan spiritual masyarakat. Kelas-kelas yang menguasai sarana produksi material adalah kelas-kelas yang menguasai sarana produksi spiritual. Hanya kelas atas yang mampu meresmikan dan menyebarkan pemikiran serta gagasan mereka. Pada akhirnya, nilai-nilai resmi masyarakat adalah nilai-nilai kelas atas (Magnis-Suseno, 1999: 124-125).

Gramsci membagi superstruktur menjadi masyarakat sipil / madani dan masyarakat politik/negara (Hoare, 2000: 142). Ideologi termasuk dalam superstruktur. Gramsci memakai berbagai istilah yang ekuivalen dengan ideologi, yaitu: kebudayaan, filsafat, pandangan dunia, konsepsi mengenai dunia, atau reformasi moral dan intelektual (Simon, 2000: 8).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Dengan meminjam istilah elemen dari Salamini, ideologi dalam pandangan Gramsci mengandung empat elemen, yaitu: elemen kesadaran, elemen material, elemen solidaritas-identitas, dan elemen kebebasan. Keempat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam subbab di bawah ini.

Pertama, elemen kesadaran. Elemen kesadaran mengandung arti bahwa ideologi memberikan tempat kepada manusia untuk bergerak dan mendapatkan kesadaran akan posisi mereka dalam bidang ekonomi, politik, sosial, serta perjuangan untuk menjadi kelas hegemonik.

Titik awal elemen kesadaran adalah pemikiran awam, *common sense*, yaitu pemahaman seseorang yang tidak kritis dan tidak sadar terhadap dunia. *Common sense* berasal dari berbagai sumber dan kejadian masa lalu yang membuat masyarakat menerima kebiasaan, kekuasaan, ketidakadilan, dan penindasan sebagai hal alamiah, produk hukum alam, kehendak Tuhan, dan tidak dapat diubah. *Common sense* adalah tempat ideologi dominan dibangun, tempat perlawanan, dan tantangan bagi ideologi tersebut. Tugas teori Marxis adalah menjadi kritik bagi *common sense* dan memungkinkan masyarakat mengembangkan inti positif, *good sense*, untuk menjadi pandangan dunia yang lebih koheren (Simon, 2000: 27, 91-93; Bellamy, 1990: 187). Serikat buruh, misalnya, cenderung menuntut bagian kue kapitalis yang lebih besar serta mengajukan keluhan pekerja menurut aspirasi kelompok dominan, bukannya menuju cara baru mengorganisasikan kegiatan produktif (Bellamy, 1990: 186). Dalam Taylorisme, dengan pemberian insentif kepada individu justru menghancurkan semangat solidaritas kaum buruh. Amerika merealisasikan proyek Taylorisme. Hal ini berarti bahwa Amerika telah menekan kemampuan kritis kaum buruh serta mematikan tendensi alamiah buruh dalam mewujudkan organisasi kolektif.

Elemen kesadaran mirip dengan kritik ideologi Marx. Perbedaannya, Marx masih berbicara dalam cakupan kelas sosial, yaitu

kelas borjouis dan proletar; sementara cakupan Gramsci lebih luas lagi. Elemen kesadaran Gramsci justru harus dikaitkan dengan elemen solidaritas-identitas.

Kedua, elemen material. Elemen material adalah wujud eksistensi material dalam berbagai aktivitas praktis dan menjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat. Ideologi bukan fantasi atau angan-angan seseorang, tetapi menjelma dalam kehidupan keseharian, cara hidup kolektif masyarakat, lembaga, serta organisasi di tempat praktik sosial berlangsung. Organisasi itu, misalnya, partai politik, serikat dagang, organisasi lain dalam masyarakat sipil, aparat negara, perusahaan komersial, atau lembaga keuangan (Simon, 2000: 83-86, 136; Bellamy, 1990: 171, 185-186). Jika Croce berpendapat bahwa manusia sebagai kreator sejarah adalah manusia abstrak, manusia yang semata-mata merupakan fikiran; Gramsci berpendapat bahwa manusia pencipta sejarah adalah manusia historis, manusia yang harus berada dalam konteks historis tertentu. Penciptaan sejarah bukanlah aktivitas ideologi, tetapi merupakan tindakan praktis (Salamini, 1981: 30-31). Tindakan praktis mengandung dua maksud. Pertama, berwujud material sebagaimana dijelaskan di depan, yaitu menjelma dalam cara hidup kolektif. Kedua, wujud material itu sekaligus merupakan wujud pemecahan masalah secara langsung, pemecahan persoalan spesifik, persoalan nyata yang dihadapi oleh kelas.

Ketiga, elemen solidaritas-identitas. Elemen solidaritas-identitas berarti ideologi mampu mengikat, sebagai pondasi penyatuan sosial, berbagai kelompok sosial yang berbeda ke dalam satu wadah. Dengan demikian, kelompok-kelompok lain diikutsertakan, termasuk ideologinya, guna mendapatkan dukungan darinya. Dalam pernyataan tersebut secara tidak langsung diakui adanya pluralitas ideologi di masyarakat karena di masyarakat terdapat berbagai kelompok sosial. Inilah yang membedakan Gramsci dari teori Marxis sebelumnya (Salamini, 1981: 34). Kaum Yakobin dalam revolusi Perancis mengakui kebutuhan sektor-sektor

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

masyarakat lain (Bellamy, 1990: 193). Kaum Yakobin berusaha keras menyatukan kota dan desa. Mereka menjadikan tuntutan rakyat sebagai tuntutan mereka sendiri dan tidak semata-mata mementingkan diri sendiri.

Karena merangkul berbagai kelompok sosial, dalam menyusun ideologi baru tidak harus menyingkirkan semua sistem ideologi yang berbeda, tetapi justru melakukan transformasi ideologi dengan mempertahankan dan menyusun kembali beberapa unsurnya yang paling tangguh. Kata yang tepat untuk hal ini adalah kemampuan negosiasi.

Selain perjuangan kebebasan sipil, negosiasi ideologi dimungkinkan dengan gerakan yang mengekspresikan tuntutan perempuan (feminisme), mahasiswa, pemuda, kelompok minoritas, antinuklir, peduli lingkungan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Di Inggris, terjadi pergeseran ke arah kanan dalam partai Konservatif yang mampu memanfaatkan kebencian masyarakat atas berbagai aktivitas negara dan beban pajak yang meningkat. Partai Tory, sebagai pelopor kebebasan individu, melawan negara dalam pengurangan pajak, mendorong inisiatif individu, serta mengurangi peran pemerintah. Partai Tory menggunakan kebencian masyarakat untuk menentang birokrasi yang tidak adil, dan tak efisien serta memasukkan sentimen itu ke dalam sistem ideologi.

Untuk memahami gagasan Gramsci mengenai kemampuan bernegosiasi, sifat keterbukaan ini digambarkan dalam lukisan berikut. Dalam sebuah diskusi ilmiah, orang yang paling istimewa adalah orang yang menerima sudut pandang lawannya dan memasukkannya ke dalam bangunan pikirannya (Simon, 2000: 58-59, 90, 95).

Keempat, elemen kebebasan. Elemen kebebasan berarti ideologi menghasilkan kebebasan maksimal kepada individu untuk merealisasikan dirinya. Hal ini dapat ditarik kepada tesis awal bahwa pemikiran Gramsci tidak boleh dilepaskan dari manusia. Manusia merupakan pusat revolusi.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Inilah sumbangan penting Gramsci atas pemikiran Marxis (Hendarto, 1993: 71). Bukan basis ekonomi menentukan suprastruktur, tetapi basis ekonomi memberikan batasan bagi bentuk-bentuk kesadaran yang mungkin atas manusia. Kebebasan diukur sejauh manusia menguasai alam dan menguasai nasibnya (Bellamy, 1990: 191). Oleh Augelly dan Murphy (Sugiono, 1999: 29-30), elemen ini disebut instrumen pembebasan. Ideologi bukan saja membebaskan pekerja dari eksploitasi ekonomi kapitalis dan menggantikannya dengan dominasi proletar, tetapi juga membebaskan masyarakat dari kesadaran palsu. Kebebasan memberi peluang kepada masyarakat untuk menyadari ketertindasan dan mengarahkan aksi masyarakat dalam melenyapkan penindasan tadi.

Hal ini, balik lagi kepada persoalan perlunya kesadaran akan *common sense*, bahwa kekuasaan, ketidakadilan, dan penindasan bukanlah hal alamiah, produk hukum alam, kehendak Tuhan, dan tidak dapat diubah. Kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan adalah sesuatu yang dapat diubah oleh manusia karena manusia adalah subjek, fakta yang mengubah sejarah.

3

Antara Feodalisme dan Nasionalisme

Dalam bab ini dibahas formasi ideologi yang terdapat dalam *SH*. Telah disampaikan pada Bab II tentang empat elemen ideologi. Formasi ideologi ditelusuri melalui elemen material dan kemudian dikaji lebih lanjut berkait dengan elemen kesadaran, elemen solidaritas-identitas, serta elemen kebebasan. Bukan suatu keharusan keempat elemen tersebut hadir secara bersamaan. Elemen yang harus muncul tentulah elemen material yang merupakan wujud eksistensi material dalam berbagai aktivitas praktis dan menjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat, dalam kehidupan keseharian, lembaga, serta organisasi di tempat praktik sosial berlangsung.

Formasi ideologi dalam teks muncul melalui tokoh, setting, dan peristiwa. Setting mencakup tempat dan waktu. Dalam *SH* setting meliputi: kolonialisme Belanda, pasar, budaya Eropa, priyayi Jawa, Sarekat Islam, perasaan cinta, dan agama. Peristiwa identik dengan pengertian elemen material. Karenanya, penelusuran ideologi melalui elemen material sebagaimana disampaikan dengan rinci di bawah ini.

Telah disebut oleh Gramsci bahwa manusia adalah subjek, fakta yang mengubah sejarah. Mencermati hal tersebut, pengertian manusia mencakup dua hal. Pertama, dalam wilayah realitas, manusia adalah sang pengarang Marco Kartodikromo. Kedua, dalam wilayah teks, manusia

mewujud pada tokoh-tokoh cerita, dalam hal ini tokoh-tokoh yang muncul pada novel *SH*.

Tokoh dalam *SH* meliputi: Raden Hijo, Raden Potronoyo, Raden Nganten Potronoyo, Raden Ajeng Biru, Raden Ajeng Wungu, Raden Mas Wardoyo, Prayoga, *Regent* Jarak (Raden Mas Tumenggung), dan Raden Ayu *Regent*, Willem Walter, *Sergeant* Jepris, Jet Roos, Boeren, Karel (guru HBS), Betje, Marie, Piet (saudara Karel) dan Nyoya, Anna, dan Jetje.

A. Feodalisme

Di bawah subjudul ‘R. Potronoyo Hendak Mengirim Hijo ke Nederland’ cerita *SH* bergulir dengan keinginan R. Potronoyo untuk mengirim anaknya, Hijo, ke negeri Belanda guna melanjutkan sekolah.

“Kanda! Kanda! Bagaimana kalau anakmu kamu kirim ke negeri Belanda!” Begitu Raden Nganten Potronoyo menangis di muka suaminya waktu dia dikasih tahu bahwa anak lelakinya akan dikirim ke negeri Belanda buat sekolah *ingenieur*.

“Oh! Adinda, kamu tidak usah kecil hati,” berkata Raden Potronoyo kepada istrinya yang baru menangis di mukanya.

“Pikirlah, zaman sekarang ini anak-anak lelaki harus mempunyai kepandaian yang pantas, sebab kalau tidak begitu, anakmu susah bisa mendapat pekerjaan. Betul Hijo sudah tamat belajar dari HBS, tetapi dari sebab dia rupa-rupanya maju dan pikirannya tajam, baiklah dia saya suruh meneruskan pengajarannya buat jadi *ingenieur* di negeri Belanda. Dan lagi, kita toh masih bisa mencari uang buat mengongkosi dia sedikitnya *f* 100,00 tiap-tiap bulan.

...

“Saya ini seorang saudagar saja, kamu tahu sendiri, ini waktu orang seperti saya masih dipandang rendah oleh orang-orang yang jadi pegawainya *Gouvernement*. Kadang-kadang kita punya sanak sendiri yang sama turut *Gouvernement*, dia tidak suka

kumpul dengan kita, sebab pikirannya dia orang ada lebih tinggi derajatnya dari pada kita orang yang sama jadi saudagar atau tani. Maksud saya buat mengirimkan Hijo ke negeri Belanda itu tidak lain supaya orang-orang yang merendahkan kita orang ini bisa mengerti bahwa manusia itu sama saja, tandanya anak kita bisa belajar juga seperti anaknya *regent-regent* dan pangeran-pangeran.”

“Perlu apa kita mesti memikirkan perkara itu, Kanda?”
berkata Raden Nganten.

“Toh Hijo sudah sampai cukup pelajarannya buat jadi priyayi.

...

(hlm. 1-3)

Percakapan antara Raden Potronoyo dengan istrinya --- untuk sementara sedikit-tidaknyanya mengandung empat ideologi, yaitu: feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, dan humanisme --- yang jalin-menjalin.

Ada tiga hal yang menandai feodalisme dalam kutipan itu. Pertama, hubungan superior-inferior antara pedagang/petani dengan priyayi. Kedua, penyebutan istilah *priyayi*. Ketiga, penggunaan gelar *raden*.

Raden Potronoyo, seorang saudagar, berkeinginan menyekolahkan anaknya karena adanya superioritas pegawai pemerintah (*priyayi*) yang merasa lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pedagang dan petani. Mengapa bersekolah ke negeri Belanda itu penting karena dikemukakan sejak awal cerita, ketika alur cerita *SH* pertama kali dimulai.

Feodalisme menggambarkan struktur sosial-politik-ekonomi masyarakat Eropa pada abad Pertengahan. Masyarakat feodal ditandai dengan tanah-tanah luas yang dikuasai para tuan tanah atau para bangsawan. Pemilik tanah merupakan raja kecil yang berkuasa otonomi. Ciri pokok masyarakat feodal ialah sistem politik-ekonomi pertanian yang bersifat sempit; semua tanah pertanian milik raja atau bangsawan,

dan di bawahnya hierarki, yaitu kaum bangsawan tertinggi mendapat tanah langsung dari raja, kemudian bangsawan di bawahnya mendapat tanah dari bangsawan tertinggi, dan seterusnya. Dalam perkembangannya kemudian, bukan hanya tanah yang dipinjamkan, juga pangkat dan kedudukan, yang lama-kelamaan menjadi turun-temurun. Hak istimewa raja dalam hal pemerintahan diperlakukan sebagai hak pribadi. Di Hindia, menurut Furnivall, hubungan antara raja Jawa dan bangsawan berdasarkan adanya pertalian darah. Sistem feodal muncul berupa strata dalam masyarakat, tata cara pergaulan, dan berbicara untuk menunjukkan perbedaan tingkatan, kedudukan, dan status (*Ensiklopedia Nasional Indonesia*, 1989: 277-278). Shadilly (tt: 998) menyebut feodalisme muncul dalam wujud perbedaan bentuk bahasa yang menunjukkan perbedaan tingkat kedudukan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, elemen kesadaran feodalisme adalah milik dan kedudukan jabatan merupakan hak turun-temurun. Elemen solidaritas - identitas feodalisme adalah keluarga/turunan raja/bangsawan atau pegawai pemerintah

Perihal kepemilikan tanah milik raja terdapat di halaman 6, misalnya Kebun Binatang Sri Wedari milik Hinggang Sinuhun Solo, yang kemudian diulang di halaman 11.

Cuma seminggu sekali dia keluar dari rumahnya, pergi ke Sri Wedari (kebun binatang kepunyaan Hinggang Sinuhun di Solo).

(hlm. 6)

Masih terdapat pertanyaan siapakah Hinggang Sinuhun Solo? Hal itu secara tersirat terjawab di halaman 37, bahwa Hinggang Sinuhun Solo adalah Raja dengan penyebutan “Kebun Raja”.

Feodalisme dalam *SH* berwujud juga tentang gambaran priyayi. Di atas disebut bahwa “Hijo sudah sampai cukup pelajarannya buat jadi priyayi” (hlm. 3).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Dalam masyarakat Jawa dapat dibedakan dua golongan sosial, yaitu *wong cilik* (orang kecil) dan kaum priyayi. *Wong cilik* terdiri atas petani, termasuk di sini kaum pedagang, dan mereka yang berpendapatan rendah. Kaum priyayi adalah mereka yang termasuk kaum pegawai di tingkat rendah hingga di tingkat tinggi dan intelektual, guru SD, pegawai kantor pos, hingga pegawai pemerintah tingkat tinggi di kota-kota besar. Kaum priyayi tidak bekerja dengan tangan. Dalam rangka menaikkan harga diri kaum priyayi menikah dengan keluarga bangsawan, meniru gaya hidup kraton, atau memperoleh pendidikan akademik (Magnis-Suseno, 1984: 12-13). Priyayi berasal dari kata *para yayi* (para adik), maksudnya adik raja. Hal ini menyiratkan makna bahwa priyayi dipakai untuk orang-orang terhormat, berwibawa, serta dekat dengan pejabat yang paling tinggi. Menurut Niel (Kartodirdjo, 1993: 4), priyayi di tahun 1900-an merupakan kelompok elit, siapa saja di atas rakyat jelata yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur, dan menuntun masyarakat. Menurut Kartodirdjo (1993: 5), politik kepegawaian pemerintah Kolonial yang mengingat asal keturunan menyebabkan golongan priyayi merupakan korps yang tidak gampang ditembus tanpa melalui hubungan kekerabatan. Menurut Palmier (Kartodirdjo, 1993: 7), asal keturunan menentukan kepriyayian. Dua macam priyayi, yaitu: priyayi kecil dan priyayi *lubur*. Priyayi kecil ialah priyayi karena jabatan administrasi di pemerintahan; sementara priyayi *lubur* adalah priyayi sebenarnya yang dapat dilihat dari jabatan ayahnya, asal keturunan ibu, dan asal keturunan istri. Menurut Geertz (Kartodirdjo, 1993: 9), priyayi adalah kelompok sosial pendukung kebudayaan warisan kraton pada masa lalu. Karena sebelum Perang Dunia Kedua kelompok priyayi memegang kekuasaan, maka pola pandangan hidupnya menjadi ukuran umum atas tingkah laku dan pandangan hidup yang ideal dan baik. Menurut Moertono (Kartodirdjo, 1993: 10). priyayi merupakan lapisan sosial antara raja beserta keturunan

raja (*bendara*) dan rakyat kebanyakan. Keanggotaan priyayi dengan jalan duduk dalam dinas kerajaan atau bergantung pada dekatnya hubungan darah dengan pejabat kerajaan. Menurut Kartodirdjo (1993: 11), di daerah Kerajaan Jawa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta, priyayi adalah mereka yang bekerja di kantor Pemerintah dan yang bekerja di istana (*abdi dalem*), atau keluarga, dan kerabat raja. Untuk membedakannya, priyayi *luhur* untuk menyebut priyayi dari keluarga dan kerabat raja; priyayi *cilik* untuk menyebut priyayi di luar keluarga dan kerabat raja.

Menurut Kartodirdjo (1993: 26), golongan priyayi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Ciri-ciri itu tidak hanya berupa sopan-santun dan bahasa, tetapi juga berwujud kongkret seperti bentuk rumah, pakaian resmi, nama, dan gelar.

Dengan demikian, feodalisme yang muncul dalam budaya priyayi memiliki beberapa indikasi, yaitu: kepemilikan tanah atau kedudukan jabatan yang merupakan hak turun-temurun, bentuk rumah, pakaian resmi, penggunaan gelar kebangsawanan, dan bahasa yang berstrata.

Bentuk rumah dan pakaian, budaya priyayi dalam *SH*, tampak tidak dominan. Bentuk rumah dan pakaian hanya dilukiskan secara sepintas di halaman 91 dengan penyebutan “pendopo” dan “pakaian kebesaran”.

Belum lama mereka itu berdudukan di kursi rotan yang ada di pendopo kabupaten sambil mendengarkan suaranya klonengan, *regent* keluar dari rumah belakang dan sudah berpakaian kebesaran.

(hlm. 91)

Rumah bupati di Jawa merupakan miniatur istana raja di Surakarta dan Yogyakarta, yaitu sebuah kompleks tempat tinggal dengan *alun-alun*, tanah lapangan luas yang terletak di depan kompleks tempat tinggal bupati. Kompleks tempat tinggal bupati dengan *alun-alun* dibatasi pagar tembok yang merupakan salah satu sisi pagar tembok yang mengelilingi kompleks tempat tinggal bupati. Di bagian pagar di depan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

rumah kabupaten dan yang menjadi batas dengan alun-alun, di tengahnya terdapat pintu gerbang/*regol*/gapura. Kompleks tempat tinggal bupati memiliki dua bangunan utama, yaitu *dalem ageng* dan *pendhapa*. *Dalem ageng* adalah rumah utama yang menjadi tempat tinggal bupati beserta keluarga. Di depan *dalem ageng* terdapat bangunan *pendhapa* yang luas dan menghadap ke alun-alun. Bangunan pendapa berbentuk segi empat atau segi panjang, beratap *joglo*, dan semua sisinya disambung *emper*. Bagian depan *emper* sering dibuat *kuncung*, yaitu atap menojol yang bertujuan agar penumpang yang turun dari kendaraan dapat langsung masuk ke *pandhapa*. *Pendhapa* merupakan bangunan yang terbuka. *Pendhapa* digunakan untuk menerima tamu resmi, konfrensi, pertemuan, pesta, dan sebagainya. Lantai *pendhapa* 40 - 50 cm lebih tinggi daripada lantai *emper* yang mengelilinginya. Kemudian, penguasa pemerintahan dinyatakan dengan pakaian resmi. Pakaian ini bukanlah pakaian dinas sehari-hari, tetapi pakaian resmi untuk peristiwa resmi tertentu, misalnya upacara kerajaan atau pertemuan-pertemuan besar di istana kerajaan yang di kemudian hari juga di kabupaten atau di karesidenan (Kartodirdjo, 1993: 28-29, 32, 38).

Gelar kebangsawanan muncul dalam nama-nama tokoh, yaitu: Raden Hijo, Raden Potronoyo, Raden Nganten Potronoyo, Raden Ajeng Biru, Raden Ajeng Wungu, Raden Mas Wardoyo, Raden Mas Tumenggung, dan Raden Ayu Jarak.

Gelar kebangsawanan, misalnya *raden* atau *raden mas*, bukanlah semata-mata karena jabatan pada pemerintahan, tetapi juga berasaskan asal-usul keturunan. Pemerintah Kolonial memberikan gelar *raden mas* atau *raden* jika asal keturunan penerima anugerah memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, Pemerintah Kolonial hanya memperkenalkan gelar *mas*. Semua priyayi yang memakai gelar *raden mas* atau *raden* selalu memiliki garis keturunan yang bermula pada raja-raja di masa lalu atau sekurang-kurangnya berasal dari nenek moyang yang menjadi bupati

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

dengan gelar *raden tumenggung*, *adipati*, atau *pangeran*. Di kerajaan Jawa, gelar kebangsawanan yang tinggi setelah raja ialah *raden mas* bagi laki-laki dan *raden ajeng* bagi perempuan. Untuk putra raja, baik lelaki maupun perempuan, terdapat tambahan sebutan *bendara*. Setelah menikah, sebutan *bendara raden mas* diganti *pangeran*, sedangkan *raden ajeng* diganti *raden ayu*. Gelar *raden mas* dan *raden ajeng* selanjutnya dipakai oleh cucu, cicit, dan piut raja. Gelar kebangsawanan setelah piut raja dan selanjutnya hanya *raden*. Saat masih kanak-kanak gelar *raden* sering ditambah sebutan *bagus* atau *gus* bagi lelaki dan *lara* atau *rara* bagi perempuan. *Raden lara/rara* setelah menikah menjadi *raden nganten*. Sementara itu, *tumenggung* adalah gelar semua pejabat pemerintahan yang berkedudukan bupati. Selain sebagai kepala daerah, bupati juga pejabat pemerintah yang bertingkat pimpinan tertinggi pada suatu kelompok petugas tertentu di lingkungan istana. Istri bupati yang berstatus permaisuri, dengan tidak mengingat asal keturunannya, bergelar *raden ayu*. Bupati yang bergelar *raden tumenggung* kemudian anak-anaknya bergelar *raden*. Anak keturunan selanjutnya bergelar *raden* dan gelar keturunan ini dapat dikatakan tanpa ada pembatasannya (Kartodirdjo, 1993: 48-51).

Meski Potronoyo telah memiliki gelar *raden* --- yang menunjukkan bahwa mereka memiliki garis keturunan raja atau bernenek-moyang bupati bergelar Raden Tumenggung --- ia tetap dianggap lebih rendah oleh pegawai *Gouvernement*, *regent* (bupati), atau pangeran (putra raja). Adapun penyebabnya karena pekerjaan R. Potronoyo sebagai pedagang dan bukan pegawai pemerintah. R. Potronoyo adalah *wong cilik*.

Pada saat itu, pada masa cerita *SH* dibuat atau masa *Gouvernement*, pedagang/petani dipandang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan pegawai *Gouvernement*, sementara pegawai *Gouvernement* merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan saudagar atau petani. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku, misalnya, dengan tidak mau berkumpul dengan saudara. Bahkan, perilaku yang lebih jauh lagi berupa ketidakmauan untuk mengakui bentuk ikatan persaudaraan karena

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

kelompok yang lainnya lebih rendah dari kelompok pertama. Hijo dikirim ke Belanda untuk menunjukkan bahwa saudagar pun dapat sederajat seperti para pegawai pemerintah itu.

Hierarki masyarakat Jawa dalam *SH* dari hierarki yang terendah ke hierarki tertinggi, yaitu: *wong cilik*, priyayi agung, pegawai *Gouvernement*. Pegawai Pemerintah Kolonial menduduki hierarki yang lebih tinggi dibanding priyayi agung. Pada kajian lebih lanjut di bab berikutnya, hierarki masyarakat tersebut merupakan pandangan dari sudut masyarakat kolonial Belanda. Hal ini sangat dimungkinkan karena kekuasaan Belanda atas Hindia, karena kolonialisme Belanda atas Hindia.

Strata bahasa terlihat dalam inferioritas pedagang manakala berhubungan dengan kelompok priyayi. R. Potronoyo mengatakan bahwa “tidak gampang besanan dengan seorang *regent*” (hlm. 168). Di sini muncul inferioritas, pemikiran bahwa satu kelompok lebih rendah daripada kelompok lain, bahwa kelompok pedagang lebih rendah dari priyayi. Sebuah maksud, karena adanya hubungan superior-inferior, menjadi perlu dipertanyakan apakah dapat terkabul atau tidak.

“Sekarang Raden Ayu, umpama lho, Raden Ayu, yang saya bilangkan ini umpama, jadi bukan sebetulnya,” begitu Raden Nganten berkata.

“Umpamanya Raden Ajeng Wungu berkawin dengan Hijo, dan Biru dengan Raden Mas Wardoyo, apakah Raden Ayu setuju?”

Regent dan istrinya mendengarkan perkataan itu, air mukanya sudah menunjukkan kesenangannya.

“Umpamanya hal itu bisa kejadian, buat saya sendiri memang merasa girang,” menjawab Raden Ayu dan air mukanya kelihatan terang.

“Apakah Raden Ayu dan Raden Mas Tumenggung tidak malu mempunyai putra berkawin dengan anaknya orang hina seperti kita?” tanya R. Nganten buat tertawaan.

...

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

“Dari itu, umpama anak kita kawin dengan anak Tuan, apakah jeleknya? Asal yang menjalani suka.” Begitu *regent* berkata dengan panjang lebar kepada Raden Ngante.

Perkataan *regent* itu suatu tanda bahwa maksud R. Potronoyo dan istrinya akan bisa sampai, itu waktu R. Nganten terpaksa menggigit bibirnya yang bawah buat tanda kesenangan hatinya.

“Saya kira mereka itu tentu senang kalau bisa kejadian seperti maksud ibunya Hijo,” kata R. Potronoyo kepada *regent* dan Raden Ayu.

“Saya kira juga begitu” menjawab *regent*.

(hlm. 171-172)

Untuk memulai pembicaraan tentang rencana perkawinan, lebih tepat penjaduan, digunakan pembuka “umpamanya” atau seandainya, sesuatu yang dianggap boleh terjadi boleh tidak. Setidak-tidaknya, ada dua makna dari penggunaan kata “umpama”. Pertama, sebagai basa-basi dalam pergaulan. Kedua, karena adanya hierarki superioritas. Apabila hierarki superioritas itu hendak dilanggar, diperhalus dengan kata yang bersifat netral, yang bermakna dapat/boleh terjadi dan tidak dapat/tidak boleh terjadi.

Dengan kata “umpama”, hierarki superior-inferior seolah-olah menjadi netral atau hilang. Jawaban dari pihak superior, *regent*, pun menggunakan “umpama” sebagai bentuk basa-basi yang juga sekaligus pengukuh bahwa superioritas priyayi memang ada. Hierarki superior-inferior juga berusaha dinetralkan dengan model pertanyaan “apakah tidak malu”. Bentuk pertanyaan menjadi penting karena kalimat pertanyaan lebih menghargai dan menghormati lawan bicara daripada kalimat pernyataan, apalagi kalimat perintah. Selain dengan model kalimat tanya, hierarki bahasa juga terlihat dengan istilah “buat tertawaan” sebagai penekan penggunaan “umpama” itu. “Buat tertawaan” (bergurau) menandakan bahwa maksud itu dapat ditanggapi

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

secara serius maupun secara main-main. Hal ini dimaksudkan apabila hal yang diinginkan tidak terjadi, tidak membuat malu kedua belah pihak.

Ada tiga cara menetralkan hierarki superior-inferior itu. Pertama, dengan penggunaan kata "umpama", kata yang bermakna pengandaian. Kedua, penggunaan kalimat tanya. Ketiga, model bergurau, yaitu sesuatu itu tidak dianggap serius atau tidak terlalu serius.

Selain hierarki bahasa kutipan di atas bercerita upaya penjadohan Hijo dengan Wungu dan Wardoyo dengan Biru oleh orang tua. Menurut Kartodirdjo (1993: 186-187), perihal jodoh bukan sekedar kepentingan pria dan wanita, tetapi lebih merupakan urusan orang tua. Dengan demikian, pencarian jodoh atau penjadohan terutama untuk wanita diusahakan oleh orang tua. Prinsip *bibit*, *bebet*, dan *bobot* yang bermakna keturunan fisik, kehartaan, dan status menjadi kriteria pokok yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status.

Setelah berkenalan di Baratadem, antara keluarga Hijo dan keluarga Raden Ajeng Wungu saling berkunjung. Keluarga Hijo berkunjung ke Kabupaten Jarak (hlm. 75). Keluarga Raden Ayu Wungu pun berkunjung ke Solo karena ingin melihat kongres Sarekat Islam (hlm. 152, 175).

Menurut Kartodirdjo (1993: 108) priyayi yang tinggal di kota kecil berjumlah sangat terbatas. Suasana kekeluargaan, salah satunya, berwujud pada keinginan saling berkunjung di waktu senggang. Model saling mengunjungi untuk mengekalkan persaudaraan itu dilakukan oleh keluarga Hijo dan keluarga Wungu.

Dari paparan tersebut di atas, formasi feodalisme dalam *SH* berkonstruksi, baik disengaja maupun tidak, tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, yaitu keluarga Hijo dan keluarga Wungu, atau, lebih lengkap lagi, yaitu: Raden Hijo, Raden Potronoyo, Raden Nganten Potronoyo, Raden Ajeng Biru, Raden Ajeng Wungu, Raden Mas Wardoyo, *Regent* Jarak (Raden Mas Tumenggung), dan Raden Ayu *Regent*. Melihat dari

inferioritasnya terhadap *Regent* Jarak sebagai pegawai *Gouvernement*; Raden Hijo, Raden Potronoyo, Raden Nganten Potronoyo dapat dikategorikan sebagai priyayi kecil

B. Kolonialisme dan Kapitalisme

Di dalam *SH* disebut istilah *Gouvernement* (hlm. 3). *Gouvernement* adalah daerah yang langsung masuk dalam lingkungan admistrasi pemerintahan kolonial (Kartodirdjo, 1993: 108). Pertanyaan selanjutnya, siapakah pemerintahan kolonial? Ketika Walter bertemu dengan *Sergeant* Djepris, Walter memberikan brosur yang berjudul *Bangsa Belanda di Hindia*. Dalam brosur tersebut disebutkan bahwa Hindia merupakan koloni Belanda (hlm. 186).

Hindia (baca: Hindia Belanda atau Indonesia sekarang ini) merupakan koloni Nederland atau Belanda. Hindia di bawah kekuasaan Belanda. Hindia diperintah oleh Belanda. Kata “di” bermakna menunjukkan suatu tempat, menempati, berada, atau menduduki. Judul brosur “Bangsa Belanda di Hindia” mengindikasikan ideologi kolonialisme. Hal ini dipertegas dengan kalimat “Nederland memiliki *kolonie*, yaitu Hindia namanya”.

Kata yang sejajar dengan kolonialisme adalah imperialisme. Imperialisme adalah ideologi yang hendak memperluas batas-batas suatu negara. Kaum imperialis merupakan orang-orang yang menomorsatukan kerajaan (*empire*) atas dasar politik atau militer. Menurut Lenin (Riff, 2001: 95-96) daya gerak imperialisme ialah eksploitasi ekonomi. Imperialisme didorong motif kekuasaan dan kehendak untuk memaksakan keinginan dan kultur suatu negara atas rakyat yang ditaklukkannya, sementara kolonialisme sambil disertai pemukiman. Menurut Lenin (Sargent, 1987: 14), eksploitasi kolonial memberi kapitalis bahan baku murah, tenaga murah, serta pasar untuk barang jadi dan modal yang berlebihan.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Apa yang disampaikan Lenin benar adanya karena bangsa Bumiputra, yang mengacu kepada sebutan untuk Hindia, bukan saja diinjak, diperas, tetapi juga diambil kekuatan dan uangnya oleh Belanda.

Bukankah Belanda itu juga manusia seperti Bumiputera? Marilah kita periksa dari zaman kumpeni. Pada waktu itu bangsa Bumiputera diinjak, diperas dan diambil kekuatan dan uangnya.

(hlm. 189)

Kolonialisme, karena menomorsatukan kerajaan atau negara menjadikan pelaku pendukungnya berkehendak untuk berkuasa serta memaksakan segala keinginan dan kultur terhadap rakyat yang ditaklukkannya. Apalagi, pada kolonialisme disertai adanya pemukiman oleh sang penjajah. Elemen kesadaran kolonialisme adalah kehendak untuk berkuasa atas bangsa lain, dengan segala cara dan atributnya, termasuk apabila harus memaksakan kehendaknya dengan politik dan militer. Elemen kebebasan kolonialisme adalah bagaimana agar kekuasaan terus berlangsung selamanya.

Kolonialisme bekerja bukan hanya dengan cara hegemoni, tetapi juga dengan cara dominasi atau kekerasan. Cara hegemoni ditunjukkan dengan “sengaja membikin bodoh” rakyat Hindia (hlm. 181). Di sisi lain, saat Sarekat Islam mengadakan kongres di Solo, para *soldadu* menjaganya agar tidak terjadi perusuhan (hlm. 161). Meskipun tidak merangkan siapa yang melakukan perusuhan, hal tersebut dapat diartikan perusuhan yang dilakukan oleh bumiputra. Para *soldadu* “sudah bersiap menjaga”. Hal ini disebut cara-cara dominasi.

Yang membuat Belanda menjadi kaya justru kelompok *subaltern*, yaitu masyarakat Hindia. Meskipun yang membuat kaya raya bangsa Belanda adalah masyarakat Hindia, Belanda tidak mau mengerti bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat Hindia. Dengan kata lain,

tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah Belanda kepada masyarakat Hindia.

“Orang Jawa bodoh,” kata Tuan. “Sudah tentu saja, memang pemerintah sengaja membikin bodoh kepadanya. Mengapakah *Regeering* tidak mengadakan sekolah secukupnya untuk orang Jawa *of* orang Hindia, sedang semua orang mengerti bahwa tanah Hindia itu yang membikin kaya tanah kita Nederland?”

(hlm. 181)

Dalam *Student Hijo* kelompok pemegang kekuasaan atau kelompok dominan dipegang oleh Belanda. Belanda yang menjalankan pemerintahan. Sementara kelompok *subaltern*, masyarakat yang diperintah, atau masyarakat yang dikuasai oleh Belanda adalah masyarakat Hindia. Elemen solidaritas-identitas kolonialisme berwujud identitas bangsa Belanda.

Dengan model teori Gramsci, pengelompokan para tokoh dapat dibedakan atas dua kelompok. Pertama, tokoh-tokoh dominan, yaitu tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok pemegang kekuasaan. Kedua, tokoh-tokoh *subaltern*, yaitu tokoh-tokoh di luar kelompok pemegang kekuasaan.

Terdapat dua kelompok tokoh. Pertama, tokoh-tokoh dominan, yaitu tokoh-tokoh dengan elemen solidaritas-identitas Belanda. Kedua, tokoh-tokoh subdominan atau *subaltern*, yaitu tokoh-tokoh dengan elemen solidaritas-identitas Hindia/Jawa atau bumiputra. Tokoh-tokoh dominan, meliputi Willem Walter, Jepris, Jet Roos, Boeren, Karel (guru HBS), Betje, Marie, Piet (saudara Karel) dan Nyonya, Anna, dan Jetje. Tokoh-tokoh *subaltern*, meliputi Raden Hijo, Raden Nganten Potronoyo, Raden Potronoyo, Raden Mas Wardoyo, Prayogo, Raden Ajeng Biru, Raden Ajeng Wungu, *Regent* Jarak (Raden Mas Tumenggung), dan Raden Ayu *Regent*.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Kolonialisme bukan hanya kehendak untuk memaksakan keinginan dan kultur. Yang jauh lebih penting adalah adanya bahan baku murah, tenaga murah, serta pasar yang pada ujungnya berkaitan dengan kekayaan dan uang. Atau dengan istilah “diambil kekuasaan dan uangnya”(hlm. 189). Uang ditandaskan lagi dengan sebutan “hanya mencari uang”. Telah disebut Lenin bahwa daya gerak imperialisme adalah eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, imperialisme/kolonialisme merupakan perpanjangan tangan dari ideologi kapitalisme. Kapitalisme berupaya mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

Karena pada zaman kumpeni (sekarang juga), hampir sekalian orang yang pergi ke Hindia hanya bermaksud mencari uang, tambahan lagi ia tak kenal penduduk negerinya, maka ia (menurut pandangan kita) lalu semau-mau untuk kita.

(hlm. 188)

Kapitalisme bercirikan tiga hal. Pertama, kepemilikan kekayaan oleh pribadi. Kedua, tidak ada pembatasan dalam mengumpulkan kekayaan. Ketiga, pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian, karenanya berlaku sistem pasar bebas. Kapitalisme tradisional (kapitalisme *laissez-faire*) berpendapat bahwa seluruh struktur kebebasan dibangun di atas kekayaan pribadi. Hal ini akan hancur jika harta kekayaan individu dibatasi, atau bila sistem pasar bebas dicampuri oleh pemerintah. Kapitalisme modern, yaitu setelah tahun 1930-an, ditandai oleh empat hal. Pertama, sebagian besar kekayaan dimiliki oleh pribadi. Kedua, sedikit sekali batasan terhadap pengumpulan harta kekayaan. Ketiga, pengaturan perekonomian oleh pemerintah. Keempat, adanya bantuan dan pensiun yang dibiayai pemerintah. Dalam kapitalisme modern, peran pemerintah dimungkinkan secara luas di bidang ekonomi sepanjang dipandang perlu untuk menjamin persaingan dilaksanakan dengan sehat dan demi memungkinkan yang kalah dalam persaingan

tidak kelaparan. Kapitalisme sangat menghargai kebebasan individu. Keberhasilan dan kegagalan individu bergantung kepada kemauan dan kemampuannya bekerja keras serta keinginan konsumen yang dimanipulasi melalui iklan untuk membeli produk. Persamaan kesempatan memberikan hak kepada individu menjadi kapitalis dan mempunyai potensi mendapatkan kekayaan (Sargent, 1987: 29-55).

Kapitalisme hanya mungkin hidup dalam sistem yang menghargai kebebasan dan persamaan. Karenanya, kapitalisme hanya tumbuh dalam iklim liberalisme dan demokrasi. Dua hal substansial yang saling berpasangan dalam kapitalisme ialah kekayaan dan kebebasan individu. Elemen kesadaran kapitalisme adalah kekayaan merupakan segala-galanya, kekayaan merupakan daya penggerak di semua kehidupan manusia. Elemen kebebasan adalah kepemilikan kekayaan oleh individu. Hal ini dimungkinkan karena kebebasan individu bersaing, berusaha, bekerja mengumpulkan dan memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan pemerintah. Apabila pengertian identitas berupa negara, elemen solidaritas-identitas dalam kapitalisme tidaklah menonjol. Solidaritas-identitas dipertahankan dan diikat pandangan bahwa kekayaan merupakan hal utama yang melampaui batas-batas bangsa atau negara. Dalam kapitalisme elemen solidaritas-identitas tidak berwujud identitas bangsa.

Elemen material kapitalisme terungkap melalui beberapa hal. Pertama, Hindia sebagai koloni Belanda. Kedua, kepemilikan kekayaan oleh individu, termasuk kemampuan R. Potronoyo untuk menyekolahkan Hijo ke Nederland. Ketiga, pemberian uang oleh Hijo pada saat meninggalkan Betje.

Pemilikan kekayaan oleh individu yang merupakan elemen kebebasan, salah satu misalnya, diceritakan di halaman 183. Karena adanya kebebasan, seorang serdadu beridentitas Belanda berusaha dan bekerja. Ia karena “dari rajinnya”, kemudian “menjadi amat kaya” (hlm. 183).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Kekayaan tidak dimiliki orang Belanda saja, tetapi dimiliki siapa saja. Setiap individu diperbolehkan memiliki kekayaan apa saja, termasuk harta benda. Raden Ajeng Biru memiliki subang berharga f 2.000,00 dan kain Solo berharga f 40,00. Kilauan sinar yang terpancar dari berlian milik para bangsawan dan saudagar laksana sinar matahari. Kutipan berikut ini masih menggambarkan kepemilikan barang-barang berharga yang meliputi: baju sutera, subang, dan kain Solo. Subang tidak hadir sebagai subeng, tetapi mencerminkan kepemilikan kekayaan, harta, yang setara dengan kepemilikan uang. Pemilikan kekayaan tersebut adalah Raden Ayu Biru dan Raden Ayu Wungu sebagai individu (hlm. 48). Penyebutan jumlah uang, f 2000,00 sebagai sebuah nilai, misalnya, merupakan cerminan kapitalisme.

Di halaman 91 digambarkan kepemilikan kekayaan Wungu dan Biru yang berupa berlian dan zamrud. Di halaman 194, R. Potronoyo, R. Nganten dan Biru membeli kalung zamrud, dan *horloge* emas di toko Mas Inten di kota Semarang sebagai tanda kecintaan kepada Wardoyo dan Wungu. Gambaran ini mengindikasikan dua hal. Pertama, kepemilikan kekayaan. Kedua, toko sebagai penanda pasar.

Keinginan R. Potronoyo sebagaimana di awal cerita *SH* hanya tetap menjadi keinginan jika R. Potronoyo tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Dalam sistem kapitalisme uang menjadi kekuatan luar biasa, termasuk meraih pendidikan dan pengetahuan. Hijo bersekolah ke Belanda bukan hanya karena pikirannya tajam dan maju, tetapi karena R. Potronoyo mampu membiayai kehidupan Hijo per bulan sedikitnya f 100,00. Uang menjadi tolok ukur ketika seseorang memiliki keinginan dan hal ini mengindikasikan ideologi kapitalisme.

Pencarian jodoh atau penjemputan, sebagaimana telah disinggung di depan, memperhatikan prinsip *bibit*, *bebet*, dan *bobot* yang bermakna keturunan fisik, kekayaan, dan status yang menjadi kriteria pokok. *Bebet* berarti memperhatikan kekayaan (Kartodirdjo, 1993: 186) yang

diperlakukan untuk mempertahankan status, apalagi jika dapat meningkatkan status. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip kapitalisme yang sangat menghargai kekayaan.

Apakah Kanda mufakat kalau Raden Ajeng dan Raden Mas itu saya minta, yaitu Wungu kita kawinkan dengan Hijo, dan Biru dengan Wardoyo.

...

“Tidak, Kanda, asal kanda sudah mufakat hal itu, nanti saya sendiri yang mesti berikhtiar. Tetapi Kanda jangan takut kehilangan uang, sebab kalau maksud saya itu bisa kesampaian, tentu tidak mahal bila kita beli dengan uang sepuluh ribu rupiah.” Begitu Raden Nganten berkata.

“Memang,” menjawab R. Potronoyo menunjukkan setujunya.

“Kita tentu tidak rugi membuang uang f 10.000,00, asal itu maksud kita bisa sampai.”

(hlm. 167-168)

Tidak akan rugi kehilangan uang sebesar f 10.000,00 apabila keinginan yang dikehendaki tercapai. Pasangan R. Potronoyo dan R. Nganten tidak takut “kehilangan uang”. Sebuah keinginan diukur dengan kemampuan uang, dibeli atau dijual, untung atau rugi. Hal-hal tersebut mencerminkan cara berpikir yang telah berpatokan uang.

Kapitalisme dapat dilihat dalam gambaran pasar sebagai sebuah tempat transaksi jual beli. Pasar dalam *SH* berwujud pasar malam yang dilaksanakan di Sri Wedari. Di dalam pasar malam terdapat, misalnya, wayang orang, bioskop, dan restoran (hlm. 15-16).

Berkait dengan kekayaan, seseorang menjadi “dihormat betul” oleh orang lain. Orang Jawa yang datang ke Belanda dihargai karena uangnya. Kekayaan melampaui batas-batas bangsa. Kekayaan adalah segala-galanya merupakan elemen kesadaran. “Dihormat betul” dioposisikan dengan “dihina”. Bangsa Jawa, direpresentasikan Hijo, yang

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

di tanahnya dihina bangsa Belanda justru dihormati karena banyak uang. Kata “kebanyakan” dalam kalimat itu mencerminkan bahwa hal tersebut telah menjadi pandangan umum atau tolok ukur yang lazim dipakai.

Sesudahnya Hijo dan *Leeraar*-nya turun dari kapal, terus ke hotel, kedatangannya di situ Hijo dihormat betul oleh sekian budak hotel, sebab mereka memikirkannya, kalau ada orang yang baru datang dari tanah Hindia, mesti banyak uang, lebih-lebih kalau orang Jawa, Dari itu, Hijo tertawa di dalam hati melihat keadaan serupa itu, karena dia ingat nasib bangsanya yang ada di tanahnya sama dihina oleh bangsa Belanda kebanyakan.

(hlm. 58-59)

Dengan uang, Hijo meninggalkan Betje meski keduanya pernah tidur bersama, padahal Hijo berangkat dari tradisi timur yang permisif.

Dengan kehendaknya sendiri, Hijo memberikan sebuah buku post *spaarbank* yang ada simpanannya uang *f 1000,00* dan di dalam buku itu memakai namanya.

“Ini buku kamu simpan, dan uangnya pun boleh kamu ambil kalau ada keperluan,” kata Hijo kepada Betje yang baru menerima buku.

(hlm. 211)

Apa yang telah dilakukan Hijo terhadap Betje, perihal meniduri, perihal hubungan seksual (hlm. 122), hanya dianggap sebagai sebuah transaksi ekonomi seperti halnya semacam jual beli. Persoalan dianggap selesai karena Hijo memberikan uang atau “membayarnya” dengan uang. Disadari atau tidak, uang menjadi segala-galanya dan mengendalikan kehidupan manusia. Hal itu merupakan elemen kesadaran kapitalisme.

Berdasarkan paparan di atas, kolonialisme merupakan perpanjangan tangan dari kapitalisme. Oleh karena itu, semua tokoh yang terdapat dalam *SH* adalah pendukung kapitalisme.

Saat Hijo meninggalkan Betje dalam istilah “dengan kehendaknya sendiri” (hlm. 211) tercermin ideologi lain yang berkait erat dengan kapitalisme.

C. Liberalisme dan Rasialisme

Kapitalisme tidak dapat dipisahkan dengan tradisi liberalisme dan demokrasi. Kapitalisme jalin-menjalin dengan demokrasi dan liberalisme.

Liberalisme bercirikan lima hal. Pertama, cenderung mendukung perubahan. Kedua, percaya kepada nalar manusia. Ketiga, menerima campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kondisi manusia. Keempat, mendukung kemerdekaan individu, tetapi tidak merasa pasti mengenai kemerdekaan ekonomi. Kelima, ambivalen terhadap hakikat manusia. Perihal ambivalen, kaum liberalis menyatakan bahwa kebanyakan permasalahan timbul karena kekuatan sosial dan ekonomis yang berpengaruh terhadap manusia. Nalar manusia mampu memecahkannya, tetapi bukan sebagai manusia yang tidak dibantu. Yang utama, tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Liberalisme berkait erat dengan kebebasan individu dan titik berat kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal (Sargent, 1987: 62-63).

Elemen kesadaran liberalisme adalah kebebasan individu. Kebebasan individu dapat diperhatikan ketika Hijo di Nederland yang menampakkan bahwa kebudayaan Eropa menghargai kemerdekaan dan kebebasan individu (hlm. 66).

Liberalisme berwujud kebebasan individu menyaksikan pertunjukan tarian telanjang (hlm. 118-119). Tarian telanjang menggambarkan adanya liberalisme. Bagi masyarakat Belanda pertunjukan tersebut disebut bagus, bahkan sampai diulang tiga kali dengan ungkapan “terlalu bagus”, “menambahi kebagusan”, dan “bagus sekali”. Dari budaya berbeda, Hijo justru “berdebar-debar hatinya”

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

karena tiga hal. Pertama, belum pernah melihat pertunjukan tarian telanjang. Kedua, terlalu senang. Ketiga, faktor ketakutan.

Bukan hanya tarian telanjang dan menontonnya, kebebasan individu juga bermakna kebebasan melakukan hubungan seksual --- selama dikehendaki kedua belah pihak --- tanpa harus diikat perkawinan sebagaimana tradisi Timur. Kebebasan melakukan hubungan seksual ditunjukkan Betje dan Hijo di sebuah hotel.

“Marilah kita pergi di hotel Scheveningen,” kata Betje kepada Hijo dan hatinya berdebar-debaran. “Nanti kamu minta saja sewa satu kamar buat orang dua.”

“Baik,” menjawab Hijo dengan kebingungan tetapi hati tetap.

“Apakah saya bisa dapat kamar di sini buat dua orang?” tanya Hijo kepada tukang hotel, sesudahnya dia orang masuk di hotel.

“Bisa, Tuan,” menjawab tukang hotel, dan Hijo ditunjukkan kamarnya.

Itu saat juga Hijo dan Betje terus masuk di dalam kamar yang sudah disediakan. Apakah yang telah kejadian di sini, itulah Tuan pembaca bisa pikir sendiri.

(hlm. 122)

Tidak disebutkan secara tersurat adanya hubungan seksual antara Betje dengan Hijo. Dengan kalimat “Apakah yang telah kejadian di sini, itulah Tuan pembaca bisa pikir sendiri” dapat dimaknai apa yang akan terjadi dalam kamar antara lelaki dewasa dengan perempuan dewasa yang secara fisik telah berkembang organ-organ seksualnya.

Kebebasan yang sama tampak dari perilaku Roos yang hamil tiga bulan karena berhubungan dengan Willem Walter meskipun keduanya belum menikah (hlm. 176). Budaya liberal juga hadir ketika Roos, karena ditinggal Walter, menggugurkan kandungannya (hlm. 176). Segala

tanggung jawab bukan berada di tangan pemerintah, tetapi di pundak individu

Meski tidak menggunakan istilah menggugurkan kandungan dan hanya menggunakan tanda titik-titik, dengan istilah “akhirnya kandungan hilang” dapat diperkirakan bahwa pengguguran kandungan telah dilakukan dan hal itu menjadi tanggung jawab Roos sebagai individu. Pengguguran kandungan tidak dilihat sebagai sebuah perilaku pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis, tetapi disebut sebagai “dari cerdiknya seorang dokter”. Dengan kata “cerdik” justru terdapat makna penghargaan terhadap peristiwa tersebut yang mengindikasikan adanya kebebasan dalam liberalisme.

Liberalisme berkaitan dengan kapitalisme. Namun, tidak semua tokoh menampilkan perilaku liberal. Sebagaimana telah ditunjukkan di depan, liberalisme hanya disampaikan oleh Hijo, Betje, Willem Walter, dan Roos.

Meski dalam jalinan ideologi kolonialisme, kapitalisme, dan liberalisme, pada kenyataannya Belanda menerapkan ideologi rasialisme yang sebenarnya bertentangan dengan ideologi liberalisme. Istilah “Bumiputra diinjak, diperas, dan diambil kekuatan dan uangnya” sebagaimana di halaman 189, menggambarkan bagaimana keadaan yang dialami oleh bumiputra. Karena melakukan kesalahan, di halaman 178 dan 179, dilukiskan seorang jongos Jawa dimaki-maki Jepris. Djepris, lelaki berbangsa Belanda, mewakili superioritas kolonial yang merasa lebih tinggi dibandingkan orang Jawa. Jawa harus diajak berbicara dengan cara kasar. Jika tidak diperlakukan demikian, orang Jawa justru kurang ajar, sebuah tindakan yang melampaui batas-batas kesopanan dan kesusilaan. Orang Jawa atau Hindia dikatakan kotor, bodoh, malas, busuk oleh Djepris.

Sergeant Djepris naik darahnya apabila dia mendengar perkataannya Walter itu, dia berkata:

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

”Orang Jawa kotor, orang Jawa bodoh, orang Jawa malas, orang Jawa tidak *beeschaafd*. Pendeknya, orang Jawa atau orang Hindia itu suatu bangsa busuk sendiri.”

(hlm. 180-181)

Disebut Jepris bahwa bangsa Jawa atau orang Hindia (Indonesia) adalah bangsa yang busuk. Hal ini mengindikasikan bahwa Jepris, sebagai representasi bangsa Belanda, bukanlah bangsa yang busuk. Bangsa Belanda adalah yang mulia. Elemen material bahwa bangsa Belanda adalah bangsa mulia sekaligus merupakan elemen kesadaran yang dimilikinya. Djepri menyebut bahwa bangsa Hindia (Jawa) tidak dapat dipercaya. Jawa identik dengan babu, jongos, koki yang senang mencuri barang. Babu, jongos, koki merupakan status pekerjaan yang rendah karena di bawah kekuasaan sang majikan. Sang majikan adalah Belanda.

“Tetapi tuan juga mengerti, kebanyakan orang Jawa itu tidak boleh dipercaya?” tanya *Sergeant* Djepri kepada controleur.

“Seperti: babu, jongos, koki, dan lain-lain, mereka itulah sering suka mencuri barang majikannya. Jadi pendeknya, orang Jawa kebanyakan itu tidak boleh dipercaya.”

(hlm. 182)

Djepri mewakili sosok kolonial yang penuh rasa superior memandang bangsa lain sebagai jongos. Bangsa lain adalah Jawa yang merepresentasikan bangsa Hindia. Di dalam kolonialisme, Belanda menerapkan rasialisme.

Rasialisme merupakan keyakinan dalam mempertahankan keberadaan hubungan tak tetap antara karakteristik fisik dan personalitas. Biasanya, penonjolan satu kelompok yang berkaitan dengan asal-usul/keturunan bersama atas satu atau beberapa kelompok lainnya yang dianggap ilmiah. Di Perancis, misalnya, menurut Gibbinneau ada tiga ras utama di dunia, yaitu: kulit putih, kulit kuning, dan kulit hitam. Kaum bangsawan mewakili ras kulit putih yang berpihak pada nilai-nilai sejati

Perancis, yaitu: cinta kebebasan, kehormatan, dan spiritual. Kelompok borjuis mewakili ras kulit kuning yang dipandang bodoh, materialistik, dan tertarik kepada perdagangan. Ras kulit hitam adalah kelompok kebanyakan, kelas lebih rendah. Jika tidak mendukung kelompok borjuis, ras kulit hitam tidak mampu melakukan perbuatan yang dianggapnya baik (Riff, 2001: 203). Dengan istilah agak berbeda, rasialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hak berada pada sang kuat. Hal ini bersifat alamiah yang pada akhirnya diterima oleh ras yang didominasi. Efek rasialisme, yaitu stratifikasi sosial berdasarkan kemurnian ras, keanggotaan dalam partai, serta dukungan positif terhadap rezim yang berkuasa. Rasialisme menentukan pengendalian perkawinan, pikiran anak-anak, dan sistem keluarga (Sargent, 1987: 161-162).

Apa yang diharapkan dari diberlakukannya rasialisme adalah dukungannya kepada rejim yang berkuasa. Hal mendasar dalam rasialisme adalah superioritas satu ras atau kelompok atas ras atau kelompok lainnya. Dalam satu sisi, terdapat ras/kelompok superior, di sisi lainnya terdapat ras inferior. Rasialisme dapat didasari nasionalisme, tetapi dapat juga rasialisme justru menumbuhkan nasionalisme di kelompok lain. Perbedaan antara rasialisme dan nasionalisme pada sifat dasarnya. Rasialisme berangkat dari keturunan (darah), sementara nasionalisme berangkat dari sifat geografis/lokatif (tanah). Rasialisme berbeda dengan feodalisme. Feodalisme berangkat dari keturunan raja (kerajaan), sementara rasialisme berangkat dari keunggulan ras.

Rasialisme berwujud superioritas-inferioritas, bahwa kelompok yang satu lebih unggul daripada kelompok lainnya. Superioritas berada di kelompok Belanda (kolonial) dan demi mudahnya disebut superioritas kolonial, bahwa bangsa Belanda menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan bumiputra. Ras inferior berada di pihak bumiputra. Elemen solidaritas-identitas rasialisme berwujud ras/bangsa Belanda sebagai superior dan ras/bangsa Jawa /Hindia sebagai inferior.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Selain Jepri, elemen material rasialisme muncul dalam perilaku Anna, serta tersirat melalui percakapan antara Walter dengan *Regent* Jarak. Pada saat Hijo menuju ke Belanda, di kapal ia bertemu dengan orang-orang Belanda. Superioritas kolonial berpandangan bahwa Jawa bermakna bodoh. Bahwa “Jawa dan bodoh” adalah sesuatu yang tidak berbeda dan identik. Jawa identik dengan kebodohan sehingga Jawa patut dijadikan bahan gurauan dan cemoohan (hlm. 39-40). Meskipun perbincangan tersebut merupakan bahan tertawaan, hal itu menunjukkan bahwa hal yang diperbincangkan telah menjadi kepercayaan umum. Meskipun sang Jawa telah lulus HBS dan berniat menjadi mahasiswa, ia tetaplah bodoh. Jawa yang bodoh menjadi sesuatu yang mengendap jauh di dalam kesadaran seseorang maupun masyarakat kelompok superior. Bahkan, Hijo, representasi orang Hindia, disebut sebagai “tidak tahu adat”.

Hijo disebut tidak lelaki dan tidak perempuan (hlm. 57), manusia yang tidak berjenis kelamin. Manusia tanpa jenis kelamin merupakan manusia tanpa identitas, tanpa ketetapan. Oleh karena itu, status Hijo lebih rendah daripada manusia lain yang beridentitas lelaki atau perempuan.

Superioritas kolonial beranggapan bahwa wanita Belanda lebih cantik, lebih manis dibandingkan dengan wanita Jawa. Hijo pasti akan melupakan wanita Jawa dengan mendapatkan pengganti wanita Belanda. Jawa tidak akan diingat lagi, hilang begitu saja meskipun di antara mereka, Hijo dan tunangannya, telah ada pengikat awal yang dinamakan pertunangan. Pengikat tradisi yang disebut pertunangan akan dilupakan karena kecantikan wanita Belanda (hlm. 29-30). Yang menyebut bahwa perempuan di negeri Belanda lebih manis adalah subjek tak bernama, yang disebut nona. Hal itu mengindikasikan bahwa nona merupakan gambaran umum dari masyarakat Belanda.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Elemen kebebasan rasialisme berwujud kehendak melanggengkan hubungan tuan dan budak. Belanda adalah tuan, sementara bumiputra hanyalah budak. Hal ini dapat terlihat pada saat perbincangan asosiasi antara RM Tumenggung dengan Walter.

“Sekarang ini memang zaman pergerakan,” berkata *regent* sesudahnya dia dan *controleur* membicarakan perkara-perkara yang berhubungan dengan pekerjaan dua orang *ambtenaar Gouvernement* Belanda itu.

“Bagaimana pikiran Tuan *Regent* perkara *associatie* (percampuran bangsa asing), baik perkara pekerjaan, maupun perkara berlaki istri?” bertanya *controleur* kepada *regent*.

“Ah, perkara itu, Tuan,” menjawab *regent* dengan merdeka, “Itulah hanya tergantung orang yang menjalani itu *associatie*. Kalau buat saya, itu perkara cocok sekali, karena sesungguhnya manusia tidak ada bedanya, baik bangsa Bumiputera atau bangsa Belanda, dan lain.”

“Memang betul begitu,” kata *controleur* dengan pendek.

“Tetapi, Tuan,” begitu R.M. Tumenggung melanjutkan perkataannya, “Bercampuran bangsa itu bisa jadi baik, kalau bangsa satu dan lainnya sama derajatnya, sama kekuatannya, sama kepercayaannya, dan lain-lain. Kalau tidak begitu, saya kira susah sekali bisanya jadi baik itu perkara *associatie* (persaudaraan). Lebih-lebih buat kita orang Bumiputera, itulah susah sekali bisa melakukan *associatie* dengan bangsa Eropa, karena kebanyakan bangsa Eropa memandang kita seperti budaknya.

Kalau menurut pikiran saya, itu *associatie* suatu ikhtiar supaya kita Bumiputera selamanya tinggal senang jadi budak, sebab orang yang memerintah suka mengaku saudara kepada kita orang. Barangkali lebih terang kalau saya sebut: *associatie*-nya “majikan dan budaknya.”

“Boleh jadi perkataan Tuan *Regent* itu tidak salah,” berkata *controleur*.

(hlm. 134-135)

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia: *Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial*

Asosiasi hanyalah menguntungkan sang majikan, sang kolonial dan “bumiputera selamanya tinggal senang jadi budak”. *Associatie* “bisa jadi baik” jika didasari atas persamaan derajat antara bumiputra dan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, orang Eropa justru memandang bumiputra sebagai budak. Hal itu berarti, *associatie* melanggengkan kekuasaan kolonial. *Associatie* hanya melanggengkan kekuasaan Belanda atas Hindia..

Pasangan superior-inferior ini dapat dirinci sebagai berikut. Belanda memiliki segala sifat kebaikan, yaitu: tuan, pintar, lelaki, bersih, rajin, mulia, dan teladan. Jawa memiliki segala sifat keburukan yang beroposisi dengan sang superior, yaitu: jongos, bodoh, banci, kotor, malas, busuk, dan tidak dapat dipercaya.

Rasialisme berkaitan dengan kolonialisme Belanda atas Hindia. Meskipun demikian, tokoh-tokoh dengan solidaritas-identitas Belanda tidak identik dengan rasialisme karena perilaku rasialis tidak muncul dalam semua tokoh. Rasialisme muncul dalam dari tokoh Jepris dan Anna.

Dalam pandangan rasialisme superioritas kolonial, hierarki masyarakat Hindia dalam *SH* dari yang terendah ke hierarki tertinggi, yaitu: *wong cilik*, priyayi agung, pegawai *Gouvernement*, bangsa Belanda. Bangsa Belanda menduduki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai *Gouvernement* karena Belanda merasa dirinya adalah sang tuan. Hierarki masyarakat tersebut merupakan pandangan dari sudut masyarakat kolonial Belanda. Hal ini sangat dimungkinkan karena kekuasaan Belanda atas Hindia karena kolonialisme Belanda atas Hindia.

D. Humanisme dan Nasionalisme

Tuturan RM Tumenggung di halaman 135 tersebut mengandung sesuatu yang dalam tentang manusia, bahwa “manusia tidak ada bedanya”. Hal yang sama juga disampaikan R. Potronoyo sebagaimana

dikutip di halaman 3, bahwa “manusia itu sama saja”. Di halaman 189 pada saat Walter menyerahkan sebuah brosur, disampaikan bahwa “Belanda itu juga manusia seperti Bumiputera”.

Apa yang diungkapkan RM Tumenggung dan R. Potronoyo mencerminkan ideologi yang menjunjung nilai dan martabat manusia, yaitu demokrasi dan humanisme.

Humanisme menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran segala hal. Tujuan pokok humanisme adalah keselamatan dan kesempurnaan manusia. Meskipun demikian, humanisme bukanlah sesuatu yang tunggal. Dalam penafsiran Yunani Klasik, manusia dipahami dari keistimewaan akalnya. Keutamaan dan kebanggaan manusia berada pada akalnya. Pada abad pertengahan, humanisme disuasanai religiusitas. Oleh karenanya, humanisme abad pertengahan bercorak teosentris. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Citra manusia telah ditentukan Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus taat dan tunduk dengan perintah Tuhan. Dalam filsafat modern, humanisme menekankan kembali peranan manusia dan kemanusiaannya dalam dunia dan alam semesta. Manusia menjadi pusat pemikiran, pengamatan, kebebasan, tindakan, kehendak, dan perasaan. Pada abad enam belas sampai dengan tujuh belas, humanisme berkisar pada rasio dengan tekanan kepada pengalaman (empirisme). Sejalan dengan perkembangan pemikiran zaman modern, dikenal beberapa bentuk humanisme, yaitu: humanisme renaissans, humanisme rasional, humanisme naturalis (evolusi). Humanisme rasional menempatkan manusia dengan akal budi sebagai pusat pengetahuan semesta. Humanisme naturalis menekankan manusia berdasar metode empiris ilmiah dengan mementingkan hipotesis dan eksperimen. Pada abad XX terkenal dengan humanisme sekuler, yang berorientasi pada dunia dan mengabaikan dunia kekekalan. Ideologi yang mengklaim sebagai pewaris humanisme, antara lain: komunisme, pragmatisme, personalisme (spiritualisme), dan eksistensialisme. Komunisme berusaha

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

menghapuskan keterasingan manusia akibat kepemilikan pribadi dan masyarakat kapitalis. Ideologi komunisme berusaha menghapus kepemilikan pribadi. Pragmatisme menyatakan bahwa ukuran kebenaran terletak pada hasilnya. Personalisme (spiritualisme) menegaskan bahwa kebebasan manusia sebagai pribadi serta keterikatannya dengan masyarakat. Hal ini mungkin terjadi jika masyarakat dan pribadi mengakui Tuhan pribadi. Eksistensialisme menekankan kepada kehidupan manusia dengan kesadarannya yang langsung dan subjektif.

Dalam aliran filsafat dan sastra, humanisme secara historis dilatari adanya tekanan terhadap kekuatan, harga diri, atau kebebasan manusia yang dilakukan oleh penguasa dan pemuka agama di abad pertengahan (V - XV) di Eropa (Siswanto, 2001: 17). Pada abad 19, humanisme dikaitkan dengan antiteisme (Bertens, 1987: 39). Selain itu, hal yang mendasari humanisme adalah revolusi komersial, yaitu peningkatan perdagangan, kekayaan, akumulasi modal individu-individu kaya, serta pajak pemerintah. Dalam humanisme, manusia menjadi pusat pemikiran, pusat pengamatan, pusat kebebasan, pusat tindakan, pusat kehendak, serta pusat perasaan (Siswanto, 2001: 17, 24).

Manusia, sebagai pusat perasaan, berwujud dalam perasaan cinta. Perasaan cinta antara lawan jenis maupun perasaan cinta sebagai sesama manusia. Hijo mencintai Biru dan Wungu, Biru mencintai Hijo, Wungu mencintai Hijo, Anna mencintai Hijo, Betje mencintai Hijo, Roos mencintai Walter, Wardoyo mencintai Biru, dan Walter mencintai Wungu. *SH* sangat dominan dengan jalinan cinta.

Rasa cinta antara Hijo dan Biru terlihat ketika mereka berdua berjalan-jalan di Sri Wedari (hlm. 20). Selain cinta kepada Biru, Hijo pun menaruh hati kepada Wungu yang dahulu pernah ditemuinya (hlm. 38-39). Wungu menaruh pula perasaan kepada Hijo. Hanya perasaan itu dipendam Wungu dengan istilah “tidak seorang pun yang mengetahuinya”. Juga, istilah “tidak mengerti apa yang terlukis di dalam

hati Raden Ajeng Wungu” (hlm. 47). Di halaman 94 juga dilukiskan perasaan Wungu terhadap Hijo. Sementara itu, saat perjalanan ke Belanda, Anna menaruh hati kepada Hijo (hlm. 36).

Sebagaimana Anna, Betje, seorang gadis Belanda, jatuh cinta kepada Hijo. Bahkan, hal itu disebut dengan “Betje gila sama tamunya”.

Perkataan Betje itu bisa membikin kaget orang tuanya berdua, karena itu perkataan sudah menunjukkan bahwa Betje menaruh cinta kepada Hijo.

...

Budak perempuan yang itu waktu kebetulan dekat di situ hendak melayani orang-orang yang sama makan, dia terpaksa setengah tertawa sambil mellihatkan mukanya Betje dan Hijo, dan di dalam hati dia berkata:

“Nah! Sekarang Betje gila sama tamunya!”

(hlm. 71-72)

Di sisi lain, Wardoyo, kakak Wungu, menaruh cinta kepada Biru, gadis yang sudah ditunangkan dengan Hijo (hlm. 80-82). Di halaman 88, digambarkan perasaan Wardoyo terhadap Biru. Wardoyo berangan-angan bahwa Biru menjadi teman hidup maupun mati. “Kalau Biru bukan bakal istrinya Hijo, tentu dia jadi teman saya hidup dan mati”.

Cinta tidak hanya melanda tokoh bumiputra, tetapi juga tokoh dominan. Roos mencintai Walter meski Walter kurang menanggapinya (hlm. 133). Sementara itu, Walter justru jatuh cinta kepada Wungu, putri *Regent* Jarak sekaligus adik Raden Mas Wardoyo (hlm. 133).

Dari jalinan cinta antartokoh tersebut, tampak bahwa humanisme sangat dominan dalam *SH*.

Elemen kesadaran ideologi humanisme adalah keselamatan dan kesempurnaan manusia. Dalam wilayah organisasi, Pergerakan Sarekat Islam pun memperjuangkan “tidak ada perbedaan manusia”. Dalam persamaan tidak ada perbedaan derajat dan semua orang merasakan adanya persaudaraan, baik yang berderajat tinggi maupun yang berderajat rendah.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Kedatangan Wardoyo dan Prayogo di kampung Kabangan, tempatnya vergadering SI, di sini sudah beratus-ratus orang yang hendak sama mengunjungi *vergadering*. Semua itulah utusan cabang Sarekat Islam seluruh tanah Jawa. Musik yang berbunyi di tempat *vergadering* itu semakin membikin gembira hatinya orang-orang Islam yang ada di situ. Bangsawan keraton Solo, saudagar, priyayi *Gouvernement* dan orang-orang *particulier*, mereka itulah semua sama menunjukkan kecintaanya masing-masing. Lantaran pengaruhnya Sarekat Islam, itu waktu tidak ada perbedaan manusia; semua mengaku saudara, baik orang yang berderajat tinggi, maupun orang yang berderajat rendah.

(hlm. 159-160)

Dari pemaparan di atas, humanisme disampaikan oleh Hijo, R. Potronoyo, *Regent* Jarak, Wardoyo, Prayoga, Walter, Betje, Anna, dan Roos.

Humanisme berjaln dengan demokrasi. Dengan istilah “manusia tidak ada bedanya” (hlm. 135), “manusia itu sama saja (hlm. 3), “tidak ada perbedaan manusia” (hlm. 160), “Belanda itu juga manusia seperti Bumiputera” (hlm. 189) mengindikasikan ideologi demokrasi yang percaya akan persamaan kesempatan dan persamaan sosial/kehormatan.

Unsur-unsur penting dalam demokrasi, yaitu: adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik; persamaan hak di antara warga negara; kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki dan dipertahankan oleh warga negara; sistem perwakilan, sistem pemilihan dengan ketentuan mayoritas. Persamaan hak meliputi lima jenis, yaitu: persamaan hak politik, bahwa setiap orang memiliki persamaan dalam kesanggupan untuk dipilih menduduki jabatan publik; persamaan di depan hukum; persamaan kesempatan; persamaan ekonomi, bahwa setiap individu dalam masyarakat harus mendapat suatu tingkat jaminan ekonomi minimum disebabkan tanpa jaminan ini kemerdekaan dan persamaan akan mustahil dicapai; persamaan sosial/kehormatan.

Persamaan kesempatan bermakna bahwa setiap orang diperkenankan naik atau turun dalam sistem kelas atau dalam sistem status bergantung kepada kesanggupan mereka. Selain itu, tidak ada penghambat yang membatasi seseorang mencapai kekayaan dan keuntungan yang dihasilkan dari kerja keras. Persamaan sosial/kehormatan berarti bahwa setiap orang dengan latar belakang, kedudukan dan pendapat dapat diterima masyarakat. Persamaan sosial/kehormatan juga berarti tiadanya pembedaan kelas dan status (Sargent, 1987: 29-55).

Elemen kesadaran demokrasi adalah persamaan hak warga negara/rakyat. Elemen solidaritas-identitas demokrasi adalah warga negara/rakyat. Elemen kebebasannya adalah persamaan dan kebebasan warga negara/rakyat.

Demokrasi, dibanding humanisme, dalam *SH* tidaklah dominan. Selain itu, tidak ada gambaran persamaan hak politik, persamaan di depan hukum, dan persamaan ekonomi. Demokrasi disampaikan oleh R. Potronoyo, *Regent Jarak*, Prayoga, serta Walter. Walter berideologi demokrasi karena dialah yang memberikan brosur yang berisi ideologi demokrasi kepada Jepris.

Humanisme berbeda dengan agama (teisme). Teisme muncul ketika R. Potronoyo menanggapi kekhawatiran istrinya mengenai bagaimana nasib Hijo yang hendak bersekolah di negeri Belanda. R. Potronoyo mengembalikannya lagi kepada Tuhan.

“Oh! Perkara itu tidak perlu kita orang pikirkan,”
menjawab Raden Potronoyo, “Sebab perkata mati hidupnya
manusia itu hanya tergantung kepada Tuhan.”

(hlm. 2)

Keyakinan terhadap Tuhan hadir dalam diri Hijo, anak R. Potronoyo, melalui perilaku berdoa yang ditunjukkan di halaman 23, 25, dan 26. Berkait dengan ajaran agama, R. Potronoyo juga menjalankan apa yang diperintahkan agama yang dianutnya, yaitu berpuasa. Perilaku berpuasa mencerminkan religiusitas R. Potronoyo (hlm. 6). Berpuasa

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

bukan hanya dilakukan R. Potronoyo, tetapi juga Hijo. Ajaran berpuasa sudah menjadi tradisi dalam keluarga Hijo. Disebut tradisi keluarga karena terdapat istilah “pelajaran orang tuanya” (hlm. 25-26).

Sebagaimana disebut Marx, agama merupakan ideologi.

Inferior di hadapan kolonial justru membuat bumiputra memiliki elemen solidaritas-identitas yang digambarkan melalui Sarekat Islam. Dalam *SH*, digambarkan Pergerakan Sarekat Islam yang hendak mengadakan kongres di Solo pada 3 Maret 1913. Dalam SI, semua orang Islam seolah memiliki ikatan kuat, kesepakatan hati antara satu orang dengan yang lainnya.

Barangkali kamu telah mendengar kabar bahwa di dalam bulan Maart 3 ini (1913), di Solo akan diadakan congres (*vergadering* besar) dari perhimpunan Sarekat Islam. Ini waktu orang-orang di Solo sudah beramai-ramai membicarakan itu *vergadering* yang akan datang.

...

Di situ, semua orang Islam menunjukkan sepakatnya hati seorang antara lainnya. Di jalan-jalan, siapa *leden* SI yang berjumpa dengan kereta yang berbendera SI, tentu dia orang menunjukkan kesenangannya hati masing-masing.

(hlm. 151-153)

Sarekat Islam menunjukkan adanya persaudaraan yang kekal antara bangsawan dan bukan bangsawan (hlm. 174). Elemen solidaritas-identitas yang dibangun Sarekat Islam identik dengan nasionalisme

Nasionalisme bermakna pada keunggulan suatu kelompok yang didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan, agama, dan wilayah bersama. Ideologi nasionalisme merupakan basis semua bangsa untuk mengorganisasi dirinya ke dalam entitas yang bebas dan otonom. Istilah nasional dan nasionalis berasal dari Latin yang bermakna “lahir di”. Nasional atau nasionalis sering tumpang tindih dengan istilah etnik yang lebih menunjuk kepada kultur, bahasa, dan keturunan bersama di luar

konteks politik (Riff, 2001: 193-194). Nasionalisme merupakan ideologi yang mempengaruhi semua ideologi lainnya. Nasionalisme mengacu pada berbagai kelompok manusia yang memiliki ikatan tertentu, yang diyakini memberikan suatu identitas sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, suatu ikatan emosi yang membentuk kelompok manusia menjadi satu komunitas, atau suatu cara individu mengidentifikasikan diri dengan kelompok. Salah satu cara yang membantu mengembangkan identitas nasional, adalah pengalaman kolonial. (Sargent, 1987: 15-24).

Dalam pidato Tjokroaminoto di sebuah *vergadering* di Semarang yang kemudian dimuat di *Sinar Djawa*, Islam tidak kurang tidak lebih merupakan penanda bangsa bumiputra yang belum bernama (Shiraishi, 1997: 83). Islam sekedar menjadi penanda bumiputra sebagaimana Kristen penanda bagi Belanda dan konfusianisme bagi Tionghoa (Shiraishi, 1997: 57). Islam, meski bercampur dengan animisme dan Hindu, tetaplah alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain (Suminto, 1996: 12). Sarekat Islam yang digambarkan sebagai pergerakan merupakan penanda elemen solidartas-identitas kelompok inferior bumiputra.

Marco melukiskan kekuatan Islam tersebut dengan istilah “yang membikin gentarnya tanah Hindia”. Sarekat Islam bukan hanya menyampaikan persamaan dan persaudaraan antar-bumiputra, tetapi juga memperjuangkan nasib bumiputra yang selama ini selalu diinjak-injak dan dipermainkan. Pertanyaan yang muncul kemudian, diinjak-injak siapa? Tentu saja, kekuasaan kolonial. Upaya memperbaiki nasib orang-orang Islam yang diinjak-injak beratus-ratus tahun kekuasaan kolonial Belanda disebut dengan “maksudnya mulia sekali” (hlm. 160-161).

Kondisi bangsa Hindia tersebut, dirasakan Hijo yang membuatnya berpikir bahwa “tidak seharusnya kita orang Hindia mesti diperintah oleh orang Belanda”.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Dari itu, Hijo tertawa di dalam hati melihat keadaan serupa itu, karena dia ingat nasib bangsanya yang ada di tanahnya sama dihina oleh bangsa Belanda kebanyakan.

“Kalau negeri Belanda dan orangnya itu cuma begini saja keadaannya, betul tidak seharusnya kita orang Hindia mesti diperintah

oleh orang Belanda,” begitu Hijo di dalam hatinya.

(hlm. 58-59)

Penolakan atas “diperintah Belanda” mengindikasikan nasionalisme sekaligus upaya menuju perbaikan nasib masyarakat Hindia. Dalam pergerakan SI, bukan saja pergerakan tersebut menuju perbaikan nasib tetapi juga menuju ke Hindia yang bersatu dan merdeka yang disebut “menuju ke tempat kemanusiaan”. Bangsa Hindia tidak hanya bersatu secara fisik, melainkan telah bersatu hati, bersatu dalam hal cita-cita. Hal ini menunjukkan elemen kebebasan. Kebebasan bumiputra untuk “memperbaiki nasibnya yang sudah beratus-ratus tahun diinjak-injak”.

Nasionalisme muncul dalam tokoh Hijo dan Prayoga.

E. Jalinan Ideologi

Berbagai penjelasan di atas terangkum sebagaimana tersebut di bawah ini.

Dalam diri tokoh tidak hanya terdapat satu ideologi, tetapi jalinan ideologi, pluralitas ideologi. Dari pluralitas ideologi tersebut terdapat ideologi yang tampak dominan. Latar ideologi yang terdapat dalam *SH* adalah kolonialisme dan kapitalisme, bahwa pada saat itu, Hindia berada di bawah kekuasaan Belanda. Kolonialisme merupakan perpanjangan tangan kapitalisme. Elemen kesadaran kapitalisme adalah uang merupakan segala-galanya. Tidak aneh, manakala Hijo datang ke Belanda, ia sangat dihormati karena memiliki kekayaan. Situasi ini berkebalikan dengan situasi di Hindia. Dalam kondisi demikian, elemen solidaritas-

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

identitas tidak berwujud pada identitas bangsa, tetapi identitas individu, memiliki kekayaan atau tidak. Semua tokoh dapat dikatakan pendukung kapitalisme.

Elemen kesadaran kolonialisme adalah kekuasaan atas bangsa lain, dalam hal ini kekuasaan Belanda atas Hindia. Elemen kebebasan kolonialisme adalah kehendak melanggengkan kekuasaan Belanda di Hindia. Tidak mengherankan jika Belanda selalu ingin mempertahankan kekuasaannya. Elemen solidaritas-identitasnya berwujud nama bangsa Belanda. Ideologi kolonialisme tidak berwujud dalam tokoh-tokoh. Oleh karenanya, semua tokoh dengan identitas bangsa Belanda dapat dikatakan sebagai pendukung kolonialisme. Berkait dengan kapitalisme, meski kapitalisme tidak terlepas dari liberalisme, liberalisme tidak diterapkan sebagaimana adanya. Liberalisme, yang berelemen kesadaran kebebasan individu, hanya hadir melalui tokoh Walter, Roos, Betje, dan Hijo.

Agar tetap mempertahankan kekuasaannya di Hindia, ideologi yang tepat dari bangsa Belanda terhadap Indonsia adalah rasialisme. Rasialisme berelemen kesadaran bahwa ras unggul dan mulia adalah bangsa Belanda, sementara Jawa, yang merepresantikan Hindia, merupakan ras rendah. Elemen solidaritas-identitas berwujud nama bangsa Belanda. Belanda adalah superior. Hindia adalah inferior. Pasangan superior-inferior dapat dirinci sebagai berikut. Belanda memiliki segala sifat kebaikan, yaitu: tuan, pintar, lelaki, bersih, rajin, mulia, dan teladan. Sementara itu, Hindia memiliki segala sifat keburukan yang beroposisi dengan sang superior, Belanda, yaitu: jongos, bodoh, banci, kotor, malas, busuk, dan tidak dapat dipercaya. Elemen kebebasan ideologi rasialisme adalah kehendak melanggengkan ras Belanda sebagai ras unggul, melanggengkan hubungan penguasa dan budak. Belanda sebagai tuan, sementara Hindia sebagai budak. Rasialisme dan feodalisme sangat cocok dengan kolonialisme Belanda di Hindia. Tokoh yang

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

merepresentasikan rasialisme, dengan superioritas kolonial adalah Jepri dan Anna.

Ideologi yang sejalan dengan rasialisme adalah feodalisme. Disebut sejalan karena mendukung kelanggengan kekuasaan Belanda dan keunggulan ras Belanda di Hindia. Feodalisme berelemen kesadaran bahwa milik dan jabatan merupakan warisan turun-temurun. Warisan berada di tangan raja, keluarga raja, atau keturunannya. Feodalisme berwujud dalam penggunaan gelar kebangsawanan, budaya priyayi, dan hubungan superior-inferior pedagang/petani dengan priyayi. Elemen solidaritas-identitas feodalisme adalah keluarga/turunan raja yang biasa disebut priyayi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan Belanda, pegawai pemerintah disebut priyayi. Priyayi *cilik* untuk menyebut mereka yang bekerja di pemerintahan Belanda dan priyayi *lubur* untuk menyebut mereka yang merupakan keturunan atau keluarga raja. Semua tokoh bumiputra sudah terhegemoni feodalisme, kecuali Prayoga, dengan adanya gelar kebangsawanan yang melekat dalam nama-nama mereka. Elemen kebebasan feodalisme adalah kehendak melanggengkan hak dan jabatan bagi turunan/keluarga raja. Elemen kebebasan feodalisme, untuk sementara, tidak memiliki pendukung. Justru yang terjadi sebaliknya, bahwa tokoh-tokoh Hijo, R. Potronoyo, dan *Regent* Jarak merongrong feodalisme dan kolonialisme dengan formasi ideologi nasionalisme, demokrasi, dan humanisme.

Inferioritas bumiputra menyebabkan bumiputra perlu memiliki identitas atau nasionalisme yang hadir dalam wujud Sarekat Islam yang merupakan elemen kesadaran. Sarekat Islam merupakan penanda bangsa bumiputra yang belum bernama. Elemen kebebasan nasionalisme berupa kehendak memperbaiki dan melepaskan diri dari belenggu penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Hal ini, sejalan dengan humanisme yang berelemen kesadaran mengenai keagungan dan kesempurnaan manusia, bahwa manusia adalah

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

sama. Solidaritas-identitas humanisme adalah manusia. Elemen kebebasan humanisme adalah tentang keselamatan manusia, termasuk kesederajatan manusia. Humanisme berwujud dalam perasaan cinta, baik cinta terhadap sesama manusia maupun cinta terhadap lawan jenis. Cinta terhadap lawan jenis sangat dominan dalam *SH*. Hijo mencintai Biru dan Wungu, Biru mencintai Hijo, Wungu mencintai Hijo, Anna mencintai Hijo, Betje mencintai Hijo, Roos mencintai Walter, Wardoyo mencintai Biru, dan Walter mencintai Wungu.

Humanisme berjalin dengan demokrasi. Elemen kesadaran demokrasi adalah persamaan hak warga negara/rakyat. Elemen solidaritas-identitas demokrasi adalah warga negara/rakyat. Elemen kebebasan demokrasi adalah persamaan dan kebebasan warga negara/rakyat. Demokrasi disampaikan R. Potronoyo, *Regent Jarak*, serta Prayoga. Demokrasi dalam *SH* tidaklah dominan. Dalam diri Hijo, R. Potronoyo, dan *Regent Jarak* terdapat kontradiksi. Dalam satu sisi, mereka mendukung feodalisme; di sisi yang lain, mereka adalah seorang humanis.

Selain itu, muncul teisme (agama) yang disampaikan R. Potronoyo dan Hijo. Agama merupakan ideologi.

Telah disebut Gramsci bahwa partai berfungsi membentuk kehendak kolektif yang merupakan himpunan intelektual kolektif. Partai merupakan suatu kelompok yang sadar dan aktif secara politik (Salamini, 1981: 62; Hoare, 2000: 147-148). Partai terdiri atas tiga unsur, yaitu: basis rakyat biasa, pemimpin yang mengkoordinasikan aktivitas di tingkat nasional, dan unsur penengah yang mengartikulasikan rakyat biasa dan kepemimpinan yang ada (Bellamy, 1990: 199). Intelektual termasuk unsur penengah.

Dengan mengadopsi pengertian partai, dalam kelompok dominan terdapat tiga unsur, yaitu: tokoh pemimpin, tokoh penengah/intelektual organis, dan tokoh rakyat. Dalam kelompok *subaltern* pun terdapat tiga unsur, yaitu: tokoh pemimpin, tokoh penengah/intelektual tradisional, dan tokoh rakyat.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Berkait dengan kekuasaan Belanda, ideologi dominan adalah rasialisme yang di dalamnya tercakup kolonialisme. Oleh karenanya, tokoh intelektual organik adalah *Sergeant* Jepris dan Anna yang memberikan kesadaran tentang ideologi itu. Semua tokoh dengan elemen solidaritas-identitas Belanda adalah rakyat biasa. Tokoh pemimpin tidak ada karena tidak ada yang mengkoordinasi-kan ideologi mereka di tingkat nasional.

Formasi ideologi rasialisme dan kolonialisme dirongrong formasi ideologi nasionalisme, demokrasi, dan humanisme. Formasi kolonialisme menyebabkan munculnya nasionalisme Hindia yang ditandai Sarekat Islam, sementara rasialisme dan feodalisme menimbulkan demokrasi dan humanisme. Dalam kondisi demikian, Hijo, R. Potronoyo, dan Prayoga tergolong intelektual tradisional karena mereka memberikan kesadaran ideologi di luar ideologi dominan. Meski tidak berucap langsung tentang demokrasi, humanisme, dan nasionalisme, Prayoga adalah anggota Sarekat Islam. Prayoga termasuk dalam kategori intelektual tradisional. *Regent* Jarak tergolong tokoh pemimpin karena jabatannya sebagai bupati.

Apa yang telah dijelaskan di depan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Tabel 1. Elemen Ideologi

| Ideologi | Elemen kesadaran | Elemen Solidaritas-identitas | Elemen Kebebasan |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kolonialisme | Kekuasaan atas bangsa lain | Bangsa Belanda | Melanggengkan kekuasaan Belanda atas Hindia |
| Kapitalisme | Kekayaan adalah segala-galanya | Kekayaan | Kekayaan oleh individu |
| Liberalisme | Kebebasan individu | Kebebasan | Melanggengkan kebebasan individu |
| Rasialisme | Belanda adalah ras mulia / unggul | Bangsa Belanda | Melanggengkan hubungan penguasa – budak |
| Feodalisme | Milik & kedudukan sbg jabatan turun-temurun | Keluarga/turunan raja/bangsawan & pegawai pemerintah | Melanggengkan milik & kedudukan sbg jabatan turun-temurun |
| Nasionalisme | Identitas bumiputra | Islam / bumiputra | Memperbaiki dan melepaskan diri dari penjajahan |
| Humanisme | Keselamatan dan kesempurnaan manusia | Manusia | Keselamatan dan kesederajatan manusia |

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

| | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Demokrasi | Persamaan hak warga negara | Warga negara / rakyat | Persamaan dan kebebasan warga negara / rakyat |
| Teisme | Manusia ciptaan Tuhan | Agama | Manusia menjalankan kehendak Tuhan |

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Tabel 2. Formasi Ideologi

| Ideologi | Subjek | Seting | Peristiwa |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolonialisme | Jepris, Anna, Jetje, Karel, Roos, Piet & Nyonya, Marie, Betje, Walter | Pemerintahan Belanda (<i>Gouvernement</i>) | Pertemuan Walter dengan Jepris |
| Kapitalisme | Semua tokoh | Kolonialisme Belanda, Pasar | Hijo sekolah ke Belanda, kekayaan individu, prinsip <i>bebet</i> , kekuasaan uang, pasar malam Sri Wedari |
| Liberalisme | Roos, Walter, Betje, Hijo | Budaya Eropa | tarian telanjang, kebebasan seks, pengguguran kandungan |
| Rasialisme | Anna, Jepris | Kolonialisme Belanda | Superioritas Anna, superioritas Jepris |
| Feodalisme | Hijo, R. Potronoyo, R. Nganten Potronoyo, R.A. Biru, R.A. Wungu, R.M. Wardoyo, <i>Regent</i> Jarak. R. Ayu Jarak | Priyayi <i>cilik</i> , priyayi luhur | Superior-inferior pedagang dan priyayi, gelar kebangsawanan, kepemilikan tanah & jabatan, hierarki bahasa, saling berkunjung, |
| Nasionalisme | Hijo, Prayoya | Sarekat Islam | Hijo di Belanda, kongres Sarekat Islam |
| Humanisme | Prayoga, R. Potronoyo, <i>Regent</i> Jarak, Hijo, R.A. Biru, R.A. Wungu, R.M. Wardoyo, Roos, Anna, Betje, Walter | Sarekat Islam, Cinta | Kongres Sarekat Islam, jalinan cinta antartokoh |
| Demokrasi | R. Potronoyo, <i>Regent</i> Jarak, Prayoga | Kapitalisme, Sarekat Islam | Sekolah ke Belanda, tujuan Sarekat Islam |
| Teisme | R. Potronoyo, Hijo | Beragama | puasa, berdoa |

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Tabel 3. Subjek dan Formasi Ideologi

| Subjek | Kelompok | Kategori | Formasi ideologi | Ideologi Dominan |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jepris | Domina n | Intelektual organic | Kolonialisme, kapitalisme, rasialisme | Kolonialisme, rasialisme |
| Anna | Domina n | Intelektual organic | Kolonialisme, rasialisme, humanisme, kapitalisme | Kolonialisme, rasialisme |
| Jetje | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, kapitalisme | |
| Karel | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, kapitalisme | |
| Piet & Nyoya | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, kapitalisme | |
| Roos | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, liberalisme, humanisme, kapitalisme | Humanisme |
| Marie | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, kapitalisme | |
| Betje | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, liberalisme, kapitalisme, humanisme | Humanisme |
| Walter | Domina n | Rakyat | Kolonialisme, liberalisme, kapitalisme, humanisme, demokrasi | Humanisme |
| Hijo | <i>Subaltern</i> | Intelektual tradisional | Kapitalisme, feodalisme, liberalisme, humanisme, nasionalisme, teisme | Nasionalisme, humanisme, feodalisme |
| R. Potronoyo | <i>Subaltern</i> | Intelektual tradisional | Kapitalisme, feodalisme, humanisme, demokrasi, teisme | Humanisme, feodalisme |

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

| | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| R.Nganten Potronoyo | <i>Subaltern</i> | Rakyat | Kapitalisme, feodalisme | Feodalisme |
| RA Biru | <i>Subaltern</i> | Rakyat | Kapitalisme, feodalisme, humanisme | Humanisme, feodalisme |
| RA Wungu | <i>Subaltern</i> | Rakyat | Kapitalisme, feodalisme, humanisme | Humanisme, feodalisme |
| RM Wardoyo | <i>Subaltern</i> | Rakyat | Kapitalisme, feodalisme, humanisme | Humanisme, feodalisme |
| <i>Regent</i> Jarak | <i>Subaltern</i> | Pemimpin | Kapitalisme, feodalisme, demokrasi, humanisme | Humanisme, feodalisme |
| R. Ayu Jarak | <i>Subaltern</i> | Rakyat | Kapitalisme, feodalisme | Feodalisme |
| Prayoga | <i>Subaltern</i> | Intelektual tradisional | Kapitalisme, humanisme, demokrasi, nasionalisme | Nasionalisme |

4

Wacana Perlawanan

Dalam teks, negosiasi ideologi berwujud pada hubungan antartokoh, antarperistiwa, serta dalam diri tokoh. *SH* pertama kali dimuat di surat kabar *Sinar Hindia* pada tahun 1918 sebagai cerita bersambung dan terbit sebagai buku tahun 1919. Pada saat itu, Indonesia (masih disebut Hindia) di bawah kekuasaan Belanda.

Cerita *SH* diawali dengan kehendak R. Potronoyo mengirim Hijo ke Belanda. R. Ajeng Potronoyo, istri R. Potronoyo, khawatir bahwa Hijo tergoda wanita Belanda. Bentuk pamitan Hijo kepada Biru, tunangannya ialah Hijo mengajak Biru ke Sri Wedari menonton wayang.

Hijo pun berangkat ke Belanda dengan kapal. Di kapal Hijo bertemu Anna. Melalui pergaulan dan dalam superioritas Anna, ternyata Anna mencintai Hijo. Dalam perjalanan itu, Hijo terkenang kepada Wungu yang dahulu pernah ditemuinya. Setelah kepergian Hijo ke Belanda, famili Hijo dan Biru ke Baratadem untuk beristirahat. Di Baratadem famili, R.A. Potronoyo bertemu famili R. Nganten Jarak. Terkenanglah Wungu, putri R. Nganten Jarak, kepada Hijo.

Hijo sampai di Amsterdam. Di negeri Belanda, Hijo bertempat di rumah Piet, orang tua Betje dan Marie. Dalam pergaulan, Betje jatuh cinta kepada Hijo. Di tempat berbeda, famili Hijo bertamu ke tempat *Regent* Jarak. Bertemulah Wardoyo, kakak Wungu, dengan Biru. Di ulang tahun *Regent* Jarak, Walter melihat Wungu dan Walter jatuh cinta. Sementara itu, Hijo dan Betje menonton opera Faust. Perangai Hijo terpengaruh oleh Faust. Hijo menolak seperti Faust. Hijo dan Betje juga menyaksikan pertunjukan tarian telanjang di Lili Green. Mereka berdua melakukan persetubuhan di penginapan. Saat menerima surat dari Biru,

Wungu, dan Wardoyo, Hijo menyesali hubungannya dengan Betje. Hijo bingung dan menjadi pertapa. Ia berpuasa. Dalam kebingungan, Hijo berkehendak pulang ke Jawa. Sementara itu, Walter menyampaikan hal asosiasi kepada *Regent* Jarak. Karena cinta Walter kepada Wungu, Walter meninggalkan Jet Roos yang sudah mengandung. Jet Roos pun sakit.

Membalas kunjungan famili Hijo, *Regent* Jarak datang ke Solo menyaksikan kongres Sarekat Islam. Di Solo, Wardoyo bertemu Prayoga yang menjadi anggota Sarekat Islam. Dalam pertemuan antara keluarga Potronoyo dan keluarga *Regent* Jarak, terjadi rencana penjadohan. Di sisi lain, gagal mendapatkan cinta Wungu, Walter berangkat ke Eropa, sementara Jet Roos menggugurkan kandungannya. Dalam perjalanan ke Belanda, Walter bertemu Jepris yang superior.

Di Solo, Biru, Wungu, dan Wardoyo menyetujui upaya penjadohan orang tua. Di Belanda, Walter berkunjung ke tempat Hijo. Hijo semakin mengalami dilema. Hijo memutuskan hubungannya dengan Betje dan memberinya uang.

Akhir cerita, yaitu dua tahun kemudian, Hijo menikah dengan Wungu; Wardoyo menikah dengan Biru serta menjadi jaksa di Jarak; Walter menikah dengan Betje; dan Boeren menikah dengan Roos

A. Negosiasi

Pertemuan antara Jepris dan Walter mengandung kontradiksi. Walter seolah-olah menyanjung, tetapi sebenarnya mengejek dan menjungkirbalikkan pandangan Jepris. Pandangan Jepris dijungkirbalikkan oleh Walter, sesama orang Belanda yang mewakili sosok berlawanan. Walter berkehendak menegosiasikan ideologinya dengan membela bumiputra.

Ketika bertemu di kapal dalam perjalanan ke Belanda, Walter mengejek superioritas kolonial dengan sebutan “sombong”. Walter menyebut Jepris sebagai “meninggikan diri seperti familinya raja Nederland” dan “yang itu saat sudah merasa jadi *kapitein*” (hlm. 178-

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

179). Walter mengakui bahwa kemakmuran Belanda berasal dari bumiputra Hindia yang “sesungguhnya bisa membikin hidup senang”. Walter semakin sinis dan tajam dengan menyebut Jepris tidak memiliki sifat kemanusiaan. Dengan kata lain, Walter menyebut Jepris sebagai sosok yang tidak tahu terima kasih, padahal mereka dapat hidup senang bahkan “berapa ribu bangsa” Belanda karena mencari nafkah di Hindia.

“Saya heran sekali, Tuan seorang Belanda yang telah sepuluh tahun ada di Hindia berani berkata begitu,” menjawab *controleur* dengan sabar.

“Apakah Tuan tidak malu mengucapkan itu perkataan? Bagaimanakah tuan bisa berkata serupa itu, sedang Tuan sendiri bisa hidup senang ada di Hindia? Lagipula, berapa ribu bangsa kitakah yang mencari hasil di Hindia? Perkataan Tuan itu suatu tanda bahwa Tuan seorang yang tidak mempunyai kemanusiaan.”

(hlm. 180-181)

Apabila Jepris merupakan wakil dari bangsa Belanda maka Walter menyebut bahwa bangsa Belanda sungguh-sungguh tidak memiliki kemanusiaan. Walter menyebut Jepris “berlagak seperti lebih pintar”, padahal lebih pintar dalam membunuh manusia yang merupakan pekerjaan keji dan kejam. Walter juga menyebut Jepris sebagai kuli kontrak. Apabila dalam analisis terdahulu Belanda merupakan tuan atas jongos masyarakat Hindia, di sini sang Belanda disebut kuli kontrak.

“Bukankah Tuan datang di Hindia itu dulu jadi *koloniaal* (soldadu), pekerjaan mana yang tidak kurang tidak lebih seperti kuli *contract*. Lantaran Tuan bekerja rajin, dan barangkali Tuan telah membunuh berpuluh orang, sekarang Tuan hendak berlagak pula, seperti Tuan lebih pintar bisa membunuh orang, pun akhirnya Tuan dapat beberapa tanda kehormatan dan pujian lantaran pekerjaan Tuan yang keji itu. Mengertikah Tuan hal ini?”

(hlm. 180)

Walter membalik bahwa bangsa kolonial yang “tidak mempunyai kemanusiaan” (hlm. 182). Oleh karena itu, mereka menjadi berlagak.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Perihal berbudaya, *beschaafd*, justru “orang Jawa adatnya lebih halus, pikirannya lebih dalam daripada orang Eropa kebanyakan”. Walter “tahu betul” akan hal tersebut. Frasa “saya tahu betul” merupakan penentangan atau *counter* atas kenyataan “Meskipun Hindia diperintah Belanda telah lama itu, orang Belanda boleh dikatakan tidak tahu sekali-kali dari keadaan di Hindia “ (hlm. 186).

Pembelaan Walter terhadap bumiputra merupakan bentuk negosiasi ideologi. Negosiasi ideologi terjadi dalam diri tokoh. Walter merupakan tokoh dominan, dengan solidaritas-identitas Belanda (lihat Tabel 3, Bab III). Karena bersolidaritas-identitas Belanda, Walter berideologi kolonialisme, yang di dalamnya terdapat liberalisme dan kapitalisme. Untuk melanggengkan kekuasaan Belanda, seharusnya Walter memiliki rasialisme dengan superioritas kolonial sebagaimana Jepris. Sudah sewajarnya apabila Walter bangga dengan kebudayaan yang dimilikinya. Pada kenyataannya, sikap Walter justru berbeda.

Apa yang dilakukan Walter terhadap Jepris merupakan bentuk negosiasi ideologi. Negosiasi diperlukan agar terjadi konsensus, kesepakatan antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi. Agar konsensus tercapai dan dapat diterima kelompok lain dengan rela dan ikhlas sangat dibutuhkan negosiasi. Negosiasi ideologi adalah upaya merangkul berbagai kelompok sosial yang tidak memiliki karakter kelas serta identitas nasional-kerakyatan guna membangun dan menyusun ideologi baru. Ideologi baru tidak harus menyingkirkan semua sistem ideologi yang berbeda, tetapi justru melakukan transformasi ideologi dengan mempertahankan dan menyusun kembali beberapa unsurnya yang paling tangguh. Negosiasi ideologi dengan kelompok *subaltern* lain sangatlah dibutuhkan untuk membentuk kekuatan kelompok yang lebih besar guna melawan kekuatan kelompok dominan.

Walter digambarkan lebih menyukai *menandak* daripada berdansa meskipun dia belum bisa (hlm. 95). Walter bukan saja menyukai adat-istiadat Jawa, tetapi juga lebih senang menjadi orang Jawa. Hal ini

menunjukkan bahwa Walter hendak memiliki solidaritas-identitas Hindia. Upaya negosiasi terlihat dari ucapan Walter yang “kepingin ajar” (hlm. 95-96) meski tidak dapat *menandak*. Rasa cinta Walter pada budaya Jawa terlihat dari caranya berbahasa Jawa. Walter, akhirnya, memakai pakaian Jawa untuk menunjukkan bahwa hatinya, bagian dalam dari tubuh manusia, adalah Jawa dengan memakai “kain panjang dan kain kepala”. Walter bukan hanya memakai pakaian Jawa, tetapi juga *menandak*

Di halaman 178, dilukiskan bahwa dalam perjalanannya ke Belanda, Walter selalu teringat akan Jawa. “dia punya pikiran selalu tergoda kesusahan, karena dia kan meninggalkan tanah Jawa yang dicintainya”. Di halaman 188, disampaikan kabar keburukan bumiputra dan kebaikan pemerintah. “Surat-surat kabar di Nederland sering-sering tersebut keburukan Bumiputera dan kebajikan pemerintah. Tetapi pikiran bumiputra dan kejelekan pemerintah jarang kita dapati”. Walter juga menyampaikan asosiasi kepada *Regent* Jarak (hlm. 134-135).

Tujuan politik asosiasi, menurut Kartodirdjo (1975: 64), adalah menyalurkan aliran dunia pribumi dan menjembatani paham yang berlawanan. Masyarakat pribumi perlu berlandaskan pada persamaan kedudukan serta saling hormat. Politik asosiasi, menurut Suminto (1996: 4, 39-41), bertujuan mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajahnya melalui kebudayaan. Pendidikan menjadi lahan utama politik asosiasi.

Menurut *Regent* Jarak, asosiasi hanya mungkin manakala didasari persamaan derajat. Dengan membenarkan pendapat RM. Tumenggung, humanisme dalam diri Walter jalin-menjalin dengan solidaritas-identitas Hindia.

Rasa cinta lelaki dan wanita merupakan indikasi humanisme. Humanisme Walter terlihat dari rasa cintanya kepada Wungu, anak RM. Tumenggung (hlm. 140-141). Solidaritas-identitas Belanda dalam diri Walter hendak ditinggalkannya sebagaimana ia meninggalkan Jet Roos,

yang berbangsa Belanda, meski Jet Roos sudah hamil. Solidaritas-identitas Hindia yang hendak diraih Walter digerakkan humanisme, yaitu rasa cinta Walter kepada R.A. Wungu. Cinta mengatasi segala perbedaan. Humanisme sangat dominan dalam diri Walter.

Sebagaimana Walter, persoalan identitas dan ideologi superioritas kolonial hendak dinegosiasi Betje. Betje menjalin percintaan dengan Hijo (hlm. 69-70). Persoalan identitas bangsa dinegosiasi Betje melalui percintaan Betje yang tertarik kepada Hijo. Betje ternyata juga menyukai masakan Jawa. Betje bukan hanya menyenangi nasi goreng, bahkan ia sudah dapat membuat nasi goreng, makanan Hindia (hlm. 62).

Betje merupakan tokoh dominan, dengan solidaritas-identitas Belanda (lihat Tabel 3, Bab III). Karena bersolidaritas-identitas Belanda sebagaimana Walter, Betje berideologi kolonialisme yang di dalamnya terdapat liberalisme dan kapitalisme. Untuk melanggengkan kekuasaan Belanda, sewajarnya Betje memiliki rasialisme sebagaimana Anna. Sewajarnya juga manakala Betje bangga dengan solidaritas-identitas yang dimilikinya. Pada kenyataannya, Betje justru menyukai budaya Jawa. Betje lebih menyukai berkulit merah seperti layaknya orang Jawa. Ketertarikan Betje pada budaya Jawa merupakan upaya negosiasi ideologi. Hal ini ditunjukkan dengan kesukaannya pada makanan Jawa dibandingkan dengan makanan Eropa. Dari perilaku ini, Betje mengakui bahwa ia lebih senang menjadi perempuan Hindia, sebuah penanda bahwa ia mencintai Hijo, lelaki dari tanah Jawa. Pada saat perbincangan tentang warna kulit. Betje lebih senang memiliki warna kulit merah (Jawa/Hindia), yang menunjukkan bahwa ia mencintai Hijo, mencintai identitas Hindia.

Pada saat berjalan bersama Hijo, duduk berjejer dalam trem, di tengah kerumunan orang-orang, Betje merasa bangga. Betje “besar hatinya” (hlm.117-118). Betje bahkan bersedia berhubungan sex dengan Hijo (hlm. 122).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Solidaritas-identitas Belanda dalam diri Betje dinegosiasikan dengan cintanya kepada Jawa dan cintanya kepada Hijo. Dengan adanya persetubuhan dengan Hijo, Betje berupaya menegosiasikan solidaritas-identitasnya dengan solidaritas-identitas Hindia. Solidaritas-identitas Hindia yang hendak diraih Betje digerakkan humanisme, rasa cinta Betje kepada Hijo. Cinta mengatasi segala perbedaan. Humanisme sangat dominan dalam diri Betje.

Walter dan Betje mewakili kelompok orang Belanda yang menegosiasikan rasialisme superioritas kolonial menjadi elemen solidaritas-identitas Hindia. Solidaritas-identitas Hindia yang dimiliki Betje dan Walter digerakkan humanisme, yaitu rasa cinta sesama manusia, rasa cinta manusia terhadap lawan jenisnya. Demi mudahnya, Betje dan Walter disebut sebagai tokoh negosiator.

Marco menjawab negosiasi yang ditawarkan tokoh negosiator Walter dan Betje dengan kembali kepada identitas sendiri, jati diri bumiputra. Pengertian identitas mengacu kepada Jawa sebagai wakil dari Hindia. Meskipun *SH* sepertinya menyuarakan dan menggambarkan bangsa Jawa, telaah lebih lanjut menunjukkan adanya pemikiran bahwa Jawa mewakili sebuah solidaritas-identitas nasional. Hal ini bisa ditengarai dari sebutan Jawa yang kadang disamakan Hindia, dengan menyebut “Jawa of Hindia” (hlm. 181).

Nasionalisme *SH* bukanlah nasionalisme Jawa. Jawa dimaknai sebagai wakil identitas nasional. Akan lebih tepat, manakala disebut bahwa nasionalisme Jawa merupakan rintisan awal terhadap pembentukan nasionalisme Hindia karena identitas nasional atau identitas Hindia baru muncul pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hadirnya Sumpah Pemuda. Harus disadari bahwa proses pergulatan ke arah pembentukan elemen solidaritas-identitas nasional jauh-jauh hari tentu telah berlangsung.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Walter, orang Belanda yang menyukai budaya Jawa, hanya dilihat seakan-akan berhati Jawa. Bahkan, ketika Walter menandak pun “banyak orang tertawa melihatkan keadaannya *controleur* yang lucu itu” (hlm. 97). Negosiasi yang dilakukan Walter justru menunjukkan bahwa ia bukan Jawa. Walter baru sebatas “seakan-akan”.

Balik kepada jati diri bumiputra sebenarnya terlihat sejak awal cerita *SH*. Dalam percintaan Hijo dengan Biru telah tampak tema pulang kepada identitas bumiputra, identitas yang telah dikenal. Ketika berjalan-jalan di Sri Wedari, Hijo dan Biru lebih senang menonton wayang daripada menonton bioskop (hlm. 23). Dengan melihat wayang mereka, Hijo dan Biru, mendapat banyak pelajaran. Dalam pewayangan, Janoko merupakan tokoh yang memiliki banyak istri atau tokoh lelaki yang banyak menaklukkan banyak wanita. Pelajaran inilah yang diserap Hijo, yang terlihat ketika ia meninggalkan Betje, nona Belanda yang mencintainya. Setelah melihat wayang orang, budaya milik sendiri, mereka merasa tidak perlu “melihat-lihatkan permainan” yang lain.

Dalam surat Wungu kepada Hijo, disebutkan bahwa orang tua mereka menginginkan mengekalkan persaudaraan atau kekerabatan. Persaudaraan atau kekerabatan antara bumiputra dengan bumiputra, bukan persaudaraan antara bumiputra dengan Belanda.

Dengan sangat ibu minta kepada ibu Tuan, supaya dia orang suka datang di kabupaten Jarak, buat mengekalkan orang persaudaraan. Dan itu permintaannya ibu bisa kabul, sampai ini hari Tuan punya famili masih ada di rumah kita.

(hlm. 102)

Dalam kerangka solidaritas-identitas bumiputra, ada upaya pembalikan superioritas kolonial menjadi superioritas bumiputra, bahwa bumiputra lebih tinggi derajatnya dibandingkan bangsa Belanda. Superioritas bumiputra ditunjukkan dengan sikap bumiputra yang rasional dalam bercinta.

Hijo dan tokoh-tokoh *subaltern* bercinta dengan sikap rasional, maksudnya tidak mengutamakan perasaan. Hijo memutuskan hubungannya dengan Betje tanpa air mata. Hijo hanya merasa susah sedikit (hlm. 206). Dalam pandangan Hijo, hubungannya dengan Betje hanyalah transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dengan pemberian uang kepada Betje pada saat Hijo memutuskan hubungannya dengan Betje.

Tidak adanya kesedihan dalam diri bumiputra terlihat dari kemenduaan sikap Biru. Dalam pikiran Biru terdapat dua lelaki, yaitu Hijo dan Wardoyo. Bagi Biru baik Hijo maupun Wardoyo tidak ada bedanya. Keduanya bisa saling digantikan atau ditukar. Manakala digantikan pun tidak ada kesedihan dalam diri Biru (hlm. 196). Biru tidak jadi menikah dengan Hijo tanpa berlinang air mata dan tanpa diliputi kesedihan. Kondisi perasaannya malah bahagia ketika harus menikah dengan Wardoyo (hlm. 196).

Demikian juga Hijo. Hijo akhirnya menikah dengan Wungu. Hijo tidak berlinang air mata meskipun tidak menikah dengan Biru. Di lain pihak, tokoh-tokoh dominan berlinang air mata dan diliputi kesedihan. Betje berlinang air mata karena berpisah dengan Hijo (hlm. 211). Roos patah hati karena cintanya tak berbalas (hlm. 146-147). Meskipun sudah meninggalkan Roos, Walter pun harus patah hati karena cintanya tak ditanggapi Wungu (hlm. 153).

Gambaran tokoh-tokoh dominan yang patah hati dan tokoh *subaltern* bumiputra yang tanpa linangan air mata adalah wujud superioritas bumiputra atas kolonial.

Hijo membalik superioritas kolonial menjadi superioritas bumiputra. Hal ini terlihat ketika Hijo tiba di Belanda.

Waktu itu Hijo turun dari kapal, di perlabuhan sudah berdesak-desakan orang-orang yang sama memetuk sanak familinya yang datang dengan kapal Gunung. Keadaan itulah sungguh luar biasa bagi Hijo. Bukan luar biasa kebagusan pakaian orang-orang yang ada di situ, tetapi luar biasa sebab mulai itu waktu Hijo bisa

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

memerintah orang-orang Belanda, orang mana kalau di tanah Hindia kebanyakan sama besar kepala.

(hlm. 58)

Sejak saat itu Hijo dapat me-merintah orang Belanda yang disebutnya besar kepala. Kata “me-merintah” penting karena berposisi dengan keadaan Hindia yang “di-perintah” Belanda. Ada upaya pembalikan dari “di-perintah” menjadi “me-merintah”. Dengan melihat kondisi Belanda, tidak sepatasnya Hindia dikuasai Belanda. “Dihormat betul” istilahnya, apalagi kalau orang Jawa memiliki banyak uang serta kaya raya.

Di depan telah disebut bahwa yang membuat Belanda makmur adalah Hindia. Bagaimana mungkin bangsa yang “cuma begini saja” dapat menghina dan memerintah bangsa Hindia. Ada upaya pembalikan lagi dari kata “di-hina” menjadi “meng-hina” dengan cara menyebut “bangsa yang cuma begini saja” (hlm. 58-59). Hijo sungguh-sungguh mengetahui kondisi Belanda, dari pengemis --- Hijo menyebutnya *kere-kere* --- hingga kuli jalanan atau kuli kebun yang mencabuti rumput dan membersihkan jalan.

Pukul sembilan pagi, orang-orang yang sama jualan apel, bunga-bunga buat *bouquet*, sudah sama berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Juga kere-kere (orang-orang miskin) yang sama mengemis dengan memutar orgel atau yang meniup sulingnya, sama mondar-mandir bisa membikin ramai jalan. Kuli-kuli jalan atau kebun dari *gemeente* yang sama memakai *pet* dihiasi *pasmen* kuning seperti priyayi *goepermen* Hindia, sudah sama bekerja membikin bersih jalan atau mencabuti rumput di kebun-kebun.

(hlm. 202)

Dengan datang dan bersekolah di Belanda, Hijo membalik kondisi tidak *beschaafd* sebagaimana dilukiskan di halaman 182, yang mengungkap pembelaan Walter atas bumiputra terhadap superioritas Jepris. “Apakah dari sebab orang Jawa tidak dapat pelajaran di sekolah seperti bangsa Eropa, lalu Tuan berkata tidak *beschaafd*”. Bersekolah di

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Belanda adalah jawaban Hijo atas kondisi kebodohan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, bahwa “memang pemerintah sengaja membikin bodoh kepadanya. Mengapakah *Regeering* tidak mengadakan sekolah secukupnya untuk orang Jawa of orang Hindia”.

Dengan hadir dan berada di negeri Belanda, Hijo adalah sang penjajah. Hijo di Belanda bukanlah bumiputra. Hijo adalah bumiputra yang menjajah negeri Belanda dengan kekuatan kekayaannya, kekuatan kapitalisme. Dengan menetap, tinggal di rumah orang Belanda, Hijo adalah sang kolonial. Karena berkedudukan sebagai sang penjajah, sang kolonial, Hijo menjadi superior atas orang Belanda.

Superioritas bumiputra juga dikonstruksikan dengan penaklukan Hijo atas Betje. Betje sangat bangga dapat duduk berjejer bersama Hijo, seorang Jawa yang berkulit cokelat. Kebanggaan Betje dapat diartikan sebagai kebanggaan wanita terhadap lelaki, atau kebanggaan Betje menjadi bangsa Hindia sebagaimana keinginannya yang telah dibahas di depan. Superioritas itu semakin dikonstruksi melalui penaklukan Hijo, sebagai lelaki, terhadap Betje, sebagai wanita. Penaklukan bukan hanya karena Hijo di-cintai nona Belanda, tetapi Hijo sudah me-niduri nona Belanda. Perihal tidur antara lelaki dan wanita merupakan hal biasa bagi budaya Barat, tetapi menjadi berbeda karena dilihat dari kacamata budaya Hindia. Sebagai perbandingan, hanya menyaksikan tarian telanjang, dengan meminjam tokoh Betje, Marco menandakan hingga tiga kali tentang kebagusan tontonan tersebut.

Superioritas bumiputra atas Belanda tampak lengkap dengan judul bab XXI “Hijo Memutus Kecintaannya Betje” (hlm. 208). Setelah di-cintai nona Belanda, lalu me-nidurinya, kemudian me-mutus-kan hubungan itu dengan memberi “sebuah buku post *spaarbank* yang ada simpanannya uang *f 1000,00*” (hlm. 211).

Hal itu menunjukkan wujud elemen solidaritas-identitas bumiputra yang diidentikkan dengan kekuasaan lelaki, sekaligus jawaban

atas upaya negosiasi yang dilakukan kelompok negosiator, Walter dan Betje.

Mengapa Marco menjawab upaya negosiasi ideologi rasialisme superioritas kolonial dengan superioritas bumiputra berkait dengan diceritakannya Pergerakan Sarekat Islam dalam *SH*.

Gambaran Sarekat Islam menandakan pentingnya pemikiran pergerakan dalam cerita tersebut. Menurut Gramsci, partai merupakan kekuatan yang melakukan eksperimen terhadap konsepsi baru mengenai dunia dan kemudian mendifusikannya.¹⁴ Sarekat Islam adalah suatu organ yang amat diperlukan bagi kelompok bumiputra yang ingin memperoleh hegemoni. Karena Marco aktif dalam pergerakan SI, ideologi SI, baik disengaja maupun tidak disengaja, masuk ke dalam karya-karyanya.

Sebagaimana disebut Nagazumi (1988: 29), bahwa ciri penting gerakan Sarekat Islam adalah menuduh bahwa pejabat pemerintah pribumi sebagai penanggung jawab kemelaratan rakyat karena mereka bukan pelindung rakyat pada saat orang asing membawa lari keuntungan dari negeri Hindia. Prasangka antipemerintah merupakan ciri penting pada semua pemimpin Sarekat Islam, seperti Tjokroaminoto, Goenawan, dan Abdoel Moeis. Mereka membenci birokrasi kolonial yang bersikap tidak adil dan mereka memandang rendah para pejabat pribumi yang menghambakan diri kepada pemerintah kolonial.

Demikianlah alasan mengapa Marco memunculkan superioritas bumiputra untuk mengganti superioritas kolonial. Hal ini sesuai dengan gambaran superioritas priyayi atas sesama bumiputra (saudagar dan petani). *SH* menyamakan seorang *regent* dengan seorang tukang kebun. Bahkan, *SH* menyamakan seorang *regent* dengan budak, buruh yang diupah sang majikan. Menyamakan seorang *regent* dengan seorang

¹⁴ Hoare (2000: 16, 120) dalam catatan pendahuluan menyatakan bahwa di Italia, saat itu, partai menjadi satu-satunya kekuatan dalam arena sosialisme, selain bahwa partai berperan sebagai pemersatu bagi kekuatan-kekuatan yang ada.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

jongos adalah keberanian luar biasa dan kekurangajaran luar biasa di mata para priyayi.

“Tidak, Raden Nganten, zaman sekarang ini tidak ada orang hina dan mulia, kalau dipikir sebetulnya semua manusia itu sama saja. Saya seorang *regent*, itulah kalau dipikir yang dalam, badan saya ini tidak ada bedanya dengan jongos atau tukang kebunnya Belanda. Jadi, saya ini boleh dibilang dengan perkataan umum: buruh (budak).”

(hlm. 172)

Di halaman 200, dilukiskan bukan kere-kere atau kuli-kuli yang seperti priyayi *goevernement* Hindia. Justru sebaliknya, bahwa priyayi *goevernement* seperti kere-kere dan kuli-kuli karena “memakai *pet* dihiasi *pasmèn* kuning”. Pandangan Hidjo ini sama dengan pandangan Tjipto (Shiraishi, 1986: 158-187) yang menganggap bahwa golongan priyayi kehilangan sifat otonomi dan menjadi pesuruh guna mengurus masalah orang Jawa bagi kepentingan tuan-tuan mereka bangsa Belanda.

Di atas superioritas priyayi, ternyata ada superioritas kolonial. Yang lebih luar biasa, superioritas kolonial dijungkirbalikkan Hijo menjadi superioritas bumiputra. Sang superior tidak berada di priyayi, pegawai *gubernemen*, atau sang kolonial Belanda, tetapi justru di tangan bumiputra. Dengan demikian, Hijo telah superior terhadap semua kelompok atau golongan. Hal ini sejalan dengan sifat Marco yang disebut Shiraishi dan Suryadi Suryaningrat sebagai satria. Dengan membalik superioritas kolonial, Hijo menentang kolonialisme Belanda.

Dalam pandangan rasialisme superioritas kolonial hierarki masyarakat Hindia dari yang tertinggi ke hierarki terendah, yaitu: *wong cilik*, priyayi agung, pegawai *Gouvernement*, bangsa Belanda. Bangsa Belanda menduduki hierarki yang lebih tinggi dibanding pegawai *Gouvernement* karena Belanda merasa dirinya adalah sang tuan. Hierarki masyarakat tersebut sangat dimungkinkan karena kolonialisme Belanda atas Hindia. Formasi tersebut dibalik Hijo menjadi superioritas

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

bumiputra. Hierarki masyarakat Hindia dari yang terendah ke hierarki tertinggi, yaitu: bangsa Belanda, pegawai *Gouvernement*, priyayi, *wong cilik* atau bumiputra.

Marco adalah satria yang bersuara dengan lantang dan keras dalam menentang kolonialisme Belanda dan priyayi feodal. Poeze (Yulianti, 1994a: 208) menyatakan bahwa selama tinggal di Belanda, Marco terkesan dan terpengaruh suasana kebebasan mengeluarkan pendapat.

Keberanian Marco dalam menyampaikan suara berhubungan dengan pengalamannya di Belanda.

Dengan menggunakan model penceritaan orang ketiga Marco dapat bercerita dari mana saja, baik dari sisi kelompok *subaltern* bumiputra maupun kelompok dominan penguasa kolonial. Marco, melalui kelompok bumiputra meletakkan dirinya bukan sebagai objek yang dipandang oleh kelompok dominan, tetapi membalikinya menjadi kelompok yang memandang kelompok dominan. Kekuasaan tidak berada pada kelompok dominan, tetapi justru pada kelompok *subaltern* dengan kekuatan membalik di-pandang menjadi me-mandang¹⁵, yaitu dari di-perintah menjadi me-merintah. Dari di-hina menjadi meng-hina. Dari di-cintai nona Belanda menjadi me-nidurinya, kemudian me-mutuskannya. Demikianlah, wujud pembalikan superioritas kolonial menjadi superioritas bumiputra.

Meskipun menggambarkan percintaan lintasbangsa, *SH* tidak melanjutkannya dalam perkawinan lintasbangsa. Kepergian Hijo ke Belanda disertai kekhawatiran sang ibu mengenai hilangnya identitas bumiputra karena perkawinan lintasbangsa. Persentuhan langsung dan perkawinan dengan bangsa lain dikhawatirkan menghilangkan identitas bumiputra.

¹⁵ Dengan teori post-kolonial Budianta (*Kalam*, 1994) melakukan analisis dengan pola memandang-dipandang dalam artikel “Yang Memandang dan Yang Dipandang, Potret Orang Kecil dan Wacana (Post-) Kolonial”, yang disebut Faruk (*Humaniora*, 1997) sebagai contoh kritik sastra terbaik dari jenis sudut pandang atau fokusasi cerita.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Godaan wanita Belanda diidentikkan dengan godaan terhadap hilangnya identitas. Oleh karena itu, identitas bumiputra harus dijaga hati-hati.

Dalam kisah cinta antara Hijo dengan Betje dan Walter yang mencintai Wungu, Marco memunculkan identitas sebuah bangsa bukan hanya karena kulitnya merah, tetapi juga dengan cara pulang kembali ke Jawa (hlm. 131-132). Perkawinan antarbangsa dipandang Hijo sebagai sebuah kehilangan identitas. Identitas bangsa atau identitas nasional berwujud dalam perkawinan satu bangsa, bukan perkawinan lintasbangsa. *SH* hanya menggambarkan percintaan lintasbangsa, tetapi pada akhirnya tetap tetap berwujud perkawinan sebangsa.

“Kenalkah Tuan dengan seorang Jawa bernama Kromonegoro yang kawin dengan seorang nona Belanda?” bertanya Anna yang ada maksudnya.

“Kenal,” menjawab Hijo dengan sabar.

“Saya tidak suka ...” kata Anna pula seolah-olah mempermalukan Hijo.

Lantaran perkataan itulah, Hijo mengerti betul bahwa itu nona menaruh cinta kepadanya. Meskipun sesungguhnya Hijo seorang yang tidak suka main gila, tetapi lantaran mendengarkan perkataan Anna itu, dia terpaksa menunjukkan keberaniannya.

“Saya juga tidak suka ...” kata Hijo kepada Anna buat membalas perkataannya.

(hlm. 41)

Meskipun perkataan Anna hanya olok-olok karena dia mencintai Hijo, tampaknya Hijo menanggapi dengan sungguh-sungguh tentang perkawinan yang berbentuk lintasidentitas dengan menyebutnya sebagai “tidak suka”. Hal itu dikarenakan perkawinan merupakan bentuk elemen solidaritas-identitas bangsa.

Di bawah subjudul “Controleur Walter Menaruh Cinta kepada R.A Wungu” perkawinan antarbangsa hendak dibangun Walter. Namun, perkawinan antarbangsa merupakan suatu kehilangan elemen solidaritas-

identitas. Hal senada muncul ketika Walter, yang jatuh cinta kepada Wungu, bertanya kepada *regent* Jarak.

Marco menjawab perkawinan antaridentitas dengan cara “belum bisa kasih keterangan yang tentu” (hlm. 153). Perkawinan tetap kembali ke bentuk satu bangsa sehingga *controleur* Walter harus patah hati (hlm. 176). Pada akhir cerita, Hijo kawin dengan R.A. Wungu; sementara Betje kawin dengan Walter --- dua orang Belanda yang mencintai budaya Jawa/Hindia, dan juga Roos kawin dengan Boeren. Elemen solidaritas-identitas bangsa tidak dibangun dalam konstruksi perkawinan lintasbangsa.

Akhir cerita digambarkan sebagai berikut.

Hijo telah kawin dengan R.A. Wungu, dan hidup senang menjadi jaksa di Jarak.

Wardoyo sudah jadi *regent* di Jarak mengati papanya, pun ada hidup rukun di dalam kabupaten dengan R.A. Biru.

Walter sudah kembali dari *verlof* menjadi asisten resident di Jarak, dan telah mempunyai istri, yaitu: Betje. Dan *onderwijzeres* nona Jet Roos telah berkawin dengan *Administrateur* Bouren, sobat karibnya Willem Walter, dan sama bertempat di Jarak.

(hlm. 153)

Dalam pandangan Marco, perkawinan antarbangsa dijadikan alat kelompok dominan untuk tetap menjadi penguasa, kelompok dominan tetap menjadi dominan. Hal ini tak dikehendaki Marco. Dalam situasi itu, Marco justru kembali mengukuhkan feodalisme dalam dua hal. Pertama, perkawinan antara intelektual dengan priyayi. Kedua, asas keturunan dalam jabatan. Kedua hal tersebut berkaitan dengan negosiasi ideologi yang terdapat dalam diri R. Potronoyo dan *Regent* Jarak.

R. Potronoyo merupakan tokoh intelektual tradisional, dengan solidaritas-identitas Hindia (lihat Tabel 3, Bab III). Dalam diri R. Potronoyo terdapat ideologi kapitalisme, teisme, humanisme, demokrasi, dan feodalisme. Kapitalisme, sebagai perpanjangan kolonialisme Belanda

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

di Hindia, muncul karena kekuatan uang dan kekayaan R. Potronoyo sekaligus. Teisme dalam diri R. Potronoyo karena agama dan perilaku berpuasa. Humanisme dan demokrasi terdapat dalam diri R. Potronoyo karena ia menganggap bahwa manusia adalah sama. Feodalisme muncul karena atribut raden yang dikenakannya serta hierarki bahasa yang dipergunakannya sebagaimana telah dibahas dalam Bab III. Penjodohan antara Wungu dengan Hijo serta Biru dengan Wardoyo (hlm. 171) mengindikasikan feodalisme dalam diri R. Potronoyo. Hal ini semakin dipertegas dengan akhir cerita, bahwa Hijo kawin dengan Wungu. Ideologi yang dominan dalam diri R. Potronoyo adalah feodalisme.

Regent Jarak merupakan tokoh pemimpin karena jabatannya sebagai bupati, dengan solidaritas-identitas Hindia (lihat Tabel 3, Bab III). Dalam diri *Regent* Jarak terdapat ideologi kapitalisme, humanisme, demokrasi, dan feodalisme. Kapitalisme, sebagai perpanjangan kolonialisme Belanda di Hindia, muncul karena kekayaan yang dimiliki *Regent* Jarak. Humanisme dan demokrasi terdapat dalam diri *Regent* Jarak karena ia menganggap bahwa manusia adalah sama. Feodalisme muncul karena atribut raden yang dikenakannya serta hierarki bahasa yang dipergunakannya sebagaimana telah dibahas dalam bab III. Penjodohan antara Wungu dengan Hijo serta Biru dengan Wardoyo (hlm. 171) merupakan warna feodalisme dalam diri *Regent* Jarak. Hal ini semakin dipertegas dengan akhir cerita bahwa Wardoyo kawin dengan Biru. Ideologi yang dominan dalam diri R. Potronoyo adalah feodalisme.

Hijo merupakan tokoh intelektual tradisional, dengan solidaritas-identitas Hindia (lihat Tabel 3, Bab III). Dalam diri Hijo terdapat ideologi kapitalisme, humanisme, liberalisme, dan feodalisme. Kapitalisme, sebagai perpanjangan kolonialisme Belanda di Hindia, muncul karena kekayaan yang dimiliki orang tuanya. Humanisme terdapat dalam diri Hijo karena ia menganggap bahwa manusia adalah sama. Selain itu, humanisme dalam dirinya karena percintaannya dengan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Biru serta Betje. Liberalisme dalam diri Hijo hanyalah karena faktor pergaulan semata. Dalam situasi mendesak, ketika Hijo diminta pulang kembali ke Jawa dan dijodohkan dengan Wungu, Hijo meninggalkan Betje. Jati diri yang terdapat dalam diri Hijo adalah feodalisme. Feodalisme muncul karena atribut raden yang dikenakannya serta penerimaan atas penjodohannya dengan Wungu (hlm. 171). Hal ini semakin dipertegas dengan akhir cerita bahwa Hijo kawin dengan Wungu. Ideologi yang dominan dalam diri Hijo adalah feodalisme.

Menurut Kartodirdjo (1993: 187), dalam hal perkawinan priyayi memiliki beberapa kecenderungan. Pertama, perkawinan di kalangan keluarga besar sendiri atau di kalangan priyayi sederhana. Kedua, pria yang berhasil dalam pekerjaan mencari jodoh dari kalangan lebih tinggi untuk memperkuat posisi dan kedudukan kedua belah pihak. Ketiga, pria yang maju dalam pelajaran dan menjadi intelektual mendapatkan jodoh dari kalangan bangsawan.

Apa yang disampaikan Kartodirdjo sesuai dengan keberadaan Hijo. Hijo maju dalam pelajarannya dan merupakan intelektual karena dikirim sekolah ke Belanda. Hijo berjodoh dengan Raden Ajeng Wungu, anak *Regent* Jarak.

Masih menurut Kartodirdjo (1993: 3,6), asas keturunan ditetapkan dengan undang-undang *Regeeringsreglement* pasal 69 ayat 4, bahwa jabatan administrasi pemerintahan seolah hanya disediakan untuk keluarga priyayi. Bangsa Belanda memerintah Hindia secara tidak langsung, maksudnya Belanda menguasai Hindia melalui kaum bangsawan bumiputra (Depdikbud, 1986: 87).

Kaum bangsawan, menurut Sutherland (via Kartodirdjo, 1993: 8), disebut priyayi yang memonopoli jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, mereka adalah bagian dari administrasi pemerintahan, pegawai dalam rangka sistem pemerintahan tidak langsung. Menurut Tjipto (Shiraishi, 1986: 158-187), golongan priyayi telah kehilangan integritas dan otonomi

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

serta menjadi pesuruh guna mengurus masalah orang Jawa bagi kepentingan tuan-tuan mereka bangsa Belanda.

Nasionalisme Hijo adalah nasionalisme yang kembali kepada superioritas bumiputra. Hal ini sejalan dengan Marco yang *ngotot* dengan superioritas bumiputra. Marco berkeinginan menulis “Babad Tanah Jawa”. Menurut Marco, sejak abad 19 sejarah dan kebudayaan Jawa Kuno telah ditaklukkan javanolog Belanda dan ini berarti penaklukan dunia Jawa oleh Belanda. Yang disorot Marco adalah ‘kebenaran’ sejarah tadi telah berada di tangan Belanda dan Marco ingin mengembalikan ‘kebenaran’ tadi kepada orang Jawa (Shiraisi, 1997: 414-427).

Marco bukan hanya menaklukkan superioritas priyayi yang terjadi dalam bangsanya, ia juga ingin menaklukkan superioritas kolonial dan menumbangkannya menjadi superioritas bumiputra atas kolonial.¹⁶ Marco, dengan demikian, berideologi *chauvinisme*. *Chauvinisme* (Riff, 2001: 96) merupakan patriotisme yang berlebih-lebihan. *Chauvinisme* berarti patriotisme bombastis yang angkuh terhadap semua orang asing.

Hal ini berarti semua kembali ke identitas bumiputra, jati diri bumiputra. Elemen solidaritas-identitas dikembalikan lagi kepada elemen solidaritas-identitas sebangsa, bukan lintasbangsa. Menurut Lo dan Gilbert (1998), bangsa terjajah memobilisasi dua wacana kontradiktif untuk mendudukkan nasionalisme.

Pertama, retorika perkembangan, suatu pandangan ke depan untuk mencari identitas. Dalam retorika perkembangan, misalnya, ada anggapan bahwa masyarakat terjajah merupakan masyarakat yang tertinggal. Oleh karena itu, masyarakat terjajah harus mengejar ketertinggalannya. Kedua, retorika tradisi, pandangan ke belakang yang

¹⁶ Thohir pada saat melakukan penelitian tentang “Fungsi Legenda Ki Joko Sungging bagi Orang-Orang Jepara” menyatakan bahwa superioritas merupakan sarana memelihara suatu kolektif. Dalam kaitannya di sini, rasialisme superioritas kolonial berguna untuk memelihara kolektif kolonial dan melanggengkan kekuasaannya, sementara rasialisme superioritas bumiputra merupakan sarana membangkitkan dan menumbuhkan solidaritas kolektif.

mengingat kembali praktik dan asal-usul rakyat untuk mempererat ikatan dalam membangun wacana tandingan. Dalam retorika tradisi dibangun kembali esensialisme kultural, yaitu sebuah esensi dari berbagai keberagaman.

Nasionalisme Hijo adalah nasionalisme yang kembali kepada tradisi bumiputra, yaitu nasionalisme dengan retorika tradisi. Nasionalisme Hijo bukan hanya kembali kepada tradisi, tetapi juga nasionalisme yang *chwinistik*. Dengan cara pandang seperti itu, secara tidak sadar Marco terjebak dalam pola pikir model kolonial bahwa bumiputra telah memiliki tempatnya sendiri yang berbeda dengan tempat kolonial. Hal ini sesuai benar dengan apa yang disampaikan James Siegel (Faruk, 1999: 3-4), mengenai “adanya peraturan yang mengharuskan setiap kelompok sosial menggunakan pakaian dan gaya hidup asalnya sendiri”.

Dalam model Gramsci, bumiputra belum dapat membuat negosiasi ideologi dengan kelompok *subaltern* lain yang memiliki pandangan sama, yang kebetulan merupakan bagian kelompok dominan. Padahal, negosiasi sangat dibutuhkan dalam membentuk kekuatan kelompok yang lebih besar guna menandingi dan meruntuhkan kekuatan kelompok dominan.

Apa yang telah dibahas tersebut, menggambarkan adanya perang posisi (*war of position*) antara kelompok dominan dengan kelompok *subaltern*, perang perebutan posisi antara kelompok kolonial dengan bumiputra, perang posisi antara yang menciptakan dan menginginkan keabadian kolonialisme dengan kebebasan bumiputra.

Sebagai masyarakat Belanda, seharusnya Walter dan Betje memiliki pandangan tentang rasialisme superioritas kolonial dan memiliki elemen solidaritas-identitas Belanda. Ternyata, Betje dan Walter justru memiliki elemen solidaritas-identitas Hindia dengan kecintaannya pada budaya Jawa. Dengan gambaran Betje dan Walter tersebut berarti adanya keterpecahan dalam tubuh kelompok dominan.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Superioritas kolonial atau Barat yang digambarkan Jepris dan Anna dalam *SH* mewakili superioritas yang pernah dikehendaki Daendels, Raffles, politik etis serta politik asosiasi dengan program pemberadaban dan perwaliannya atas masyarakat Hindia. Jepris merupakan intelektual organik. Hijo, R. Potronoyo, *Regent* Jarak, merupakan intelektual tradisional, yaitu kelompok sosial yang otonom dan independen. Hijo, yang membalik superioritas kolonial menjadi superioritas bumiputra, menunjukkan nasionalisme *chauvinistik* dengan retorika tradisi, nasionalisme yang kembali kepada masa lalu. Jati diri masa lalu semakin dikonstruksi dengan perkawinan yang bersifat feodalistik sekaligus *chauvinistik*.

Hijo, R. Potronoyo, *Regent* Jarak, Wardoyo, Walter, serta Betje menentang superioritas kolonial Jepris dan Anna. Hal ini berarti, tingkat hegemoni dalam kondisi merosot, yaitu antara kelompok *subaltern* tidak benar-benar sejalan dengan kepemimpinan kelompok dominan. Kelompok *subaltern* merongrong, menggerogoti, mengganti, bahkan menumbangkan ideologi kelompok dominan.

Dengan demikian, terjadi pertentangan antara kelompok dominan dengan kelompok *subaltern*. Kolonialisme kelompok dominan dirongrong nasionalisme kelompok *subaltern* meskipun di dalam kelompok *subaltern* terdapat feodalisme. Rasialisme kelompok dominan ditentang demokrasi kelompok *subaltern*. Feodalisme kelompok *subaltern* merupakan kebudayaan endapan, sisa-sisa masa lalu yang belum punah dan masih berusaha hidup. Kelompok dominan memanfaatkan feodalisme kelompok *subaltern* untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ideologi tangguh yang terdapat di antara kelompok dominan dan *subaltern* adalah kapitalisme. Tawaran negosiasi ideologi adalah humanisme dan liberalisme, antara kebebasan dan cinta sesama manusia, dan kapitalisme.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Kesadaran mempunyai peranan penting dan umpan balik terhadap proses material (Salamini, 1981: 49; Bellamy, 1990: 169). Yang terjadi bukanlah kapitalisme yang merupakan unsur tangguh, baik dalam kelompok dominan maupun kelompok *subaltern*, tetapi nasionalisme *chauvinistik*. Kesadaran akan solidaritas-identitas menjadikan kelompok *subaltern* mempertahankan nasionalisme dengan retorika tradisi. Demi mudahnya, hal ini dapat diperhatikan dalam Tabel 4.

Dengan perkawinan antara Hijo dengan Wungu dan Wardoyo dengan Biru, kelompok *subaltern* sampai pada fase hegemonik karena telah memperlengkapi diri dengan ideologi nasionalisme *chauvinistik*. Meskipun demikian, blok historis belum terbentuk. Hegemoni baru bersifat lokal, belum global. Belum ada kepaduan antara kelompok pergerakan (Prayoga/ Sarekat Islam), kelompok priyayi (Wungu, Wardoyo, *Regent* Jarak), kelompok saudagar (Hijo, R. Potronoyo), serta kelompok negosiator (Betje, Walter). Kepaduan diwujudkan dalam ikatan intelektual tradisional dengan priyayi, antara Hijo dengan Wungu. Keluarga Hijo, sebagai keluarga saudagar, membutuhkan legitimasi menjadi priyayi dengan bersekolah dan kawin dengan Wungu. Sarekat Islam muncul sebagai tambahan cerita ketika Prayoga mengikuti kongres Sarekat Islam. Agama, sebagai ideologi, hanya diperalat nasionalisme. Nasionalisme justru menggunakan simbol dan identitas agama untuk kepentingannya.

Kelompok bumiputra tidak memberi kesempatan kelompok negosiator, Walter dan Betje, berpadu dengan tidak terjadinya perkawinan lintasbangsa. Yang terjadi sebatas percintaan lintasbangsa. Walter hanya mencintai Wungu, tetapi tidak menikahinya. Betje mencintai Hijo, tetapi juga tidak menikah dengannya. Hal itu berbeda dengan *Gouvernement* yang menegosiasikan ideologi. Dengan kekuasaannya, priyayi bukan hanya bagi keturunan bangsawan, tetapi juga diberikan kepada pegawai pemerintah Belanda. Kelompok *counter* hegemoni (kelompok *subaltern*) belum menuntaskan agenda reformasi

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

intelektual dan moral, yaitu menyatukan berbagai unsur ideologis yang berbeda dan membentuk kehendak kolektif nasional.

Dalam teori William, kebudayaan hegemonik berupa ideologi kolonialisme-rasialisme. Belanda melanggengkan kekuasaannya atas Hindia, yang di dalamnya mengandung superioritas kolonial terhadap bumiputra. Belanda merupakan ras superior sementara Hindia merupakan ras inferior. Kebudayaan endapan berwujud pada dua hal.

Satu, feodalisme superioritas priyayi atau pegawai *gouvernement* atas kelompok bumiputra lainnya. Dua, inferioritas priyayi atas superioritas kolonial. Dalam kelompok bumiputra terdapat anggapan bahwa satu kelompok, yaitu priyayi atau pegawai *gouvernement*, yang superior dibanding kelompok bumiputra lainnya. Di balik itu, kelompok priyayi dan pegawai *gouvernement* inferior jika berhadapan dengan kelompok dominan. Kebudayaan yang sedang bangkit, yaitu kebudayaan yang sedang dalam proses perjuangan merebut hegemoni, berwujud perjuangan demokrasi dan nasionalisme bumiputra terhadap pembebasan kolonialisme Belanda. Kebudayaan yang sedang bangkit merupakan wujud *counter* hegemoni.

Tabel 4. Dialektika ideologi

| Kelompok Dominan | Negosiasi | Kelompok Subaltern |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kolonialisme | | Nasionalisme |
| Rasialisme | | Demokrasi |
| | Humanisme | Feodalisme |
| | Liberalisme | |
| | (Kapitalisme) | |
| | Nasionalisme <i>chauvinistik</i> dengan retorika tradisi | |

B. Marco, Pers, Pergerakan Nasional

Perihal karakter, terdapat posisi yang berlawanan antara Marco dan Hijo. Marco, pengarang *SH*, adalah satria. Hijo, tokoh dalam *SH*, adalah pandita. Hijo digambarkan sebagai seorang lelaki yang agak pendiam, tidak berbicara manakala dirasa tidak perlu, serta senang membaca buku. Biru, tunangan Hijo, sering menyebut Hijo seperti orang bisu (hlm. 6-7).

Sifat pandita ditengarai dengan ke-diam-an Hijo pada saat digoda para wanita. Karena kediamannya, Hijo disebut bukan lelaki. Kecintaan Hijo akan buku kadang membuat Biru takut bahwa Hijo akan menjadi gila karena terlalu banyak belajar (hlm. 52). Karena kesenangannya pada buku, janggal ketika Hijo mengajak Biru pergi ke Sri Wedari (hlm. 12). Kehendak pergi ke Belanda telah sedikit mengubah perilaku Hijo yang pasif dalam percintaannya dengan Biru.

Setelah sampai di Belanda, karakter Hijo berubah karena menonton opera Faust. Faust adalah tokoh yang hanya memperdalam ilmu (hlm. 110-111). Perangai Faust yang hanya berkulat pada ilmu pengetahuan berubah ketika dia jatuh cinta. Sebagaimana Faust yang goyang oleh wanita, hati Hijo pun goyang oleh wanita (hlm. 111-112).

Perlahan-lahan cerita Faust mempengaruhi perilaku Hijo yang hanya peduli dengan buku. Perilaku Hijo benar-benar telah terpengaruh cerita Faust yang pernah ditontonnya.

“Tutuplah buku Tuan, saya hendak bicara kepada Tuan sebentar,” kata Betje sesudahnya dia masuk di kamarnya Hijo.

“Mau bicara apa?” tanya Hijo dan berdiri dari kursinya, tetapi dia masih meneruskan membaca buku.

“Tutuplah dulu itu buku,” kata pula Betje menunjukkan kurang sabarnya.

“Ya,” kata Hijo dan menutup bukunya diletakkan di meja.

“Ah, Tuan seperti Faust,” kata Betje buat tertawaan.

“Nee,” membantah Hijo dengan pendek.

...

Pukul setengah delapan malam Betje dan Hijo pergi ke Prinsesse Schouwburg hendak melihat Lili Green.

Tabiat Hijo yang telah berubah lantaran pengaruhnya cerita Faust, bisa membikin kesenangan Betje yang luar biasa.
(hlm. 115, 117)

Model perubahan Faust karena jatuh cinta juga menimpa Hijo. Pada akhir cerita Hijo melupakan buku-buku yang selama ini dicintainya. Hijo tidak menjadi insinyur sebagaimana cita-cita semula. Hijo justru menikah dengan Wungu.

Marco Kartodikromo lahir di Cepu, Jawa Tengah, tahun 1890 (Shiraishi, 1997: 109; Eneste, 1990: 109). Pada umur dua puluh satu, tahun 1911, Marco menuju Bandung dan bergabung dengan surat kabar *Medan Prijaji* dan merintis karier sebagai wartawan. Marco bergabung dengan *Sarotomo* sebagai editor dan administrator atas undangan Martodharsono di tahun 1912. Pertengahan tahun 1914 di Surakarta Marco mendirikan *Inlandsche Journalistenbond* (IJB) lalu menerbitkan *Doenia Bergerak* sebagai surat kabar IJB. Dalam *Doenia Bergerak* Marco sebagai ketua; Sosrokoernio sebagai sekretaris; dan M. Haji Bakri, seorang batik kaya Kauman sebagai bendahara. Marco melancarkan ‘perang suara’ terhadap pemerintah Hindia dan Tjokroaminoto yang telah jatuh ke pangkuan pemerintah. *Doenia Bergerak* di bawah pimpinan Marco merupakan ujung tombak orang-orang Indische Party, demikianlah pandangan Belanda. Ada dua ciri Marco, yaitu bahasanya sangat keras dan pandangannya tentang persamaan bumiputra dengan Belanda (Shiraishi, 1997: 110-114).

Pendidikan Marco dapat disebut tertinggal jika dibandingkan dengan Tirtoadhisoeurjo (pembentuk Sarekat Dagang Islam), Tjokroaminoto, dan Soewardi. Mereka (Tirtoadhisoeurjo, Tjokroaminoto, dan Soewardi) memperoleh pendidikan terbaik di Hindia, yaitu ELS,

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

HBS, Oswia atau Stovia. Marco hanya lulus sekolah bumiputra Angka Dua di Bojonegoro dan sekolah swasta bumiputra Belanda di Purworejo (Shiraishi, 1997: 110).

Marco hanya dapat membaca bahasa Belanda. Kemampuannya menulis dan berbicara bahasa Belanda kurang baik.¹⁷ Tirta, Tjokro, dan Soewardi bukan hanya membaca, tetapi menulis serta berbicara bahasa Belanda dengan fasih. Marco tidak pernah bergaul bebas dengan orang Belanda. Saat itu, segala sesuatu yang berbau Belanda dan Eropa merupakan lambang kemajuan dan simbol modernitas (Shiraishi, 1997: 110).

Sampai tahun 1919, belum ada pendidikan tingkat perguruan tinggi di Hindia (baca: Indonesia). Hanya sejumlah kecil orang Hindia yang memperoleh kesempatan masuk ke perguruan tinggi setelah mereka sukses menembus sistem Eropa menuju HBS (*Hollandsche Burger Scholen*, SMA) lalu ke perguruan tinggi di negeri Belanda. Pada tahun 1905, hanya tiga puluh enam orang Hindia yang berhasil masuk ke HBS. Orang Hindia yang pertama mencapai gelar doktor di Universitas Leiden adalah Hoesein Djajadiningrat (Ricklefs, 1998: 239).

Marco hidup dari penjara ke penjara. Marco menjalani hukuman sejak Juli 1915 sampai Maret 1916. Kemudian, selama lima bulan Marco di Belanda. Marco masuk penjara lagi pada Februari 1917 hingga Februari 1918. Setelah itu, ia bergabung dengan Semaoen di Semarang, menjadi komisarisi SI Semarang, serta menjadi redaktur *Sinar Hindia* yang merupakan organ SI. Marco diberi kedudukan sebagai ketua serikat pengawas hutan (Wono Tamtomo) yang dikontrol SI Semarang dan mendirikan *Soero Tamtomo* sebagai organ organisasinya. Marco menulis apa yang ingin ditulisnya. Dalam kongres CSI, tahun 1919, Marco dipilih sebagai komisarisi CSI dan mengepalai bidang jurnalisme. Selama di Semarang, Marco tidak pernah menjadi anggota ISDV/PKI. Marco

¹⁷ Hal ini wajar karena Marco hanya lulusan sekolah bumiputra Angka Dua.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

menyuarakan apa yang ingin disuarakan, mengatakan apa yang ingin dikatakan, tetapi bukan dilandasi ideologi komunis. Bulan April sampai Oktober 1920, Marco masuk penjara lagi. Bulan Desember 1920, Marco bergabung dengan CSI Yogyakarta dan menjadi wakil sekretaris serta menjadi redaktur *Pemberita CSI*. Pada bulan September 1921, Marco pindah ke Salatiga. Mulai Desember 1921, selama dua tahun, dia dihukum karena tulisan “Rahasia Kraton Terboeka”, “Matahariah”, dan artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal *Pemimpin*. Pada akhir 1923, Marco bergabung dengan PKI/SI Merah dan tampil sebagai anggota PKI dalam *vergadering* SI Merah Salatiga pada Februari 1924. Marco pernah berkeinginan menulis “Babad Tanah Jawa” yang berisi sejarah pergerakan mulai tahun 1900. Alasan mengapa ia menulis “Babad Tanah Jawa” karena sejak abad 19 sejarah dan kebudayaan Jawa Kuno telah ditaklukkan javanolog Belanda. Hal ini berarti penaklukan dunia Jawa oleh Belanda. Yang disorot Marco adalah ‘kebenaran’ sejarah telah berada di tangan Belanda dan Marco ingin mengembalikan ‘kebenaran’ tadi kepada orang Jawa. Akan tetapi, keinginannya tak terselesaikan di saat pembahasannya perihal kedatangan Belanda dan berdirinya Batavia. Awal September 1924, Marco kembali ke Surakarta. Pada tanggal 20 September 1924, Marco menjadi ketua PKI Seksi Surakarta. Awal 1925, Marco menetapkan diri sebagai pemimpin PKI dan SR (Sarekat Rakyat) Surakarta. Marco memimpin *openbare vergadering* dan *ledenvergaderingen* serta menyunting dan menerbitkan organ SR Surakarta. (Shiraisi, 1997: 414-427). Marco bersama 20 anggota PKI ditangkap Belanda pada tanggal 6 September 1926 (Shiraisi, 1997: 461). Tahun 1927, Marco dibuang ke Digul dan tahun 1932 Marco meninggal karena terkena malaria (Shiraisi, 1997: 468).

Telah disebut di atas bahwa Marco, di tahun 1916, berkesempatan ke Belanda selama lima bulan. Sekolah Belanda, menurut Kartodirdjo, 1975: 16), menarik karena memberi keuntungan materi bagi

lulusannya dan terdapat penguasaan terhadap bahasa Belanda. Penguasaan bahasa Belanda bermakna kesempatan mendapatkan kerja yang lebih baik, memperlihatkan status sosial yang lebih tinggi, serta kesempatan mendapat informasi dari dunia, terutama dunia Barat melalui koran maupun buku (Tsuchiya, 1986: 199-200). Bagi Budi Utomo, masalah pendidikan bahasa tetap berorientasi kepada Barat atau Belanda (Nagazumi, 1988: 18). Penguasaan atas bahasa Belanda bagaikan terbukanya jendela dunia untuk manusia. Selain itu, seperti disebut Shiraishi (1997: 110), Marco “tergila-gila pada simbol-simbol modernitas dan tampil di depan umum dalam gaya Eropa, seperti sinyo, sementara Tjokroaminoto dan Soewardi tetap dalam baju Jawa”.

Selain sebagai wartawan, Marco aktif dalam dunia pergerakan.

Organisasi nasional pertama yang lahir di Hindia adalah Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awal-awal pergerakan nasional, Budi Utomo dianggap lambang persatuan nasional yang telah lama dinantikan. Meski ada pengertian nasional, sebenarnya Budi Utomo masih berorientasi Jawa, kecuali apa yang dikemukakan Soewarno, sekretaris sementara Budi Utomo. Pada bulan September 1908, ia menyatakan bahwa pada awalnya pengutamaan memang terletak pada Jawa dan penduduk pribumi Jawa. Jangka panjangnya, pengutamaan pada Hindia secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan bangsa maupun tradisi. Sosok yang mengorganisasikan Budi Utomo antara lain Wahidin, Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Soewarno, Goembreg, Mohammad Saleh, serta Soelaeman (Nagazumi, 1988: 3,5, 8-10, 19).

Pada Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta tanggal 3-5 Oktober 1908, terjadi perbedaan pendapat antara Wahidin dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Keduanya sama-sama ingin menggalakkan pendidikan Barat. Tjipto menghendaki pendidikan bagi seluruh masyarakat. Tjipto berkeyakinan bahwa pendidikan Barat akan menyelamatkan kondisi masyarakat Jawa yang statis, dan akan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

merongrong hierarki sosial tradisional. Wahidin, yang didukung Radjiman dan Dwidjosewojo, menekankan pendidikan untuk priayi. Manakala elite masyarakat Jawa sudah berpendidikan maka segera akan diikuti rakyat jelata. Menurut Wahidin, apa yang dibutuhkan masyarakat bumiputra adalah pendidikan dan mempertinggi kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat Jawa (Nagazumi, 1988: 12, 5). Perdebatan antara Wahidin dengan Tjipto tersebut mirip dengan perdebatan antara van Deventer dengan Snouck Hurgronje.

Snouck Hurgronje mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat bumiputra, van Deventer menganjurkan pendidikan Barat kepada golongan bawah (Depdikbud, 1986: 108). Disadari atau tidak, Wahidin dipengaruhi Snouck Hurgronje. Tjipto dipengaruhi ide van Deventer.

Pandangan yang berlawanan antara Wahidin dan Tjipto jauh-jauh hari sebelumnya telah dilihat Soewardi. Menurut Soewardi Soeryaningrat, saat Budi Utomo berdiri di dalamnya terdapat dua kelompok, yaitu kelompok moderat dan kelompok radikal. Kelompok radikal kemudian pecah menjadi dua, yang akhirnya bergabung dengan Sarekat Islam serta Indische Partij (Nagazumi, 1988: 16).

Kaum priyayi, yang merupakan tiang utama Budi Utomo, menjadi sasaran kritik Sarekat Islam. Budi Utomo berperilaku partai semi pemerintah, Sarekat Islam mengambil sikap kritis atas pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pengurus Budi Utomo adalah pejabat pemerintah bumiputra. Mereka memandang bahwa tugas mereka di Budi Utomo merupakan perluasan dari kedudukan di pemerintah. Oleh karena itu, mereka hanya berpikir dari sudut pandang karier pemerintah (Nagazumi, 1988: 29, 13).

Bulan Agustus sampai Oktober 1916, terjadi pemberontakan di Jambi. Pers Eropa menuduh Sarekat Islam sebagai dalang dari peristiwa tersebut (Suminto, 1996: 129). Ciri penting gerakan Sarekat Islam adalah

menuduh pejabat pemerintah bumiputra sebagai penanggung jawab kemelaratan rakyat. Pejabat pemerintah bumiputra bukan pelindung rakyat pada saat orang asing membawa lari keuntungan dari negeri Hindia. Prasangka antipemerintah merupakan ciri penting pada semua pemimpin Sarekat Islam, seperti: Tjokroaminoto, Goenawan, dan Abdoel Moeis. Mereka membenci birokrasi kolonial yang bersikap tidak adil. Mereka memandang rendah para pejabat bumiputra yang menghambakan diri kepada pemerintah kolonial (Nagazumi, 1988: 29).

Sarekat Islam (SI) merupakan gerakan massa yang pertama di Hindia Belanda. Pendorongnya bukanlah agama, melainkan perdagangan sebagai reaksi perekonomian Cina yang berkembang pesat di seluruh Jawa. Meskipun antara Budi Utomo dan SI memiliki persamaan dalam hal pentingnya kemajuan, SI lebih mementingkan aksi daripada sekedar berbicara (Nagazumi, 1988: 28, 21).

Sarekat Islam (SI) merupakan perkembangan dari Rekso Roemekso, perkumpulan tolong-menolong atau ronda malam guna menghadapi para kecu yang membuat daerah Lawean Surakarta tidak aman, di awal 1912, yang didirikan Haji Samanhudi. Karena status hukumnya, atas bantuan Tirtoadhisoejo kemudian Rekso Roemekso dibungkus dalam bahasa modern sebagai cabang Serikat Dagang Islam (SDI) Bogor di Surakarta. Meskipun bernama Sarekat (Dagang) Islam, pada kenyataannya perkumpulan tersebut dari sisi organisasi bukanlah perkumpulan dagang sebagaimana SDI Bogor. Perkumpulan diberi nama Sarekat Islam meski warga Surakarta menamakannya Sarekat Dagang Islam. *Hoofbestuur* (pengurus) terdiri atas presiden, sekretaris, bendahara, dan komisaris. Samanhoedi sebagai presiden, Djojomargoso sebagai sekretaris kedua, Kartowihardjo sebagai bendahara, dan Tirtoadhisoejo sebagai penasihat. Semua anggota komite tinggal di Surakarta kecuali Tirtoadhisoejo yang tetap tinggal di Bogor. Sesuai dengan anggaran dasar yang tertulis, SI diwajibkan mendirikan sekolah untuk kaum muslimin, memajukan perdagangan, menerbitkan organ berbahasa Jawa,

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

mendirikan mesjid, dan meminta sumbangan anggota atas proyek-proyek tadi. Semua proyek tak terwujud kecuali penerbitan surat kabar berbahasa Jawa *Sarotomo*. Tirtoadhisoerya sebagai redaktur utama *Sarotomo*, Martodharsono sebagai redaktur pendamping. *Hoofbestuur* tak berniat mendirikan percetakan, dan *Sarotomo* berfungsi sebagai simbol modernitas. Sementara itu, Residen Surakarta semakin cemas karena SI meluas ke pedesaan dan adanya solidaritas, dan kekuatan anggota SI. Pada 10 Agustus 1912 karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), semua kegiatan SI dihentikan. SI dilarang melakukan kegiatan, pertemuan, dan menerima anggota baru (Shiraishi, 1997: 56-64).

Pada tanggal 14 September 1912, Tjokroaminoto, dengan bantuan Tjokrosoedarmo, membuat anggaran dasar baru untuk pengakuan yang sah terhadap SI Surabaya yang terpisah dari SI Surakarta. Hal ini merupakan strategi memperbanyak SI di luar Surakarta. Setelah itu, *afdeling-afdeling* (cabang) SI banyak didirikan, misalnya di Kudus, Bandung, Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Semarang. Awal 1913, surat kabar menyebarkan SI. Selain *Sarotomo*, ada *Oetoesan Hindia* di Surabaya, *Sinar Djawa* di Semarang, *Kaoem Moeda* di Bandung, dan *Pantjaran Warta* di Batavia yang menjadi organ SI. *Vergadering* SI yang besar pertama kali di Surabaya pada 26 Januari 1913 dengan 10.000 orang hadir dan telah ada 15 *afdeling* yang mewakili 80.000 orang anggota. Tjokroaminoto mengorganisir kegiatan tersebut. Tanggal 25 Maret 1913 diadakan kongres SI pertama di Surakarta dengan 42 *afdeling* yang mewakili 200.000 anggota (Shiraishi, 1997: 56-57). Surat kabar dengan para jurnalisnya merupakan alat guna menyebarkan ide-ide pergerakan. Dengan kata lain, surat kabar merupakan organ penting dalam pergerakan.

Dalam sebuah *vergadering* di Semarang yang kemudian dimuat di *Sinar Djawa*, Tjokroaminoto berpidato bahwa Islam merupakan penanda

bangsa bumiputra yang belum bernama. Islam menjadi penanda bumiputra sebagaimana Kristen penanda bagi Belanda dan konfusianisme bagi Tionghoa (Shiraishi, 1997: 83, 57). Islam, meski bercampur dengan animisme dan Hindu, tetap pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain (Suminto, 1996: 12). Kejadian 1912-1919 yang menyertai pendirian Sarekat Islam menunjukkan besarnya peranan ideologi Islam dalam menggerakkan rakyat (Kartodirdjo, 1975: 75).

Di bawah pimpinan Tjokroaminoto, SI bagai balon yang menggelembung. Angotanya makin banyak mengalahkan Insulinde dan Budi Utomo, tetapi tak memiliki gagasan dan gaya baru. Tjokroaminoto hanya melihat milisi bumiputra untuk mempertahankan Hindia, perwakilan rakyat, serta *zelfbestuur*, dan bukannya menuntut kemerdekaan. Di kongres ia mengungkapkan keluhan-keluhan kepada pemerintah kolonial. Apakah keluhan ditanggapi atau tidak, hal ini terserah pemerintah kolonial. Orang-orang menjadi biasa dengannya. Tjokroaminoto tak lagi dianggap cemerlang atau luar biasa sebab ada suara yang lebih meyakinkan, bersemangat, dan militan, yaitu suara yang diteriakkan Marco Kartodikromo (Shiraishi, 1997: 102-107).

Di Jawa Tengah pusat SI di Surakarta tetap penting. Sejak Pangeran Ngabehi mundur dari jabatan *adviseur* atas perintah Sunan, dan pejabat tinggi lainnya juga mengundurkan diri, SI Surakarta lumpuh. Apalagi, saat Poespodiningrat dan Djojomargoso, sang ketua dan sekretaris mengundurkan diri. Tinggal Samanhoedi dan beberapa pengusaha batik serta para jurnalis, termasuk Marco Kartodikromo dan Sasrokoernio, bekas sekretaris SI Surabaya. Sasrokoernio menjadi sekretaris *afdeling* Surakarta, sementara Marco Kartodikromo sebagai komisioner. Mereka berdua menjalankan semua kegiatan harian, menerbitkan *Sarotomo*, mengurus kantor SI, mengadakan *vergadering*, serta menjadi pemimpin pergerakan secara profesional (Shiraishi, 1997: 56-75).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Ada perbedaan antara Marco, Soewardi (salah seorang pemimpin Indische Party), dan Tjokroaminoto (ketua SI Surabaya). Tjokroaminoto menyatakan bahwa bumiputra harus bekerja demi kemajuannya di bawah perlindungan pemerintah serta tidak menentang tatakolonial. Soewardi, sebagai satria sejati yang sama-sama setara dengan kolonial Belanda, menentang dominasi kolonial Belanda secara frontal. Marco sama dengan Soewardi sebagai satria sejati. Namun, Marco dengan suara berteriak dan menyerang (Shiraishi, 1997: 86, 117).

Pada artikel berjudul ‘“Satria” vs “Pendita” Sebuah Debat dalam Mencari Identitas’ Shiraishi (1986: 158-187) menjelaskan perihal satria dan pendita. Tahun 1918, ketika *Volksraad* (Dewan Rakyat) didirikan, terjadi debat antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetatmo Soerjokoesoemo guna menyambut pembukaan sidang *Volksraad*. Mereka membahas bagaimana menempatkan makna pergerakan dalam sejarah dan kebudayaan Jawa serta bagaimana hidup dalam masa pergerakan di saat pergerakan di titik yang menentukan, di tahun 1918.

Marco adalah seorang satria yang berani sakit, berani masuk di dalam api, berani masuk penjara. Marco berjalan terlalu cepat dibanding yang lain. Oleh karena itu, mereka ketinggalan dibanding Marco sementara jalan yang hendak dilalui penuh rintangan yang panas dan keras. Agar jalannya rata perlu ada sama dalam me-rasa.

Tjipto adalah satria. Satria mengacu pada sosok yang berjuang seorang diri, mengecam keras kolonial Belanda dan kelompok priayi feodal, menganjurkan nasionalisme Hindia dan memperjuangkan nasib rakyat kecil, serta berani dan setia kepada cita-cita tersebut. Konsep Soetatmo adalah sang pandita, sosok yang melampaui semua perbedaan antargolongan, antaragama, dan antarkepentingan. Sang pandita merupakan sosok yang hidup menyepi dan bertapa di gunung, terasing dari kehidupan masyarakat sampai ia mampu menguasai diri secara sempurna. Soetatmo menjadi anggota Indische Partij yang didirikan

tahun 1912. Tahun 1913, Soetatmo menjadi anggota Komite Bumi Putera dan kemudian menjadi pengurus pusat Budi Utomo. Soetatmo juga menjadi pimpinan Adhi Darma Keluarga Paku Alaman. Tahun 1921, Soetatmo menjadi anggota *Volksraad* mewakili Budi Utomo. Bersama Soewardi, Soetatmo mendirikan Taman Siswa dan menduduki ketua yang pertama sementara Soewardi menjadi sekretaris. Dalam debat tadi, Soetatmo mengajukan nasionalisme Jawa. Menurutnya, nasionalisme Jawa memiliki landasan kebudayaan, bahasa, serta sejarah, sementara nasionalisme Hindia merupakan produk pemerintah kolonial Belanda. Menyikapi hal tersebut, Tjipto memandang bahwa kekurangan utama pandangan Soetatmo terletak pada unsur perkembangan sejarah dunia. Jawa telah kehilangan kedaulatannya dan merupakan bagian dari Hindia yang dijajah Belanda. Dengan demikian, Tjipto menggagas nasionalisme Hindia, sementara Soetatmo menggagas nasionalisme Jawa. Yang dibutuhkan orang Jawa, menurut Tjipto, bukanlah pendidikan sebagaimana yang dikemukakan Soetamo, melainkan peningkatan kesejahteraan. Pembebasan manusia dari keruntuhan moral baru dimungkinkan jika kebudayaan Jawa lenyap dan menjelma menjadi manusia Hindia. Menurut Soetamo, dunia pergerakan menunggu tokoh *pandito ratu* yang mampu memimpin pergerakan, yang mampu memulihkan hubungan *kanwula-gusti*. Tjipto berpandangan bahwa rakyat tidak menunggu kepemimpinan dari sang pandita, melainkan pergerakan telah mengisyaratkan datangnya zaman terang. Rakyat yang telah bangkit dalam pergerakan bukanlah objek, melainkan subjek waktu. Zaman edan bukan karena dunia penuh kekacauan sebagaimana digambarkan Soetatmo, melainkan karena penjajahan Belanda dan golongan priyayi yang diperalat penjajah yang telah mematikan kreativitas dan prakarsa orang Jawa. Tjipto mengecam pemerintah kolonial Belanda karena sifatnya yang otoriter dan pemerasaannya yang kapitalistik. Tjipto menuduh golongan priyayi yang kehilangan integritas dan otonomi. Golongan priyayi kehilangan sifat otonomi dan menjadi pesuruh guna

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

mengurus masalah orang Jawa bagi kepentingan tuan-tuan mereka bangsa Belanda. Pergerakan menandakan terwujudnya zaman emas melalui satria sejati yang menjelma menjadi “orang Hindia”. Pada zaman pergerakan, seorang satria sejati adalah mereka yang melawan penjajahan Belanda dan kaum priayi feodal. Satria adalah mereka yang membuat perlawanan tanpa kompromi terhadap Pemerintah Kolonial (Shiraishi, 1986: 158-187). Perlu diketahui bahwa bangsa Belanda memerintah Hindia secara tidak langsung, maksudnya Belanda menguasai Hindia melalui kaum bangsawan bumiputra (Depdikbud, 1986: 87). Kaum bangsawan, oleh Sutherland (via Kartodirdjo, 1993: 8), disebut priyayi yang memonopoli jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, mereka adalah bagian dari administrasi pemerintahan, pegawai dalam rangka sistem pemerintahan tidak langsung.

Saat Marco dipenjara karena delik pers di tahun 1915, Soewardi menyebutnya satria. Soewardi (Nagazumi, 1986: 183) menulis surat terbuka kepada Marco:

Bagi saya, kebahagiaan yang paling besar berada di dalam pikiran saya. Dengan delik pers ini, saudara telah mengorbankan diri dan semua hukuman sesungguhnya merupakan sebuah bintang kehormatan bagi saudara dan itulah lambang kebahagiaan saudara. Sekarang, di mata saya angka saudara sangat tinggi, karena sudah jelas, kebahagiaan saudara terletak dalam upaya membela bangsa.

Yang disebut satria adalah mereka yang melawan tanpa kompromi pemerintah kolonial Belanda dan golongan priayi feodal. Demikianlah, karakter Marco.

Jadi, terdapat dua gambaran yang berbeda tentang Hijo dan Marco. Hijo sebagai pendita dan hanya mencintai bacaan, membaca buku, dan bukan menulis buku. Marco, sang satria, dengan suara keras

menentang kolonialisme Belanda di Hindia dan mencintai tulisan, menulis dan bukan membaca. Hal yang terakhir dapat dilihat dari karya-karya Marco, baik yang berbentuk sastra maupun karya jurnalistiknya sebagai seorang wartawan. Karya Marco (Eneste, 1990: 109) antara lain *Mata Gelap* (novel, 1914), *Sair-Sair Rempah* (kumpulan sajak, 1918), *Student Hidjo* (novel 1919), *Rasa Merdeka* (novel, 1924), *Cermin Buah Keroyalatan* (novel, 1924).

Kedatangan Hijo di negeri Belanda semata-mata sebagai penanda bangsa bumiputra meraih simbol kemajuan dan modernitas sebagaimana diungkap Shiraishi (1997: 110) bahwa Marco “tergila-gila pada simbol-simbol modernitas dan tampil di depan umum dalam gaya Eropa, seperti sinyo, sementara Tjokroaminoto dan Soewardi tetap dalam baju Jawa”. Kedatangan Hijo ke Belanda dapat diartikan bukti penaklukan bumiputra atas kolonial sebagaimana penaklukan Hijo atas Betje. Hijo berhasil “setara bahkan superior” di hadapan bangsa Belanda karena telah pernah dicintai wanita Belanda, yaitu Betje. Hijo pernah me-niduri Betje sekaligus me-mutuskannya. Dengan hadirnya Hijo di Belanda, Hijo bukanlah bumiputra, tetapi justru sang kolonial bagi Belanda karena Hijo memiliki kekayaan dan uang.

Mengapa Hijo perlu bersekolah meraih pendidikan tinggi hingga ke negeri Belanda, hal ini dapat ditarik dari diri Marco. Selain bahwa pendidikan pada saat itu bersifat rasialis, yang penting adalah pengalaman dan kondisi psikis Marco sebagaimana diungkap Shiraishi (1997: 110). Marco hanya bersekolah kelas dua. Marco hanya dapat membaca bahasa Belanda. Kemampuannya menulis dan berbicara dalam bahasa Belanda kurang baik. Marco tak pernah dapat bergaul bebas dengan orang Belanda. Padahal, saat itu segala sesuatu yang berbau Belanda dan Eropa merupakan lambang kemajuan dan simbol modernitas.

Dalam pandangan feodalisme, kelas teratas diduduki oleh priyayi agung, sementara kelas paling bawah adalah *wong cilik*. Kelas antara priyayi agung dan *wong cilik* adalah priyayi cilik. Dalam pandangan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

rasialisme Pemerintah Kolonial bangsa Eropa / Belanda menduduki kelas teratas. Di bawahnya, bangsa Timur Asing. Bumiputra menduduki kelas terbawah. Meskipun disebut bumiputra, pada kenyataannya dalam hal pendidikan, misalnya, terdapat sekolah yang hanya diperuntukkan bagi bumiputra dari keturunan tokoh terkemuka atau keturunan bangsawan. Dalam pandangan rasialisme Jepris, ras superior sekaligus ras unggul adalah bangsa Belanda, sementara ras inferior atau ras rendah adalah bumiputra. Dalam pandangan feodalisme R. Potronoyo, *wong cilik* menduduki kelas paling bawah. Pedagang dan petani termasuk *wong cilik*. Di atasnya, terdapat kelas priyayi. Di atas priyayi, terdapat priyayi *gouvernement*, yaitu pegawai yang bekerja di Pemerintah Belanda. R. Potronoyo memang tidak menyebut secara tersurat bahwa kelas paling atas diduduki Belanda. Namun, dengan memperhatikan *Gouvernement* berada di atas priyayi, kelas paling superior adalah bangsa Belanda. Di sini, terjadi perbedaan struktur sosial pegawai pemerintah. Dalam pandangan feodalisme, pegawai pemerintah merupakan priyayi cilik yang berarti mereka tetap di bawah priyayi agung. Hal ini wajar karena struktur feodalisme menunjukkan bahwa ras superior adalah keturunan raja atau bangsawan. Dalam pandangan R. Potronoyo, pegawai pemerintah berada di atas priyayi feodal. Dengan kekuasaannya, Pemerintah Kolonial menegeosiasikan ideologinya. Priyayi bukan saja keturunan bangsawan, tetapi juga pegawai pemerintah. Kedudukan priyayi dibanding pegawai pemerintah bahkan lebih tinggi dibanding priyayi feodal. Demikianlah, negosiasi yang dilakukan Pemerintah Kolonial.

Semua itu dibalik Hijo. Ras superior justru berada di pihak bumiputra. *Wong cilik* menjelma menjadi bumiputra. Pengertian bumiputra di sini adalah bumiputra yang telah berciri nasionalisme, yaitu dengan munculnya gambaran Sarekat Islam. Islam merupakan penanda identitas bagi bumiputra yang belum punya nama. Dalam Sarekat Islam, dengan ikatan nasionalisme, seharusnya priyayi dan pegawai pemerintah

melebur dalam bumiputra. Manakala mereka tidak melebur, maka kelas di bawah bumiputra adalah priyayi. Kelas di bawah priyayi adalah pegawai pemerintah. Kelas paling bawah adalah Belanda. Bumiputra adalah sang superior sementara Belanda adalah si inferior. Mengenai pembalikan ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Hijo hanyalah dijadikan alat Marco guna menyampaikan ideologinya. Secara partial Hijo berkarakter pendita, tetapi secara keseluruhan *SH* berkarakter satria karena menggambarkan dan menentang superioritas priyayi dan superioritas kolonial Belanda. Menentang superioritas kolonial dapat diartikan menentang kolonialisme Belanda.

Apa yang membuat Marco bersuara keras terhadap para priyayi dapat ditelusur melalui tiga ilustrasi yang disampaikan Wahidin, Sastrodjono, serta Sastrowardoyo berkenaan dengan keberadaan priyayi.

Pada saat mempropagandakan kepada para priyayi, khususnya para bupati, tentang pentingnya pendidikan Wahidin mengalami 2 tentangan. Pertama, ia dianggap mengguncang ketentraman dan ketertiban sistem yang telah berlaku. Kedua, kedudukan rendah Wahidin Soedirohoesodo sebagai dokter Jawa, yang hanya sejajar dengan asisten wedana senior. R Sastrodjono, Komisaris Budi Utomo, di tahun 1912, menyatakan bahwa yang menghambat kemajuan rakyat Jawa adalah sikap kaum priayi yang tidak mau peduli terhadap masyarakat kecil (Nagazumi, 1988: 5, 26). Menurut Sastrowardoyo (1992: 177), ciri masyarakat Hindia yang terdidik dalam suasana dan lingkungan peradaban Belanda adalah kurangnya keberanian bertindak memperbaiki nasib bangsanya. Mereka yang secara struktur merupakan lapisan paling menentukan justru paling pasif dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Menurut Anton L. Becker (Heryanto, 1989), salah satu kekuatan penjajahan adalah penindasannya atas kerangka wawasan seseorang sehingga kalangan elit masyarakat terjajah ikut mendukung serta mengokohkan kekuasaan sang penjajah. Meminjam pendapat Heryanto (1989) bahwa tak ada

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

kekuasaan manusia atas manusia lain dapat berkelanjutan dan mapan tanpa dukungan dari kelompok yang dikuasai itu sendiri. Dukungan atas kolonialisme Belanda di Hindia paling tidak berasal dari kaum priyayi dengan ideologi feodalisme.

Ketika Budi Utomo berdiri, para Bupati merasa perlu mendirikan “organisasi bupati se-Jawa dan Madura”. Para Bupati tetap penuh percaya diri mewakili penduduk pribumi. Antara keduanya, Budi Utomo dan para bupati, memandang satu dengan yang lain sebagai persaingan (Nagazumi, 1988: 14-15) dan bukannya sesama kelompok *subaltern* yang perlu bernegosiasi guna membentuk kelompok lebih besar. Hal yang sama tampak ketika Sarekat Islam hadir dengan dukungan massa. Budi Utomo merasakan adanya saingan terbesar. Para pejabat Budi Utomo sangat cemas menyaksikan masa depan perkembangan organisasi Sarekat Islam yang merupakan saingannya itu (Nagazumi, 1988: 29-30).

Dengan membalik superioritas kolonial menjadi superioritas bumiputra atas Belanda, Marco adalah intelektual tradisional yang mengkritisi *common sense* superioritas kolonial dan superioritas priyayi. Marco berusaha menumbangkannya dengan superioritas bumiputra di saat Hindia masih di bawah kekuasaan Belanda.

Pada akhir cerita, Hijo tidak perlu kawin dengan Betje sebagaimana Walter tidak kawin dengan Wungu. Marco, melalui Hijo dan Wungu, menjaga superioritas bumiputra atas kolonial. Karakter Hijo seolah dipengaruhi Faust, tetapi lebih dipengaruhi tokoh pewayangan Janoko yang banyak menakhlukkan hati wanita. Liberalisme dan humanisme dalam diri Hijo hanyalah karena faktor pergaulan karena kepergiannya ke Belanda dan pertemuannya dengan orang-orang Belanda di negeri Belanda. Di sisi lain, menurut Kartodirdjo (1993: 105, 187), faktor-faktor yang memudahkan *wong cilik* menyesuaikan diri dengan gaya hidup priyayi, antara lain dengan pendidikan dan perkawinan. Dalam struktur sosial kolonial, pendidikan Barat memiliki kewibawaan sehingga

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

berfungsi sebagai kunci memperoleh kedudukan terpandang dalam masyarakat dan simbol status. Selain itu, pendidikan di lingkungan sekolah memberi kesempatan bergaul dengan putra-putri priyayi. Perkawinan dengan wanita dari kalangan priyayi akan mempercepat proses adaptasi. Hal inilah yang dilakukan Hijo dan Wungu.

Dengan tidak adanya perkawinan lintasbangsa, yaitu Hijo kawin dengan Wungu yang termasuk kaum priyayi dan Biru kawin dengan Wardoyo yang juga priyayi, Marco masih melanjutkan tradisi feodalisme yang sebenarnya hendak dikritisinya. Marco mempertahankan, melanggengkan, bahkan mengukuhkan tradisi priyayi dengan menjadikan Hijo sebagai jaksa di Jarak dan bukannya menjadi pedagang sebagaimana ayahnya, R. Potronoyo. Tradisi feodalisme masih dikukuhkan dengan “Wardoyo sudah jadi *regent* di Jarak mengganti papanya”. Secara kuantitatif, ideologi yang dominan dalam diri Hijo adalah humanisme dengan adanya percintaan Hijo dengan Biru dan Betje. Secara kualitatif, Hijo sangat dominan dengan feodalisme. Humanisme dan demokrasi dalam diri Hijo karena pergaulan semata. Jati diri Hijo adalah feodal.

Marco gagal mengkritisi ideologi rasialisme karena dalam feodalisme terdapat rasialisme. Kegagalan ini sejalan dengan kegagalan Marco menulis “Babad Tanah Jawa” yang ingin mengembalikan “kebenaran” sejarah kepada orang Jawa. Nasionalisme Hijo adalah nasionalisme dengan retorika tradisi.

Ada dua alasan mengapa Marco terperangkap dalam feodalisme. Satu, dalam usaha membangun hegemoni Marco harus menyesuaikan ideologi nasionalisme dengan tradisi feodalisme yang kuat dalam masyarakat. Dua, Marco masih belum dapat melepaskan diri dari pola dikotomis bumiputra-kolonial.

Tabel 5. Pembalikan Superioritas

| Tingkat | Feodalisme | Rasialisme Pemerintah Kolonial | Rasialisme Jepris | Feodalisme Potronoyo | Nasionalisme Hijo |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| I | Priyayi agung | Eropa/ Belanda | Belanda | Belanda | Bumiputra |
| II | Priyayi cilik | Timur Asing | Bumiputra | Gouvernement | Priyayi |
| III | Wong cilik | Bumiputra | | Priyayi | Gouvernement |
| IV | | | | Wong cilik | Belanda |

C. Politik Etis dan Bahasa Lingua Franca

Masuknya Belanda ke Hindia dapat ditelusuri ketika para pedagang asing mulai memasuki bumi Nusantara sekitar abad keenam belas, sebagaimana disebut Ricklefs (1998: 31). Guna menghindari persaingan tidak sehat antarpedagang Belanda dan memperkokoh kekuatan mereka dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Portugis dan Inggris, mereka membentuk kongsi dagang yang disebut Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). VOC berdiri tahun 1602 (Ricklefs, 1998: 39). Tahun 1795 secara resmi VOC bubar. Sejak 1798 keberadaan Hindia langsung berada di bawah pemerintah Belanda.¹⁸

Daendels, yang menjadi Gubernur Jendral masa 1808-1811, berniat memperbaiki nasib rakyat bumiputra dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Daendels melakukan dasar pemerintahan sesuai sistem Barat. Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur Jendral mewakili raja muda Lord Minto pada periode 1811-1816. Sebagaimana Daendels, Raffles pun berkeyakinan tentang kebaikan sistem pemerintahan Barat (Kartodirdjo, 1975: 1-3). Satu hal yang patut dicatat pada masa Daendels adalah peningkatan jumlah pasukan dari 4.000 menjadi 18.000, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang

¹⁸ Menurut Ricklefs (1998: 168) VOC dibubarkan pada 1 Januari 1800. Tentang ketepatan tahun bubarnya VOC tak akan dibahas karena bukan tugas dari penelitian ini.

Hindia yang menjadi tentara Kolonial Belanda (Riclef, 1998: 171). Belanda menggunakan cara-cara dominasi dalam mempertahankan koloninya.

Selain itu, Menurut Heryanto (1989) cara pandang Barat diberlakukan seolah-olah berlaku universal di seluruh pelosok dunia. Cara hidup Barat diperlakukan sebagai teladan dan penguasa tertinggi. Para penguasa itu sangat yakin kebaikan dan superioritas sistem Barat yang dapat diberlakukan secara universal di semua daerah koloninya di seluruh dunia.

Masa 1816-1830 dinilai sebagai kegagalan penerapan cita-cita liberal yang mengeksploitasi daerah jajahan guna keuntungan negeri induk. Karena Belanda tidak memiliki perdagangan dalam pengertian perkapalan dan pabrik, Van den Bosch memusatkan politik kolonial pada produksi dengan penggunaan tenaga rakyat dalam penanaman hasil-hasil yang dapat dijual ke pasaran dunia. Sistem ini dilaksanakan dengan sistem-paksa/ *kulturstelsel* (Kartodirdjo, 1975: 6-7). Periode 1840-1890 merupakan periode yang dipengaruhi kebijakan liberalisme dengan membuka peluang selebar-lebarnya terhadap modal swasta Eropa guna ditanamkan pada usaha perkebunan besar di daerah jajahan, termasuk di Hindia. Hal ini dimungkinkan karena kemenangan ide liberal dalam politik pemerintahan di negeri Belanda. Mulai 1850, secara resmi *kulturstelsel* dinyatakan berakhir. Dalam bidang hukum, periode 1860-1900 dapat disebut sebagai upaya tranpalasi sistem hukum asing (Eropa) kepada tata hukum masyarakat kolonial (Soetandyo, 1995 : 5-7, 111). Di sini tampak usaha menerapkan sistem budaya Barat kepada budaya bumiputra sebagaimana yang telah dilakukan oleh Daendels dan Raffles.

Sejak 1860, politik kolonial makin menekankan kesejahteraan rakyat dan meninggalkan prinsip eksploitasi negeri jajahan. Tahun 1889, van Deventer menulis artikel yang menyatakan bahwa keuntungan jutaan yang dihasilkan Hindia merupakan suatu “Hutang Kehormatan” (*de Eereschuld*). Kemudian, mulailah fase Politik Etis (*Etische Politiek*)

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

(Kartodirdjo, 1975: 13-14). Setelah 1890, kebijakan kolonial dipengaruhi politik etis yang berniat mempertimbangkan kemajuan penduduk bumiputra, baik dalam segi ekonomi maupun sosial, budaya, serta hak politik (Soetandyo, 1995 : 5-7, 111). Politik Etis secara resmi disampaikan van Dedem sebagai anggota Parlemen dalam pidato di tahun 1891 dengan isi memisahkan keuangan Hindia dari negara Belanda dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia. Politik Etis ini menganggap Hindia tidak lagi sebagai daerah yang menguntungkan, tetapi daerah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan budaya rakyat pribuminya (Kartodirdjo, 1975: 34, 37). Dalam bahasa yang mudah, Politik Etis bermaksud memajukan penduduk bumiputra melalui pendidikan secara Barat (Depdikbud, 1986: 108). Namun, peran koloni tetap penting untuk penanaman modal dan guna menjaga kepentingan modal. Kemungkinan mempertahankannya hanya dengan mempererat hubungan antarbangsa. Oleh karena itu, dijalankan politik asosiasi yang mengambil sikap berdamai dengan gerakan emansipasi (Kartodirdjo, 1975: 38-39).

Tujuan politik asosiasi menyalurkan aliran-aliran dunia pribumi dan menjembatani paham yang berlawanan. Masyarakat bumiputra perlu berlandaskan persamaan kedudukan serta saling hormat. Alat penting mencapai tujuan tersebut adalah pengajaran (Kartodirdjo, 1975: 64). Perihal pendidikan, Belanda merasa wajib mengajar para bangsawan dan menjadikannya sebagai patner dalam sosial budaya yang akan menutup jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat. Politik asosiasi bertujuan memperat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajahnya melalui kebudayaan. Pendidikan menjadi lahan utamanya. Hal ini tidak lepas dari upaya memperkokoh eksistensi penjajahan. Snouck Hurgronje merupakan pencetus gagasan asosiasi bahwa Belanda berfungsi sebagai wali. Oleh karena itu, Belanda wajib mendidik bangsa Hindia (Suminto, 1996: 4, 39-41).

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Dalam mewujudkan cita-citanya, Hurgronje mendapat tentangan dari masyarakat Belanda yang pada umumnya tidak percaya akan kemampuan bumiputra dan dari pihak bumiputra yang tidak percaya akan kemampuan sendiri (Suminto, 1996: 42). Politik asosiasi bercita-cita golongan bumiputra dan Eropa dapat hidup berdampingan. Bumiputra, yang telah mendapat pendidikan Barat, diharapkan dapat bekerja sama dengan golongan Eropa. Dengan munculnya pergerakan, politik asosiasi kehilangan eksistensinya (Kartodirdjo, 1975: 61).

Di sini tampak perbedaan antara van Deventer dan Snouck Hurgronje. Apabila Snouck Hurgronje mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat bumiputra, van Deventer menganjurkan pendidikan Barat kepada golongan bawah (Depdikbud, 1986: 108).

Di luar itu semua, terdapat pembagian golongan sosial berdasarkan keturunan dan status menurut hukum tahun 1848, yaitu: golongan Eropa, golongan yang dipersamakan dengan Eropa, golongan bumiputra, serta golongan yang dipersamakan dengan bumiputra. Pada tahun 1920, hal tersebut diubah menjadi: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan bumiputra (Depdikbud, 1986: 111). Tahun 1922, corak politik pergerakan makin radikal. Tahun 1923, banyak organisasi bumiputra yang bersikap non-kooperasi dan menolak imperialisme. Kesadaran nasional rakyat Hindia kemudian dinilai sama dengan komunisme (Suminto, 1996: 60).

Telah disebut di depan bahwa tahun 1834 Belanda melaksanakan politik *cultuurstelsel*. Sebagai ganti politik *cultuurstelsel* dilaksanakan politik etis / balas jasa. Slogan Politik Etis, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Oleh karena itu, mulai tahun 1900 pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah berorientasi Barat (Depdikbud, 1986: 108). Dalam bidang emigrasi, diupayakan pemindahan dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya, termasuk di dalamnya pemindahan penduduk ke daerah perkebunan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

dengan tujuan mendapatkan tenaga kerja murah guna menjadi buruh perkebunan seperti di perkebunan Sumatera Utara. Dalam bidang irigasi diupayakan pembuatan pengairan guna mendukung daerah perkebunan yang menjadi milik *ondernemer* Belanda. Dalam bidang edukasi mulailah didirikan sekolah-sekolah. Tahun 1911 Belanda mendirikan perpustakaan di tiap-tiap Sekolah Rakyat (Situmorang, 1980: 30).

Ada empat prinsip pendidikan yang dilaksanakan pemerintah kolonial (Depdikbud, 1986: 86). Satu, pemerintah tidak memihak salah satu agama tertentu. Dua, upaya anak didik agar dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial. Tiga, sistem disusun sesuai adanya perbedaan lapisan sosial yang terdapat dalam masyarakat Hindia, khususnya yang ada di pulau Jawa. Empat, pendidikan diukur dan diarahkan guna membentuk golongan elite sosial yang dapat dipakai sebagai alat kepentingan politik dan ekonomi Belanda.

Meskipun pemerintah bersikap netral perihal agama, pada kenyataannya dengan latar belakang keinginan untuk tetap menjajah Hindia, mereka tidak akan mampu memperlakukan agama pribumi (Islam) sama dengan agama mereka (Kristen) (Suminto, 1996: 15). Secara umum pendidikan sebelum tahun 1900 bertujuan untuk membentuk kelas elite dan tenaga profesional/terdidik. Pendidikan setelah 1900 bertujuan hanya membentuk kelas elite (Depdikbud, 1986: 110). Pendidikan yang dikembangkan pemerintah Belanda tetap dalam kerangka untuk kepentingan politik dan ekonomi Belanda.

Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan *Comissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur* (Komisi untuk Sekolah-Sekolah Bumi Putera dan Bacaan Rakyat) (Situmorang, 1980: 31; Rosidi, 1991: 16; Eneste, 1990: 35).¹⁹

¹⁹ Ada sedikit perbedaan antara Situmorang dan Iskandar (dalam Kratz, 2000: 7-8). Menurut Iskandar Balai Pustaka atau *Volkslektuur* didirikan pada tahun 1908 oleh *gubernemen* Hindia Belanda di Jakarta dengan tujuan bangsa Indonesia memperoleh bacaan yang sesuai dengan kehendak pemerintah jajahan dan bukannya bacaan terbitan swasta yang bertentangan dengan tujuan politik pemerintah kolonial. Balai Pustaka mempunyai sebuah badan bernama *Komissie voor*

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Komisi ini diketuai Dr. G.A.J. Hazeu dan sejak tahun 1917 berubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat (Kantor *voor de Volkslektuur*) atau Balai Pustaka (Eneste, 1990: 35-36; Situmorang, 1980: 31-32; Eneste, 1990: 35).²⁰

Menurut Situmorang (1980: 32) tugas Balai Pustaka meliputi: mengumpulkan serta mencatat semua cerita rakyat / dongeng rakyat yang hidup di masyarakat; menerbitkan cerita yang telah dikumpulkan; menerjemahkan cerita yang berasal dari luar negeri, yang tidak bertentangan dengan politik pemerintahan Belanda di Hindia; menerbitkan majalah untuk bahan bacaan masyarakat; menyelenggarakan perpustakaan; menerbitkan karangan asli tulisan orang Hindia; membimbing pengarang Hindia dalam pengertian memberi kesempatan untuk menulis dan dorongan demi kemajuan di bidang kesusastraan. Menurut Roolvink (1959: 171), Balai Pustaka merupakan satu-satunya penerbitan resmi bagi kesusastraan yang baik dan murah. Menurut Siregar (2000: 708), ada dua kriteria baik tidaknya sebuah bacaan menurut Balai Pustaka, yaitu menggunakan kriteria politik dan bahasa. Ukuran bahasa adalah bahasa Melayu. Pada kriteria politik, Siregar tidak menjelaskannya lebih lanjut.

Menurut Watson (Faruk, 2000: 38; 2001, 54), Balai Putaka didirikan atas suatu tujuan politik, yaitu mendapatkan monopoli dalam penyediaan bahan bacaan rakyat dan hegemoni konsepsi mengenai sastra yang baik dan buruk. Monopoli diperlukan sebab di dalam masyarakat terdapat kecenderungan banyaknya bahan bacaan terbitan para penerbit komersial dengan cerita-cerita yang imoral dan dapat mengganggu ketertiban politik. Balai Pustaka berhasil membuat opini bahwa karya

de Volkslektuur yang salah satu tugasnya memeriksa dan meneliti karangan yang dikirim orang ke Balai Pustaka. Anggota *Komissie voor de Volkslektuur* lima atau tujuh orang yang diketuai oleh Kepala Balai Pustaka. Mereka bertugas menyelidiki apakah isi dan bahasa karangan sesuai dengan politik Belanda.

²⁰ Buku *Leksikon Sastra* yang disusun Suhendra Yusuf (1995) tidak mencantumkan Balai Pustaka. Yang tercantum justru Balai Bahasa. Dengan judul “Leksikon Sastra” tampaknya yang terakhir itu lebih penting dibanding Balai Pustaka.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

terbitannya jauh lebih baik dari karya penerbitan swasta karena empat hal. Satu, mutu kertas cetakan. Dua, bahasa yang dipakai dianggap sesuai dengan citra kesusastraan yang tinggi sebagai kelanjutan tradisi istana yang diagungkan. Tiga, ditariknya tokoh-tokoh masyarakat atau pergerakan politik nasional menjadi penulis. Empat, memiliki kritikus-kritikus yang membela terbitannya. Balai Pustaka membawa misi moral dan politik. Misi moral Balai Pustaka selain mengontrol secara ketat penggunaan bahasa, juga kecenderungan perilaku atau hubungan seksual yang menyimpang. Misi politik Balai Pustaka antara lain mengontrol ketat terhadap kemungkinan pengungkapan konflik sosial dan politik yang tercakup dalam SARA serta pengungkapan citra buruk terhadap diri orang Eropa sebagai bagian dari kelompok yang berkuasa (Faruk, 2001: 63-64).

Menurut Damono (dalam Kratz, 2000: 652-653), Balai Pustaka merupakan kantor propaganda yang bertugas menyediakan bacaan bagi rakyat agar mereka menjadi warga yang baik dalam lingkungan negeri jajahan. Balai Pustaka merupakan bagian program pemerintah untuk mendidik masyarakat Hindia agar menjadi masyarakat modern. Tahun 1922 Balai Pustaka mulai menerbitkan majalah, yaitu: *Panji Pusataka* dan *Sri Pustaka* (berbahasa Melayu), *Kejawen* (berbahasa Jawa), *Paralujuangan* (berbahasa Sunda) (Situmorang, 1980: 30-32).

Rinkes merupakan ketua pertama Balai Pustaka (Suminto, 1996: 137). Tugas Komisi Bacaan Rakyat menurut Rinkes (via Rosidi, 1991: 16):

“Hasil pengajaran itu boleh juga mendatangkan bahaya, kalau orang yang telah tahu membaca itu mendapat kitab-kitab bacaan yang berbahaya dari saudagar kitab yang kurang suci dan dari orang-orang yang bermaksud hendak mengacau. Oleh sebab itu bersama-sama dengan pengajaran itu maka haruslah diadakan kitab-kitab bacaan yang memenuhi kegemaran orang kepada membaca dan memajukan pengetahuannya, seboleh-bolehnya

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

menurut tertib dunia sekarang. Dalam usahanya itu harus dijauhkan segala yang dapat merusakkan kekuasaan pemerintah dan ketenteraman negeri”

Pemerintah Belanda takut akan dampak yang diakibatkannya. Hal ini terungkap melalui pernyataan Rinkes bahwa pengajaran dan pengadaan buku bacaan harus dijauhkan dari segala yang dapat “merusakkan kekuasaan pemerintah” Belanda dan ketenteraman negeri. Dengan kata lain, segala upaya yang dilakukan Belanda berujung pada pelanggaran kekuasaannya atas Hindia. Tidak mengherankan jika kemudian diterbitkan Nota Rinkes yang merupakan syarat atau palang pintu bagi karya yang hendak diterbitkan oleh Balai Pustaka.

Isi Nota Rinkes (via Pradopo, 1995: 97) adalah: tidak berpolitik, tidak menyinggung masalah agama, tidak menyinggung kesusilaan masyarakat / adat, dan bersifat mendidik.

Tidak berpolitik memiliki maksud tidak mengganggu atau menentang kekuasaan kolonial Belanda di Hindia atau tidak “merusakkan kekuasaan pemerintah” kolonial sebagaimana istilah Rinkes tadi. Pengertian tidak menyinggung masalah agama karena Belanda sangat takut sebagaimana telah disinyalir Suminto (1996: 9) tentang kekuatan Islam sebagai identitas bangsa Hindia. Hal ini berkaitan dengan pengertian bersifat mendidik dalam Nota Rinkes, yaitu bagaimana mendidik bangsa Hindia agar menjadi jinak dan patuh kepada Belanda atau dalam istilah Suminto (1996: 3) bagaimana menjinakkan pribumi dan menghadapi Islam. Kasus yang berkaitan dengan Nota Rinkes, menurut Teeuw (via Pradopo, 1995: 97) adalah pengubahan naskah *Salah Asuhan* karya Abdul Muis. Naskah yang ditolak sama sekali oleh Balai Pustaka adalah *Belenggu* karya Armijn Pane.

Balai Pustaka, dengan kriteria Nota Rinkes, merupakan organ politik Pemerintah Kolonial Belanda dalam mempertahankan sekaligus melanggengkan kekuasaannya atas Hindia.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Sastra Hindia, mau tidak mau, berkaitan dengan bahasa Melayu yang pada gilirannya nanti menjadi bahasa Hindia. Menurut Teeuw (dalam Kridalaksana, 1991: 137-153), ada enam tahap perkembangan bahasa Hindia. Satu, bahasa Austronesia Purba (Proto-Austronesian). Dua, bahasa Melayu Purba (Proto-Malayic) yang berciri mendapat pengaruh bahasa Sansekerta dan ada sekitar abad VII. Tiga, bahasa Melayu Kuno yang berciri mendapat pengaruh bahasa arab dan ada sekitar abad XIII. Empat, bahasa Melayu Klasik. Lima, bahasa Melayu Modern yang ada sekitar abad XIX. Enam, bahasa Indonesia, bahasa Malaysa, dan bahasa Melayu Brunei serta Melayu Singapura.

Pembagian di atas lebih bersifat tipologis daripada historis, yaitu lebih berdasarkan kepada jenisnya, bukan dilihat dari tahun kelahirannya. Di sini perlu dibedakan mengenai tiga istilah dalam bahasa Melayu, yaitu: Melayu Rendah / Melayu Pasar (*lingua franca*), Melayu Tinggi, dan Melayu Klasik. Bahasa Melayu Klasik merupakan bahasa yang terdapat dalam naskah-naskah lama di istana-istana. Bahasa Melayu Rendah merupakan bahasa yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Rustam Effendi (via Rosidi, 1988: 145), bahasa Melayu Tinggi bukanlah kelanjutan dari bahasa Melayu Klasik atau bahasa Melayu Pasar. Bahasa Melayu Tinggi merupakan bahasa yang dipopulerkan dan disistamkan orang Eropa, seperti van Ophuysen, yang kemudian dipergunakan Balai Pustaka. Bahasa Melayu yang dibudayakan Balai Pustaka bukanlah bahasa Melayu yang hidup dan dipergunakan masyarakat luas. Padahal, bagi kalangan terpelajar Jawa penggunaan bahasa Melayu merupakan sarana guna mematahkan kebakuan tradisi. Pada tahun 1909, prinsip penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa bersama sudah diletakkan dengan digunakannya bahasa Melayu dalam *verslag Boedi Oetomo* (Nagazumi, 1988: 18). Segala penerbitan dalam bahasa Indonesia --- misalnya selebaran, majalah, surat kabar termasuk novel --- berusaha melahirkan dan menumbuhkan suatu bahasa nasional guna

membentuk suatu komunitas atau masyarakat lain dari masyarakat kolonial (Tsuchiya, 1986: 13).

Bahasa Melayu Tinggi atau bahasa yang disistemkan van Ophusysen²¹ ditetapkan guna mematahkan dan membungkam dinamisme masyarakat bumiputra yang hendak membentuk suatu komunitas yang lain sama sekali dari masyarakat kolonial ciptaan Belanda. Menurut Faruk (2001: 67) kodifikasi bahasa Melayu yang semula dimaksudkan sebagai alat kontrol terhadap kebebasan bahasa Melayu *lingua franca* justru berubah menjadi kekuatan kultural melawan pemerintah kolonial dan memberi jalan bagi lahirnya sebuah bahasa nasional antikelonial.

Lingua franca adalah bahasa campuran yang dipergunakan orang-orang bumiputra dengan pedagang asing (Samsuri, 1985: 12). Menurut Siegel (Faruk, 2001: 60-61, 63) *lingua franca* merupakan wahana penting yang menjembatani dunia lokal dengan dunia luar yang luas, misalnya surat kabar. Bahasa *lingua franca* menjembatani dunia lokal dengan berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Namun, sebagai bahasa yang terbentuk di pasar secara sambil lalu, bahasa *lingua franca* tidak pernah membentuk dirinya sebagai bahasa sejati yang berakar dalam diri berbagai komunitas yang penggunaannya yang telah memiliki bahasa sendiri. Bersama dengan gambaran dunia yang dibawanya, bahasa *lingua franca* hanya menjadi lapisan permukaan, yaitu hanya hidup di wilayah publik dan tidak pernah membentuk serta mempengaruhi identitas penuturnya secara mendalam. Dalam posisi tersebut, inilah kekuatan bahasa *lingua franca*. Bahasa *lingua franca* menjadi bukan milik siapa pun sekaligus menjadi milik siapa saja. Setiap orang memiliki peluang sama untuk masuk dan bertukar tempat, bertukar posisi. Dalam dan dengan bahasa Melayu, seseorang terbebaskan dari aturan ketat dari bahasanya sendiri. Bahasa Melayu menjadi bahasa pembebasan yang cair dan tak

²¹ di kemudian hari dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran berbahasa di Indonesia dengan penetapannya sebagai Ejaan yang Disempurnakan

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

terkontrol. Dengan dan dalam bahasa Melayu terbuka kesempatan gerakan ke dunia luar sekaligus gerakan kepada terbentuknya suatu identitas baru. Berkait dengan karya sastra, karya-karya dengan bahasa Melayu merupakan denyut nadi alamiah masyarakat.

D. Wacana Perlawanan

Ekspansi Belanda di akhir abad 19 yang telah dipaparkan di subab terdahulu tak lepas dari perkembangan kapitalisme sejak 1894. Untuk modal perdagangan, perkapalan, dan industri Hindia kurang berarti, tetapi untuk kapitalisme keuangan sangat menarik karena merupakan daerah penanaman. Penanaman kapital kolonial sangat menguntungkan dan modal kolonial makin berkembang karena banyak ditanam di penggalian bahan mineral, sementara tenaga sangat murah sehingga pertumbuhan kekuatan rakyat tidak ada, serta derah jajahan tetap tak memiliki modal sendiri. Pemerintah kolonial serta birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modalnya (Kartodirdjo, 1975: 34, 37). Pergerakan nasional Indonesia yang disebut di depan, yaitu Budi Utomo dan Sarekat Islam, bertujuan dan memiliki ciri penting dalam melahirkan dan membentuk masyarakat baru yang lain sifatnya dari masyarakat yang dikuasai penjajah. Suatu masyarakat baru yang mampu menentang masyarakat kolonial. Masyarakat baru yang membentuk institusi tandingan yang mampu berimbang bahkan mampu mengalahkan institusi kolonial (Tsuchiya, 1986: 188, 201). Para pejuang kemerdekaan, misalnya Soekarno di masa kemudian, mengakui pentingnya identitas nasional yang dibangun melalui mental yang kukuh. Soekarno menyebut bahwa bangsa Indonesia jangan bermental tempe, maksudnya bahwa mental yang kokoh guna melawan imperialisme dan kolonialisme (Awui, 2000). Hal ini membuktikan perlunya sebuah identitas nasional.

Persoalan penting pemerintah kolonial, bagaimana menjinakkan pribumi dan menghadapi Islam. Di satu sisi Belanda khawatir akan

timbul pemberontakan dari Islam fanatik, di sisi lain mereka optimis akan keberhasilan kristenisasi yang akan menyelesaikan semua persoalan. Islam sangat ditakuti karena dianggap mirip Katolik (Suminto, 1996: 3, 9). Abad ke-19 orang Belanda optimis dapat mengikis pengaruh Islam di Hindia dengan cara kristenisasi. Hal ini didasari oleh superioritas Kristen atas Islam (Suminto, 1996: 18).

Ada dua rasa superioritas kolonial atas rakyat Hindia. Pertama, superioritas kolonial sebagai bangsa Barat/Eropa yang telah dirintis Daendels dan Raffles yang sangat percaya pada keunggulan sistem Barat dan berkehendak diterapkannya sistem tersebut di Hindia. Politik etis dan politik asosiasi melanjutkan superioritas bahwa bangsa Barat berkewajiban mendidik, memberadabkan, memberi penerangan masyarakat Timur yang masih gelap gulita. Kedua, superioritas Eropa atas bumiputra.

Dalam pemikiran etis, penjajahan Belanda di Hindia dapat dibenarkan berdasar atas gagasan perwalian dan asosiasi, yang memiliki maksud bahwa Belanda memikul tanggung jawab memberi cahaya modernisasi ke dalam dunia masyarakat Hindia yang masih gelap, tradisional, serta terbelakang. Otonomi politik masyarakat Hindia memang tujuan akhir, tetapi hal tersebut ditunda dahulu sampai misi pemberadaban masyarakat Hindia tercapai (Shiraishi, 1986: 170). Sebagai kolonialis, Belanda perlu *inlandsch politiek*, yaitu kebijakan tentang bumiputra guna memahami dan menguasai bumiputra (Suminto, 1996: 11).

Model pemikiran politik etis merupakan wacana kolonial. Said (1996: 7,9, 16) menyebut bahwa hubungan antara Timur, dalam hal ini Hindia, dan Barat, dalam hal ini Belanda / Eropa, merupakan hubungan kekuatan atau dominasi. Timur sengaja diciptakan dengan segala atributnya yang lemah dan inferior. Timur sengaja ditimurkan oleh Barat. Eropa diidentifikasi sebagai yang berbeda dari orang-orang non-Eropa. Identitas Eropa adalah identitas yang lebih unggul dari bangsa

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

dan budaya non-Eropa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bahkan sudah seharusnya bangsa Eropa berkuasa atas bangsa Timur yang masih terbelakang.

Imperialisme adalah praktik, teori, dan sikap dari pusat metropolitan yang menguasai wilayah-wilayah yang jauh, dan kolonialisme adalah konsekuensi imperialisme, yaitu dengan dibangunnya pemukiman-pemukiman di wilayah jauh tadi. Imperialisme atau kolonialisme bukanlah tindakan mengumpulkan dan mengambil sesuatu. Formasi ideologi yang diciptakan adalah bahwa bangsa tertentu justru *membutuhkan dan memohon* untuk didominasi, dikuasai, dijajah bangsa Barat. Wacana kolonial tersebut bukan hanya sengaja diciptakan, tetapi juga disebarkan, kemudian dipelihara melalui dunia yang tidak sederajat antara Barat dan Timur (Said, 1993: 16, 40, 42, 290, 291).

Satu hal penting dalam wacana imperialisme / kolonialisme, yaitu adanya perlawanan. Tidak pernah ada pertempuran imperial antara Barat yang iktif melawan penduduk asli non-Barat yang menerima pasrah dan lembek. Selalu ada bentuk perlawanan aktif, yang pada akhirnya menemui kemenangan. Bentuk-bentuk perlawanan berwujud pada pertahanan budaya, penegasan identitas nasional, dan terciptanya perkumpulan dan partai-partai yang bercita-cita tentang penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional. Wacana perlawanan meliputi tiga topik besar. Pertama, desakan mendapatkan hak memandang keseluruhan sejarah komunitas secara koheren dan integral, yaitu mengembalikan nasion yang terpenjara kepada diri sendiri. Di sini konsep bahasa nasional menjadi sangat penting. Kedua, perlawanan merupakan cara alternatif memahami sejarah manusia. Ketiga, gerakan menjauh dari nasionalisme separatis menuju kepada pandangan yang lebih integratif mengenai komunitas manusia dan pembebasan manusia (Said, 1993: 12, 290, 291).

**Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial**

Kolonialisme Belanda di Hindia bukan saja mendapatkan wacana perlawanan dari masyarakat Hindia tetapi juga dari masyarakat Belanda sendiri. Di parlemen Belanda, oposisi bersatu dan menuntut diadakannya pembaharuan ‘liberal’ dengan pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian kolonial secara drastis, pembebasan atas pembatasan perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli, seorang mantan pejabat kolonial menerbitkan sebuah novel *Max Havelar* di tahun 1860. Novel ini mengungkap pemerintah kolonial yang menindas dan korup di Jawa. Dalam jangka panjang, buku ini menjadi senjata ampuh dalam menentang rezim penjajahan dari abad 19 di Jawa. Hasil langsung dari buku ini masih perlu diperdebatkan. Namun, semakin banyak suara Belanda yang menyokong pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa. Akhir abad 19, para pegawai kolonial berangkat ke Hindia dengan membawa *Max Havelar* dan amanatnya di otak mereka (Ricklef, 1998: 189, 227). Multatuli memberi inspirasi yang besar dan luar biasa bagi para pejuang sosialis Belanda di akhir abad 19. *Max Havelar* turut memenangkan golongan dan gagasan liberal di negeri Belanda yang mengubah haluan politik Belanda terhadap Hindia. Tahun 1870, dengan keluarnya Undang-Undang Agraria, berhentilah Sistem Tanam Paksa / kulturstelsel yang telah berkuasa sejak 1830 (Sastrowardoyo, 1983: 42-44, 43).

Menurut Jassin (1983: 207) *Max Havelar* “bukan saja suatu dokumen sejarah tapi juga suatu gugatan terhadap keburukan-keburukan yang terasa aktual dalam setiap masyarakat”.²² Sastrowardoyo (1983: 40, 47, 67) memberi penilaian yang lebih berani tentang *Max Havelar*. Menurutnya, *Max Havelar* mengandung gugatan kepada Raja Belanda untuk mendatangkan keadilan di daerah jajahan Hindia serta desakan

²² Bahasa yang digunakan Jassin dapat disebut lunak. Hal ini dapat dipahami karena kutipan teks tersebut diambil dari pidato Jassin pada upacara penyerahan Hariah Martinus Nijhoff di Den Haag, Belanda, 26 Januari 1973. Jassin menerima hadiah tersebut.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

agar rakyat jangan dihisap dan ditindas demi keuntungan dan kemakmuran negeri Belanda. Multatuli tidak peduli dengan cara bercerita. Amanat yang utama, yaitu rakyat di Hindia Belanda menderita dan pembaca dituntut perhatiannya kepada nasib mereka. Multatuli bersinggungan dengan masalah perbudakan dan penjajahan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang gawat dan mendesak.

Di Hindia, wacana perlawanan atas Belanda muncul dalam wujud pergerakan, pers bumiputra, dan sastra. Di bidang sastra, wacana perlawanan berwujud pada apa yang disebut sebagai periode sastra revolusioner, sastra nasionalis, dan sastra asimilatif.²³ Sastra nasionalis diwakili Tirtoadisuryo, Mohamad Yamin, dan Abdul Muis. Ciri sastra nasionalis adalah menunjukkan sikap nasionalisme, tetapi dalam nada yang tidak sekeras sastra revolusioner. Sastra revolusioner, diwakili karya Mas Marco dan Semaun. Mereka berani mengekspos serta mengecam penjajahan Belanda dan menyatakan aspirasi tentang kemerdekaan. Sastra asimilatif atau sastra peranakan diwakili Njoo Cheng Seng, Liem Khing Hoo, atau Kwee Tek Hoay. Sastra asimilatif, oleh Faruk (2000: 64), dapat disebut wacana perlawanan karena adanya gambaran kecenderungan perilaku atau hubungan seksual yang menyimpang, yang terbuka, misalnya penggambaran hubungan seks dan hubungan pergundikan atau pernyaaian.

SH pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar *Sinar Hindia* pada tahun 1918. Tahun 1919 karya itu terbit sebagai buku. *SH* tidak termasuk dalam tradisi Balai Pustaka. Dalam tradisi Balai Pustaka sebagaimana disebut Faruk (1999b: 3) bahwa novel pertama sastra Hindia adalah *Azab dan Sengsara* (1920) karya Merari Siregar, sementara novel awal yang dianggap menojol adalah *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli.

SH terbit bersamaan dengan maraknya pergerakan nasional.

²³ Peneliti meminjam istilah dan ciri ini dari Liang Liji (Faruk, 2000: 51-53)

**Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial**

Pergerakan nasional diekspresikan dalam wujud surat kabar, rapat, sarekat pekerja, pemogokan, partai, novel nyanyian, sandiwara, dan revolusi. Pergerakan tersebut merupakan upaya mencari bentuk kesadaran politik baru yang dapat disebut sebagai kesadaran akan identitas atau kesadaran nasional atas diri masyarakat bumiputra (Shiraishi, 1997: xi).). Segala penerbitan dalam bahasa Hindia --- selebaran, majalah, surat kabar termasuk novel --- menurut Tsuchiya (1986: 13), berusaha melahirkan dan menumbuhkan suatu bahasa nasional guna membentuk suatu komunitas atau masyarakat lain dari masyarakat kolonial. Menurut Benedict Anderson (Heryanto, 1989), bangsa merupakan “masyarakat rekaan” dan karenanya peran media massa sangat besar pada proses perekaan tersebut.

Pergerakan nasional menggunakan segala cara dan media --- termasuk di dalamnya bentuk-bentuk kesenian yang berupa sandiwara, nyanyian, maupun novel. Kesadaran identitas nasional menghasilkan munculnya pers bumiputra sebagai alat penyampai pikiran. Pers yang muncul pada saat itu, misalnya, *Medan Priyayi* (1907-1912) di Bandung yang dipelopori Tiroadisoejo; *Oetoesan Hindia* (1913) organ Sarekat Islam Surabaya; *Sarotomo* (1912) pers Sarekat Islam Surakarta; *Doenia Bergerak* (1914) organ IJB (Persatuan Islam Batavia) (Yuliati, 1994a: 206-207). Melalui pers diperjuangkan perbaikan hidup rakyat. Melalui pers dipaparkan tentang isu-isu sosial, ekonomi, serta politik dengan tajam dan jelas (Yuliati, 1994b: 45).

Karena sifat pers yang demikian itulah maka muncul *Haatzau artikelen*. *Haatzau artikelen* merupakan pasal-pasal pada masa kolonial Belanda yang mengatur hukuman terhadap orang yang melaksanakan penyebaran rasa benci yang berupa gambar, tulisan, atau tindakan. Peraturan tersebut dibuat guna mengatasi suara-suara pers, terutama pers bumiputra, yang dirasakan mengancam kestabilan dan kewibawaan pemerintah kolonial Belanda. Peraturan pertama pers masa kolonial, ditetapkan tahun 1856, dengan nama *Reglement op de Drukweken in*

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Nederlandsch-Indie (Peraturan tentang Barang-barang Cetak di Hindia Belanda). Peraturan ini dibuat karena karakter pers yang dianggap mengganggu pemerintah dan menghasut. *Drukpers Reglement* tersebut merupakan pengatur dan penindak setiap kritik yang tak bisa diterima oleh pemerintah kolonial. Atas desakan pihak demokratis, “Drukpers Reglement” tahun 1865 diperbaiki dengan “Koninklijk Beluif” pada 19 Maret 1906, yaitu sistem pengawasan preventif diganti dengan sistem pengawasan represif. Dalam realitasnya, peraturan tersebut ternyata tidak memadai untuk mengawasi perkembangan kesadaran politik masyarakat Hindia Belanda. Pada 15 Maret 1914, “wetboek van Strafrecht” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk bangsa Eropa dan Bumiputra dilengkapi dengan *Haatzau artikelen* dengan ketentuan sebagai berikut.

Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan, menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada pemerintah Belanda atau Hindia Belanda, akan dihukum penjara selama 5 – 10 tahun.

Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan, menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara penduduk Belanda atau Hindia Belanda akan dihukum penjara selama 6 hari sampai 5 tahun.

Peraturan itu diperbaharui dalam Staatsblad 1918 no 269. Pada yang terakhir “Haatzai Artikelen” tercantum dalam pasal 154, 155, 156, 157. Pasal 154 dan 155 dikenakan kepada siapa saja yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 156 dan 157 dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan terhadap sekelompok penduduk di Hindia Belanda. Marco pernah terkena tuntutan delik pers dan tanggal 23 Nopember 1915, ia menjalani hukuman selama 100 hari di Mlaten Semarang. Seharusnya Marco terkena 7 bulan, tetapi ISDV, IJB, Insulinde minta Gubernur Jenderal

agar sisa hukuman Marco dihapuskan. Marco dibebaskan tanggal 26 Pebruari 1916. Sekeluarnya dari penjara, ia dikirim ke Belanda selama 5 bulan sebagai koresponden oleh Goenawan, pimpinan *Pantjaran Warta*. Karena artikel bersambungannya yang berjudul “Sama Rata Sama Rasa”, di bulan Pebruari di *Pantjaran Warta*, Marco menjalani hukuman penjara lagi selama setahun di Batavia. Tanggal 21 Pebruari 1918, Marco bebas dan bekerja sebagai redaktur *Sinar Djawa* di Semarang (Yuliati, 1994a: 202-209).

SH dipaparkan dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana pendapat Tsuchiya (1986: 13), selebaran, majalah, surat kabar --- termasuk novel berbahasa Indonesia --- berusaha melahirkan dan menumbuhkan suatu bahasa nasional guna membentuk suatu komunitas atau masyarakat lain dari masyarakat kolonial. Bahasa Indonesia identik dengan komunitas baru di luar komunitas kolonial. Marco hendak mengubah masyarakat Hindia dari masyarakat tanpa identitas, tertindas, dan terjajah menjadi masyarakat dengan identitas dan bebas. Masyarakat Hindia yang merdeka dan penjajahan kolonial Belanda.

SH menggambarkan dengan keras tiga hal. Pertama, pemerintah kolonial yang sengaja membuat bodoh masyarakat Hindia. Kedua, ideologi rasialisme dengan superioritas kolonial dan feodalisme superioritas priyayi. Ketiga, nasionalisme *chauvinistik* dengan retorika tradisi. Marco dan *SH* meng-*counter* dan menggoyang hegemoni ideologi pemerintah kolonial Belanda. Marco dan *SH* mengobarkan *counter* hegemoni masyarakat Hindia guna membentuk hegemoni alternatif atau hegemoni baru, yang lain sama sekali dari yang dikehendaki pemerintah kolonial. *SH*, bukan sekedar “cermin pasif mengenai dunia, melainkan sejenis tindakan terhadap dunia”.²⁴ Marco melakukan tindakan terhadap dunia kolonial Belanda. Dalam terminologi Gramsci, *SH* memfasilitasi kekuatan progresif revolusioner. *SH* adalah upaya pembentukan

²⁴ saya meminjam istilah ini dari Faruk (1997: 18)

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

hegemoni dan budaya baru meskipun baru pada tahap awal karena Marco masih terperangkap feodalisme. *SH* adalah salah satu upaya persiapan budaya sebelum sebuah kelas melakukan tindakan politik.

Ada tiga alasan mengapa Marco mengungkapkan idenya melalui bentuk novel. Pertama, pada saat itu ia berada dalam penjara, sehingga tidak memungkinkan tulisannya dimuat di surat kabar. Dalam pengantarnya Marco menulis sebagai berikut.

Sesungguhnya ini karangan buah pena kami waktu kami menjalani hukuman perkara *persdelict* di *Civiel en Militair Gevangenhuis*, di *Welleveden*, lamanya satu tahun. Meskipun di dalam penjara kami tidak bisa tulis-menulis di dalam surat kabar, tetapi kami bisa mengarang buku-buku seperti *Syair Rempah-Rempah*, *Student Hijo*, *Matabariah*, dan lain-lain.

(hlm. vii)

Kedua, penegasan jati diri bangsa terjajah. Menurut Said (1995: 12), cerita-cerita atau narasi menjadi metode yang digunakan oleh bangsa terjajah untuk menegaskan jati diri dan eksistensi sejarah.

Ketiga, dalam model Gramsci, menanamkan hegemoni membutuhkan waktu sangat lama, dan novel lebih memadai dalam menyampaikan gagasan itu. Dalam bahasa Damono (1984: 7), “novel menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya”. Tugas menciptakan hegemoni baru bukanlah pekerjaan sekali jadi. Menciptakan hegemoni baru, menurut Gramsci (Simon, 1999: 26, 12), hanya dapat terwujud dengan mengubah kesadaran, pola pikir dan pemahaman masyarakat, konsep tentang dunia, serta norma perilaku moral dan proyek ini memerlukan waktu yang sangat lama.

Bentuk novel mampu melakukan apa yang disebut Gramsci itu.

Marco telah memulai dan melakukan hal tersebut. Adalah naif manakala bangsa Indonesia mengesampingkan hal yang merupakan salah

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

satu jalan yang perintisan kepada kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

5

Penutup: Ideologi Perlawanan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

SH mengungkap kolonialisme Belanda di Hindia melalui jalinan peristiwa. Kolonialisme merupakan perpanjangan tangan kapitalisme. Ideologi liberalisme hadir melalui Walter, Roos, Betje, dan Hijo. Humanisme muncul dalam jalinan percintaan. Humanisme berjalin dengan demokrasi yang disampaikan oleh R. Potronoyo, *Regent Jarak*, serta Prayoga. Dalam *SH* muncul teisme (agama) yang disampaikan oleh R. Potronoyo dan Hijo.

Belanda menerapkan rasialisme yang menganggap ras unggul adalah Belanda; sementara Jawa, representasi Hindia, merupakan ras rendah. Belanda memiliki semua sifat kebaikan dan Hindia memiliki semua sifat keburukan. Tokoh rasialisme superioritas kolonial adalah Jepris dan Anna. Keduanya melanjutkan superioritas Daendels, Raffles, politik etis, dan politik asosiasi dengan program pemberadaban atas masyarakat Hindia. Feodalisme sejalan dengan rasialisme karena mendukung kekuasaan dan keunggulan ras Belanda.

Di bawah kekuasaan Belanda, ideologi dominan adalah rasialisme yang di dalamnya terdapat kolonialisme. Tokoh intelektual organik yaitu *Sergeant* Jepris dan Anna. Tokoh pemimpin dalam kelompok dominant tidak ada. Kolonialisme memunculkan nasionalisme bumiputra yang hadir melalui Pergerakan Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan penanda bumiputra yang belum bernama. Rasialisme menimbulkan demokrasi. Hijo, R. Potronoyo, dan Prayoga termasuk intelektual

tradisional karena memberikan kesadaran di luar ideologi dominan. *Regent* Jarak termasuk tokoh pemimpin karena jabatannya sebagai bupati.

Dalam upaya membentuk kekuatan kelompok yang lebih besar untuk melawan kelompok dominan sangat dibutuhkan negosiasi. Pembelaan Walter atas bumiputra merupakan bentuk negosiasi ideologi. Walter dan Betje, tokoh dominan dengan solidaritas-identitas Belanda, sudah selayaknya jika memiliki rasialisme superioritas kolonial. Keduanya, justru menyukai budaya Jawa dan mencintai tokoh bersolidaritas-identitas bumiputra. Oleh karena itu, Betje dan Walter disebut tokoh negosiator.

Hijo, R. Potronoyo, *Regent* Jarak, Wardoyo, Walter, serta Betje menentang superioritas kolonial Jepri dan Anna. Dalam situasi ini, tingkat hegemoni dalam kondisi merosot, yaitu antara kelompok *subaltern* tidak sejalan dengan kepemimpinan kelompok dominan. Kelompok *subaltern* merongrong ideologi kelompok dominan. Kolonialisme kelompok dominan digerogeti nasionalisme kelompok *subaltern*. Rasialisme kelompok dominan ditentang demokrasi kelompok *subaltern*. Kesadaran akan solidaritas-identitas menjadikan kelompok *subaltern* memiliki nasionalisme *chauvinistik* dengan retorika tradisi. Kebudayaan hegemonik berupa rasialisme-kolonialisme. Kebudayaan endapan berwujud feodalisme. Kebudayaan yang sedang bangkit berupa perjuangan demokrasi dan wujud nasionalisme *chauvinistik*.

Kedatangan Hijo di negeri Belanda untuk bersekolah merupakan penanda bumiputra meraih simbol kemajuan dan bukti penakhlukan bumiputra atas kolonial sebagaimana penakhlukan Hijo atas Betje. Hijo di Belanda menunjukkan bahwa ia adalah sang kolonial bagi Belanda. Hijo tidak perlu kawin dengan Betje sebagaimana Walter tidak kawin dengan Wungu. Hijo dan Wungu tetap menjaga superioritas bumiputra atas kolonial. Hijo superior karena dicintai oleh wanita Belanda. Hijo me-niduri Betje sekaligus me-mutuskannya.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:
Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

Dengan adanya perkawinan antara Hijo dengan Wungu dan Wardoyo dengan Biru, kelompok *subaltern* sampai ke fase hegemonik karena telah melengkapi diri dengan ideologi nasionalisme *chauvinistik* dengan retorika tradisi. Meskipun demikian, blok historis belum terbentuk. Hegemoni hanya bersifat lokal, belum global. Belum ada kepaduan antara kelompok pergerakan (Prayoga/ Sarekat Islam), kelompok priyayi (Wungu, Wardoyo, *Regent* Jarak), kelompok saudagar (Hijo, R. Potronoyo), serta kelompok negosiator (Betje, Walter). Kepaduan hanya diwujudkan dalam ikatan intelektual tradisional dengan priyayi, yaitu antara Hijo dengan Wungu. Dalam skala yang lebih luas, keluarga Hijo (R.Potronoyo), sebagai saudagar, membutuhkan legitimasi menjadi priyayi dengan Hijo bersekolah dan kawin dengan Wungu. Sarekat Islam muncul sebagai tambahan cerita ketika Prayogo mengikuti kongres Sarekat Islam. Ideologi agama hanya diperalat oleh nasionalisme. Nasionalisme menggunakan simbol dan identitas agama untuk kepentingannya.

Hijo berkarakter pendita, tetapi secara keseluruhan novel *SH* berkarakter satria. Marco dengan sifat satria adalah intelektual tradisional yang mengkritisi *common sense* rasialisme superioritas kolonial dan feodalisme serta berusaha menumbangkannya melalui nasionalisme *chauvinistik* dengan retorika tradisi saat Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Marco dan *SH* mengobarkan *counter* hegemoni masyarakat bumiputra untuk membentuk hegemoni baru. Dalam diri Hijo terdapat ideologi kapitalisme, liberalisme, teisme, demokrasi, humanisme, dan feodalisme. Jati diri Hijo adalah feodal. Hijo melanggengkan feodalisme karena dua hal. Pertama, terjadinya perkawinan antara intelektual tradisional dengan priyayi, yaitu antara Hijo dengan Wungu. Kedua, asas keturunan dalam jabatan, yaitu Wardoyo yang menjadi *regent* menggantikan papanya. Sebuah perlawanan yang kontradiktif. Dalam

satu sisi Hijo melawan feodalisme. Di sisi lain, justru ia tertelung ideologi tersebut.

Ada dua alasan mengapa Marco terperangkap dalam feodalisme. Satu, dalam usaha membangun hegemoni Marco harus menyesuaikan nasionalisme dengan tradisi feodalisme yang kuat dalam masyarakat. Dua, Marco masih belum dapat melepaskan diri dari pola dikotomis bumiputra-kolonial.

Belanda menerapkan rasialisme dengan adanya pembagian golongan masyarakat menjadi eropa, timur asing, dan bumiputra. Belanda memanfaatkan feodalisme masyarakat bumiputra guna tetap mendukung Belanda sebagai ras superior dan yang lebih penting adalah Belanda ingin mempertahankan kekuasaannya atas Hindia. Kolonialisme Belanda tidak terlepas dari perkembangan kapitalisme. Hindia menarik karena merupakan daerah penanaman kapital. Dalam pemikiran etis, penjajahan Belanda dapat dibenarkan, bahkan dibutuhkan Hindia. Belanda memiliki tanggung jawab untuk memberi cahaya modernisasi kepada masyarakat Hindia yang masih gelap, tradisional, serta terbelakang. Kesemua ini adalah wacana kolonial.

SH dipaparkan dalam bahasa Melayu sebagai usaha menumbuhkan suatu masyarakat yang lain dari masyarakat kolonial. Marco hendak mengubah masyarakat Hindia yang tanpa identitas dan terjajah menjadi masyarakat dengan identitas dan bebas, masyarakat bumiputra yang merdeka dari kolonial Belanda. Kesemua ini merupakan wacana perlawanan.

Marco mengungkapkan idenya melalui bentuk novel. Cerita narasi menjadi metode yang digunakan oleh bangsa terjajah untuk menegaskan jati diri dan eksistensi sejarah. *SH* memfasilitasi kekuatan progresif revolusioner untuk membentuk hegemoni dan budaya baru meskipun baru pada tahap awal, sebuah upaya persiapan budaya sebelum sebuah kelas melakukan tindakan politik. Marco dan *SH* telah

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

meletakkan dasar bagi generasi berikutnya untuk melakukan tindakan politik.

Daftar Pustaka

- Awuy, Tommy F. 2000. "Membaca Mitos, Merajut Identitas Manusia Indonesia" dalam *Kompas* 28 Juni 2000.
- Budianta, Melani. 1994. "Yang Memandang dan Yang Dipandang, Potret Orang Kecil dan Wacana (Post-)Kolonial" dalam *Kalam* edisi 2 tahun 1994.
- Bellamy, Richard. 1990. *Teori Sosial Modern Perspektif Italia*. Terjemahan Vedi R. Hadiz. Jakarta: LP3S.
- Damono, Sapardi Djoko. 1984. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- _____. 2000. "Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia" dalam Kratz, E. Ulrich (ed.). 2000. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: KPG.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka
- Eneste, Pamusuk. 1990. *Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern*. Jakarta: Djambatan.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*. 1989. Jilid 5. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Faruk. 1988. *Strukturalisme Genetik dan Epistemologi Sastra*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- _____. 1994. *Pengantar Sosiologi Sastra, dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1995. *Perlawanan Tak Kunjung Usai, Sastra Politik Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1997. "Memasuki Dunia Imajiner: Soal Sastra Mutakhir dan Kritiknya" dalam *Humaniora* IV 1997.
- _____. 1999a. "Mimikri dalam Sastra Indonesia" dalam *Kalam* no. 14 tahun 1999.
- _____. 1999b. *Hilangnya Pesona Dunia, Siti Nurbaya, Budaya Minang, Struktur Sosial Kolonial*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- _____. 2001. *Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan Ideologi*. Yogyakarta: Gama Media.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

- Faruk, Bakdi Soemanto, dan Bambang Purwanto. 2000. *Perlawanan atas Diskriminasi Rasial-Etnik: Konteks Sosial-Ideologis Kritik Sastra Peranakan Tionghoa*. Magelang: Indonesia Tera.
- Fokkema, DW dan Elrud Kunne-Ibsch. *Teori Sastra Abad Kedua Puluh*. Terjemahan J. Praptadiharja & Kepler Silaban. Jakarta: Gramedia.
- Hendarto, Heru. 1993. "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci" dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Heryanto, Ariel. 1989. "Berjangkitnya Bahasa-Bangsa di Indonesia" dalam *Prisma* no. 1 Tahun XVIII 1989.
- Hoare, Quintin dan Geoffrey Nowell Smith (ed.). 2000. *Antonio Gramsci Sejarah dan Budaya*. Terjemahan Ira Puspitorini dkk. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- _____. 2001. *Antonio Gramsci Catatan-Catatan Politik*. Terjemahan Ira Puspitorini dkk. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Iskandar, Nur Sutan. 2000. "Peranan Balai Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Indonesia dalam Kratz, E. Ulrich (ed.). 2000. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: KPG.
- Jassin, HB. 1983. *Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia*. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*. Terjemahan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, Sartono, A. Sudewo, Suhardjo Hatmosuprobo. 1993. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karyanto, Ibe. 1997. *Realisme Sosialis Georg Lukacs*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Jaringan Kerja Budaya.
- Kompas*. 31 Oktober 1999. "Jakob Sumardjo".
- _____. 10 Oktober 1999. "Merebaknya Buku-Buku Bertema Sensitif".
- _____. 22 Agustus 2000. "Pelarangan Buku Harus Dicabut".
- Kridalaksana, Harimurti (ed). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

- Kurniawan, Eka. 1999. *Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis*. Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia
- Lo, Jacqueline dan Helen Gilbert. 1998. "Postcolonial Theori: Possibilities and Limitations". Makalah dalam an International Research Workshop tentang Postcoloniality and The Question of Modern Indonesia Literature. University of Sydney. 29-31 Mei 1998.
- Magnis-Suseno, Franz. 1984. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1999. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Marco Kartodikromo. 2000. *Student Hijo*. Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia.
- Marcus AS dan Pax Benedanto (ed.). 2000. *Kesastraan Melayu Tionghoa Jilid 1*. Jakarta: KPG, Yayasan Adikarya Ikapi, dan The Ford Foundation.
- Nagazumi, Akira. 1988. "Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa" dalam Refleksi *Tempo* bulan Juni 1988.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, MC. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Riff, Michael A. 2001. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roolvink, R. 1959. "Roman Pitjisan Bahasa Indonesia" dalam *Pokok dan Tokoh II*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Rosisi, Ajip. 1988. *Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1991. *Iktisar Sejarah Sastra Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan*. Terjemahan Rahmani Astuti. Jakarta: Mizan.
- _____. 1996. *Orientalisme*. Terjemahan Asep Hikmat. Bandung: Pustaka.
- Salamini, Leonardo. 1981. *The Sociology of Political Praxis an Introduction to Gramsci's Theory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Salmon, Claudine. 1985. *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Samsuri. 1985. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

- Sargent, Lyman Tower. 1987. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer Sebuah Analisis Komparatif*. Terjemahan Henry Sitanggang. Jakarta: Erlangga.
- Sastrowardoyo, Subagyo. 1983. *Sastra Hindia Belanda dan Kita*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1992. *Sekilas Soal Sastra dan Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Selden, Raman. 1993. *Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini*. Terjemahan Rachmat Djoko Pradopo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shadily, Hassan dan Van Hoeve. Tt. *Ensiklopedia Indonesia*. Jilid 2. Jakarta: Ihtiar Baru.
- Shiraishi, Takashi. 1986. ‘ “Satria” vs “Pendita” Sebuah Debat dalam Mencari Identitas’ dalam Akira Nagazumi (ed.). 1986. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-ekonomi Abad XIX & XX dan berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 1997. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Terjemahan Kamdani & Imam Bahaqi. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar
- Siregar, Bakri. 2000. “Telah Lahir Suatu Angkatan” dalam Kratz, E. Ulrich (ed.). 2000. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: KPG.
- Siswanto, Joko. 1998. *Sistem-Sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derida*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, BP. 1980. *Sejarah Sastra Indonesia 1*. Ende, Flores: Nusa Indah.
- Stillo. <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#hege>. Diakses 15 Januari 2001.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarjo, Yakob. 1979. *Masyarakat dan Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- _____. 1982. *Novel Populer Indonesia*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Hegemoni Gramsci dalam Sastra Indonesia:

Student Hijo, Nasionalisme, dan Wacana Kolonial

- _____. 1986. *Novel Indonesia Mutakhir; Sebuah Kritik*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- _____. 1991. *Pengantar Novel Indonesia*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Suminto, Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, Leo. 1996. *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Teeuw, A. 1978. *Sastra Baru Indonesia 1*. Ende, Flores: Nusa Indah.
- Thohir, Mudjahirin. 1994. “Fungsi Legenda Ki Joko Sungging bagi Orang-Orang Jepara” dalam *Lembaran Sastra* no. 17 Tahun 1993-1994. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang.
- Tsuchiya, Kenji. 1986. “Perjuangan Taman Siswa dalam Pendidikan Nasional” dalam Akira Nagazumi (ed.). 1986. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-ekonomi Abad XIX & XX dan berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Van der Weij, PA. 1988. *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliati, Dewi. 1994a. “‘Haatzaai Artikelen’ Pengikat Kebebasan Pers dalam Era Kolonial Belanda di Indonesia” dalam *Lembaran Sastra* no. 17 Tahun 1993-1994. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang.
- _____. 1994b. “Semaoen, Serikat Buruh dan Pers Bumiputera dalam Pergerakan Kemerdekaan (1914-1923)” dalam *Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi* no. 5 Juli Tahun 1994. Jakarta: Gramedia.
- Yusuf, Suhendra. 1995. *Leksikon Sastra*. Bandung: Mandar Maju.
- Zon, Fadli. 1993. “Potret Pergulatan Sastra dan Sastrawan Rusia di Bawah Penindasan’ dalam *Horizon* no. 11. November 1993.



Penulis:

Harjito lahir di Semarang. Bersekolah di SD Peterongan 1 dan SMP Negeri 3 Semarang. Lulus dari SMA Negeri 3 Semarang, ia melanjutkan ke Universitas Diponegoro Semarang. Jenjang S2 dan s3 diselesaikan di Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta. Disertasinya berjudul “Resistensi dan Tatanan Pikiran Perempuan dalam Cerita Anak Tradisional Jawa Tengah”. Ia menjadi Ketua Progdi Pend. Bahasa & Sastra Indonesia, Pascasarjana Universitas PGRI Semarang. Ia seorang peneliti dan pembicara di berbagai forum.

Sejak remaja, ia suka menulis. Dengan menyandang nama Djito Okuru, beberapa karya fiksi dihasilkan, misalnya: “Cerita buat Adam”, “Sarung Cinta”, “Namanya Astrid”, “Lala” (novelet), “Gen Asmara” (cerita bersambung), “Jitet” (cerita bersambung).

Buku yang sudah diterbitkan ada 3, yaitu Melek Sastra: untuk 17 Tahun ke atas, Potret Sastra Indonesia, dan Jurus Jitu Menulis Populer dan Ilmiah.

Harjito dapat disapa di www.jitonote.com. ; www.jejaringjito.com; facebook: sena harjito; pengelola grup jito note di facebook; twitter: @masharjito.
Email: harjitoian@gmail.com., harjito96@yahoo.co.id.